

PENGANTAR:
M. Romahurmuziy & Masruhan Samsurie

Jalan *Trabasku*

Dalam Bingkai Politik Lokal Jawa Tengah



Abdul Aziz HR.
— Sebuah Memoar Politik —

Jalan Trabasku

(Dalam Bingkai Politik Lokal Jawa Tengah)



ABDUL AZIZ RAZAQI
— Sebuah Memoar Politik —

Jalan Trabasku

(Dalam Bingkai Politik Lokal Jawa Tengah)

Penulis : Abdul Aziz Razaqi

Editor : Imam Mardjuki, dkk.

Desain & tata letak : Nimas Brantandari

Cetakan pertama, 16 Juni 2025

ISBN: 978-634-7188-48-9

Diterbitkan Oleh:

MINNA Lasem Institut

Email : *Minna_LasemInstitut@gmail.com*

Jl. Sunan Bonang No.12 Soditan Lasem Rembang Jawa
Tengah

&

PT. Pustaka Saga Jawadwipa

Jl. Kedinding Ior Gang Delima No.4A Surabaya

Nomor Kontak: 085655396657

Anggota IKAPI:

No. 367/JTI/2023

Buku ini dilindungi oleh Pasal 113 UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

Daftar isi

❖ Prolog penulis : Tentang Jalanku	iv
❖ Pengantar editor : Jejak Kritis Legislator Agamis	ix
❖ M. Romahurmuziy : Sosok Politisi Lokal yang Lugas	xii
❖ Masruhan Syamsurie : ‘KangDoel (politisi) dan MEMOAR POLITIKnya’	xvi
1. Anomali Politik Anggaran Daerah	1
2. Menerobos Bosda Jateng	12
3. Menolak Tol Demi Rel	25
4. Hibah yang Menghimpit	35
5. Insentif Guru yang Terlupakan	46
6. Sertifikasi Halal UKM	57
7. Saat Pansus SOTK	64
8. Skema Backlog Perumahan	70
9. 100 Miliar Untuk Desa Wisata	79
10. The End of PLTU Batubara	86
11. Soal Abrasi dan Akresi	95
12. Mempertahankan Mangrove Kita	101
13. Pegunungan Kendeng Nirtambang	106
14. Again, Pansus RTRW Jawa Tengah	112
15. Rekonstruksi Lasem Kota Pusaka	121
16. Museum Islam Nusantara Lasem	143
17. Rekonstruksi Sejarah Demak	156
18. To Be Undesirable	165

Prolog

'Tentang Jalanku'

Dua kali tersingkir sebab "undesirable". Pakemnya, jatah pimpinan pansus digilir urut dari fraksi terbesar hingga terkecil. Lima bulan lalu, saya tergusur dari 'ndilalah' jatah wakil ketua pansus RTRW Jateng 2024-2044. Barusan, tergeser pula dari potensi jatah ketua pansus RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Jateng 2025-2045 (sebab diserahkan ke Bapemperda DPRD Jateng).

"Undesirable atau tidak diinginkan. Oleh siapa ? Oleh mereka yang pakem berpikirnya terlalu normatif, kolot dan atau 'mutatis mutandis'.

Bagi saya, wakil rakyat harus berani dengan terobosan kebijakan, meski melawan aturan di atasnya (saat menjadi ketua pansus revisi RTRW tahun 2018). Ia juga harus berani berimprovisasi untuk mewujudkan kebijakan yang adil (saat menjadi ketua pansus RPJMD 2018-2023). Ia juga harus berani merombak konsep penggabungan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) berdasarkan arah yang lebih paradigmatis (saat menjadi ketua pansus SOTK tahun 2022). Namun sekali lagi, "undesirable".

*Dua bulan lagi pengabdianku berakhir.
Inilah perjalanan indahku ...*

Begitulah akhir tulisan saya di salah satu akun media sosial (akun facebook @abdolaziz). Ya, ini memang soal perjalanan saya. ‘*Perjalanan indahku*’. Perjalanan penuh dinamika dalam 3 periode berkancah di politik lokal Jawa Tengah (2009-2024). Tulisan itu saya posting pada tanggal 5 Juni 2024, dua bulan sebelum purna tugasku sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Tentu saja, setiap orang berhak memilih ‘jalan’ nya. Tak terkecuali saya. Pilihan ‘jalan’ untuk terus berjuang, di tengah kondisi politik yang penuh dengan anomali. Pilihan ‘jalan’ untuk terus menguji konsistensi, di tengah berbagai kepentingan pragmatis yang berkelindan. Pilihan ‘jalan’ untuk terus berimprovisasi, agar muncul kebijakan yang memberi arti.

Pilihan ‘jalan’ **menembus** berbagai sekat, norma dan paradigma. Sekat etik yang harus dijaga, karena konsep harmoni dan sinergi eksekutif-legislatif dalam sistem pemerintahan otonomi daerah. Juga, karena dalam satu konsep koalisi politik pemerintahan Ganjar-Yasin di periode 2018-2023. Norma empirik yang harus dihargai dalam kasus hibah yang menghimpit dengan sesama partai Islam dan stakeholder lembaga keagamaan yang nasibnya selalu terabaikan. Dan paradigma historik yang harus diusung dalam kasus pembangunan Museum Islam Nusantara Lasem dan gagasan Rekonstruksi Demak.

Pilihan ‘jalan’ **menerobos** logika konservatif yang hanya berpikir normatif di tengah tantangan yang semakin kompetitif. Normativisme berpikir dalam kasus anomali politik anggaran daerah, hibah yang menghimpit, skema backlog perumahan, 100 miliar untuk desa Wisata dan sertifikasi Halal UKM di Jawa Tengah.

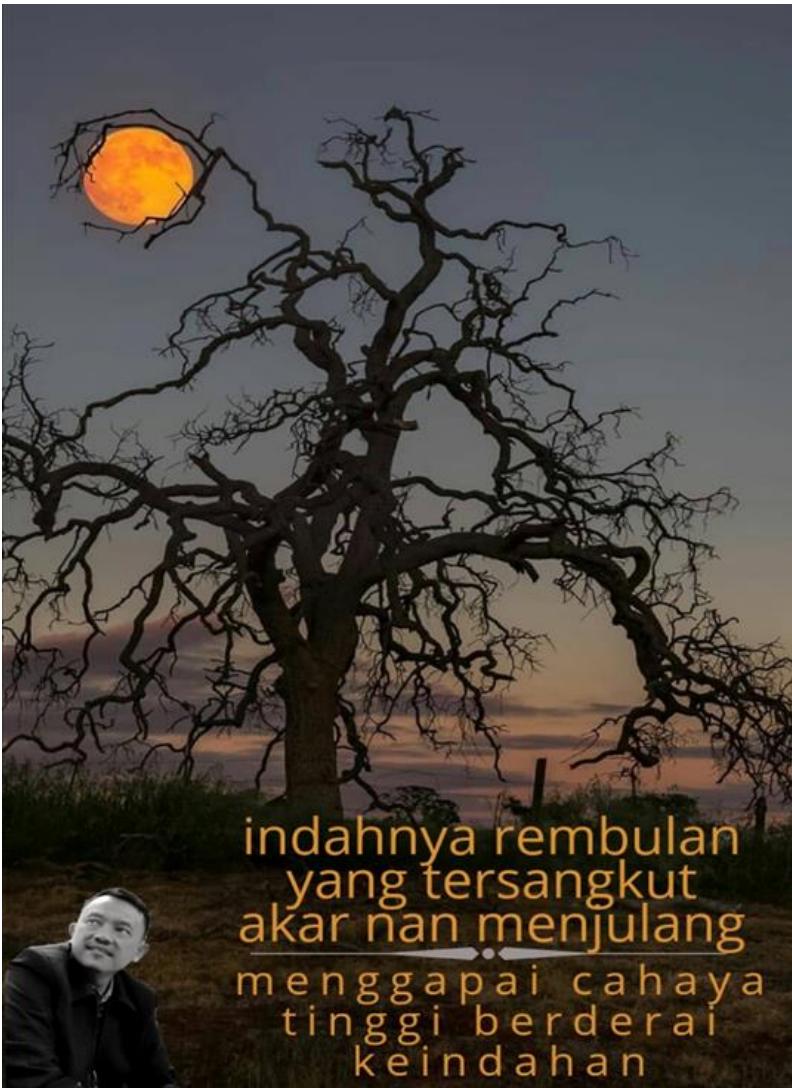
Pilihan ‘jalan’ **menerabas** batas-batas aturan dalam kasus menolak TOL demi REL, menerobos BOSDA Jateng, the end of PLTU batubara, mempertahankan mangrove kita, pegunungan kendeng nir tambang, again pansus RTRW dan soal abrasi akresi laut kita. Trabas politik yang sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi tantangan masa depan yang semakin terancam akibat pemanasan global. Masa depan umat manusia di bumi manusia yang telah semakin tua.

Tentu saja, pilihan ‘jalan’ yang saya tempuh tidaklah mudah. Penuh dengan resiko kegagalan. Saat prosesnya, kadang butuh kehati-hatian agar tetap ‘*on going progress*’ menjadi keputusan bersama. Membangun argumentasi dan rasionalitas adalah kunci penting dalam dinamika prosesnya. Saat yang sama, saya juga menyodorkan opsi-opsi alternatif atas berbagai terobosan keputusan yang akan diambil. Jalan keluar agar semua menjadi nyaman.

Menjaga semangat perjuangan juga tidak kalah penting. Saya adalah anak kampung yang bukan siapa siapa. Anak dari seorang petani di sebuah desa di Bojonegoro Jawa Timur. Tidak punya beban yang mengganggu. Justru beban itu terasa berat jika tidak mampu berbuat apa-apa. Hanya makan gaji buta. Inilah

yang mensuplai semangat saya untuk terus berjuang menerobos tantangan yang ada. Semangat untuk terus menapaki “**jalan trabas**” demi memberi manfaat sebagai seorang politisi. Semangat menghadirkan ‘makna’ dalam bingkai politik lokal Jawa Tengah.

Tidak mudah, namun indah untuk dikenang.]



indahnya rembulan
yang tersangkut
akar nan menjulang
menggapai cahaya
tinggi berderai
keindahan

0.11.2019 @kangdoelaziz.instagram

Pengantar Editor

JEJAK KRITIS LEGISLATOR AGAMIS

Imam Marzuki

Merekam jejak-jejak perjuangan H Abdul Aziz SAg MSI sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah selama tiga periode (2009-2024), membuat kita menemukan sosok idaman seorang wakil rakyat. Dari kevokalan selama berkiprah di Gedung Berlian, pikiran-pikiran brillan dalam menyelesaikan persoalan dan keberpihakannya pada kepentingan rakyat, menunjukkan bahwa Kang Aziz –begitu politisi Partai Persatuan Pembangunan itu biasa disapa– memiliki tiga kriteria legislator impian.

Pertama, bersikap kritis dan solutif. Sifat kritis sangat melekat pada figur Kang Aziz. Alumnus Magister Sosiologi Politik Universitas Airlangga itu selalu mengkritisi setiap ketidakberesan dan ketidakadilan yang terjadi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun di internal DPRD. Terbongkarnya dana siluman dan *kongkalikong* dalam pembahasan APBD adalah buah dari sikap kritisnya. Namun dia tidak hanya kritis tapi juga solutif. Setiap ada persoalan yang dia kritisi, pasti Kang Aziz menawarkan solusi. Dalam kasus permainan anggaran misalnya, dia mengidentifikasi masalahnya yaitu carut-marutnya sistem penganggaran. Sebagai solusi, dia menginisiasi penyusunan peraturan tentang sistem perencanaan anggaran terpadu hingga terbitlah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu.

Kedua, memiliki integritas yang kuat. Kang Aziz dikenal sosok yang agamis, punya prinsip dan kuat keyakinan. Latar belakang pendidikan pesantren dan sekolah agama, lingkungan sosial yang religius serta misi keislaman yang diemban partainya, membuat integritas suami Raudhatul Jannah Thomafy itu terjaga. Tak heran bila dia memperjuangkan mati-matian anggaran insentif untuk para guru madrasah, taman pendidikan Al-Qur'an dan pondok pesantren, yakni sebuah entitas yang sejak kecil menggembung karakter pribadinya.

Ketiga, aspiratif dengan kepentingan rakyat. Kang Aziz sangat sensitif dengan persoalan yang mengemuka di masyarakat dan aspirasi rakyat yang sampai kepadanya. Sebagai contohnya, ketika para guru SMA-SMK swasta mengeluhkan rendahnya gaji mereka dan ketiadaan bantuan dari pemerintah untuk siswa di sekolahnya, dia langsung bergerak cepat. Wakil ketua Komisi E DPRD Jateng itu memperjuangkan habis-habisan aspirasi tersebut hingga akhirnya Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) untuk siswa beserta insentif untuk guru SMA swasta, SMK swasta dan SLB swasta bisa dianggarkan secara rutin dalam APBD Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2019 hingga saat ini.

Dengan tiga karakter Kang Aziz itulah maka sangat wajar jika rakyat di daerah pemilihannya yakni Kabupaten Blora, Grobogan, Pati dan Rembang selalu memilih dia untuk menjadi wakil mereka di DPRD Jawa Tengah hingga tiga periode sejak Pemilihan Umum 2009. Bisa jadi

selama ini Kang Aziz menjadi profil wakil rakyat idaman mereka.

Buku yang ada di tangan pembaca ini merupakan catatan-catatan kritis yang luar biasa dari Kang Aziz sebagai penulis, atas isu-isu dan persoalan-persoalan krusial yang dia temui selama menjadi anggota Dewan di Gedung Berlian. Buku ini semacam bungai rampai tulisan sang penulis yang mewakili pikiran dan karakter penulis yang kritis-solutif, agamis dan aspiratif. Selamat membaca... []

JEJAK POLITISI LOKAL YANG LUGAS

M. Romahurmuziy

(Ketua DPP PPP th 2017-2019)

Berani melawan arus, itulah sosok yang satu ini. Ia gigih dalam berjuang. Ia selalu bersikeras saat memperjuangkan apa yang ia yakini benar. Semangatnya tak pernah padam meski tantangannya kadang berat dan penuh dilema. Ia terus bersuara lantang melawan ketidakadilan peraturan, memperjuangkan hak-hak mereka yang terlupakan dan mewujudkan keseimbangan lingkungan. Tak berlebihan jika saya menyebutnya sebagai sosok politisi yang lugas.

Ya, politisi lugas dalam kancang politik lokal Jawa Tengah. Politisi ini memang telah meninggalkan jejak-jejak perjuangan. Merekam jejak perjuangannya, sungguh sangat menarik dan bermanfaat. Jejak itu penting untuk kita lihat sebagai bahan pelajaran dan literasi. Jejak itu layak untuk kita hadirkan sebagai mozaik yang memperkaya khazanah politik lokal. Agar kita tidak hanya silau dengan peristiwa politik tingkat nasional.

Politisi bernama lengkap Abdul Aziz ini telah mengabdi di gedung berlian (sebutan untuk gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah yang berbentuk seperti berlian) selama 3 periode penuh (2009-2024). Di akun facebooknya, ia mengeja namanya dengan @abdolaziz. Sementara di akun instagram ia menulis profilnya dengan nama @kangdoelaziz. Pembaca dapat menelusuri seluruh jejak perjalanannya berkancang dalam dinamika politik lokal Jawa Tengah di kedua akun medsos

tersebut. politisi ini tergolong lumayan aktif memposting langkah-langkah politiknya lewat akun medsosnya.

Keberpihakannya pada problem ketidakadilan pendidikan telah memunculkan terobosan kebijakan BOSDA Jateng dalam dokumen RPJMD Jawa Tengah tahun 2018-2023. Kebijakan ini menghadirkan kesetaraan perlakuan kepada sekolah swasta (SMA/SMK/SLB/MA) se Jawa Tengah. Meski sayang, realisasi politiknya inkonsisten. Kebijakan politik dalam APBD tahun berjalananya berubah. Tidak lagi sesuai dengan keputusan yang termuat dalam dokumen RPJMD. Dukungannya terhadap dana insentif guru madin dan TPQ, bahkan saat anggaran itu akan dihilangkan oleh Pj Gubernur baru dalam APBD 2025, menunjukkan konsistensinya dalam berjuang. Concernnya sangat kuat di sektor pendidikan, sektor yang melatari begron sosialnya.

Improvisasinya memunculkan alternatif keputusan juga layak diapresiasi. Saat ia menolak ruas Tol Bawen-Jogja sebagai salah satu paket proyek strategis nasional (PSN), sesungguhnya ia sedang bernegosiasi untuk prioritas lain yang dianggapnya lebih strategis, yakni aktivasi jalur rel kereta api semarang-Yogyakarta via Magelang. Pada saat yang sama, ia juga menginginkan sorotan untuk percepatan aktivasi jalur rel Semarang-Rembang. Jalur yang terakhir ini, tentu saja kita maklumi merupakan kepentingan konstituen di dapilnya (Pati-Rembang).

Ada yang menarik dari yang saya tahu tentang sosok Abdul Aziz ini. Tiba-tiba ia keluar dari konteksnya. Dia sangat serius melakukan penelusuran latar sejarah

kota Lasem, kota tempat tinggalnya, dalam penggalan-penggalan sejarah penting di nusantara. Berdasar ‘telusur’nya, ia menemukan data dan fakta sejarah menarik yang relevan untuk diaktualisasikan dalam kehidupan modern sekarang. Fakta tentang Mozaik peradaban yang memiliki benang merah penting tentang kehidupan penuh harmoni dan toleransi. Mozaik peradaban akulturatif yang terefleksi dalam khazanah pemikiran dan arsitektur bangunan yang *sufisticated*. Mozaik peradaban yang menyebabkan Lasem masuk dalam proyek penataan kawasan kota pusaka nusantara kementerian PUPR RI pada tahun 2021 (bersanding dengan kota lama Semarang, puri Mangkunegaran Solo dan kota tua Jakarta).

Sebab latar itulah Abdul Aziz gigih dalam usaha yang ia sebut sebagai ‘rekonstruksi sejarah Lasem’. Kegigihannya teruji dengan langkah awal yang ia mulai dari Masjid Lasem. Locus terkait ‘ihya al mawat’, tempat ‘wingit’ di belakang Masjid, tentu sebuah pekerjaan tidak mudah. Namun ia berhasil menatanya agar menjadi ‘maslahat’ dalam konsep penataan kawasan wisata religi dan bisnis Masjid Lasem (2008). Langkah rekonstruksi sejarah Lasem ia lanjutkan ke berbagai locus lainnya. Ada yang berhasil dan ada yang gagal. Pembangunan Museum Islam Nusantara Lasem (2019) adalah salah satu yang berhasil. Museum yang bertujuan menghadirkan kembali peran Lasem dalam fase-fase penting dakwah Islam di nusantara.

Ala kulli hal, buku ini telah memotret dengan baik perjalanan sosok politisi petiga (PPP) di tingkat lokal Jawa

Tengah. Membaca senarai tulisan ini, adalah membaca pergulatan sekaligus nalar kritis Abdul Aziz. Hal yang memang harus dimiliki setiap wakil rakyat. Dari sini, kita meyakini bahwa mental dan nalar seperti inilah yang terus harus ada di parlemen setiap tingkatan. Karena hakikatnya, wakil rakyat harus lebih galak dari rakyat yang diwakilinya, saat harus membela kepentingan dan kemaslahatan umat. []

'KangDoeI (politisi) dan MEMOAR POLITIKnya'

Masruhan Samsurie

(Ketua DPW PPP Jawa Tengah th 2018-2025)

Kang DoeIaziz, begitu saya biasa menyapanya. Melihat rekam jejaknya, sungguh sangat penting bagi yang ingin belajar berpolitik dalam bingkai dan kancah lokalitas. Maksudnya, lokalitas peran aktor legislatif di daerah (baik DPRD Kabupaten/Kota maupun Provinsi). Lewat buku ini, ia bertutur secara gamblang perilaku dan langkah-langkah politiknya. Langkah penuh dinamika dan terobosan sebagai politisi di gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Tidak berlebihan jika buku ini saya sebut sebagai sebuah 'memoar politik'. Sesuai artinya, memoar merupakan tulisan naratif nonfiksi yang didasarkan pada ingatan pribadi penulis, selama berkancah 3 periode di gedung berlian (DPRD Jawa Tengah). Berjudul 'Jalan Trabasku', dengan sub judul 'dalam bingkai politik lokal Jawa Tengah', buku ini berkisah tentang pikiran-pikiran sosok politikus konsisten yang layak dibaca.

Paparannya tentang tantangan berdemokrasi lokal yang penuh intrik, memaksanya memeras otak untuk tidak terbawa arus. Politik yang semakin terseret pada arus pragmatisme, semakin membuat sesak nafas para pelakunya. Permainan politik anggaran dalam APBD oleh para aktornya semakin semrawut dan tidak beraturan. Anomali proses politik anggaran terus-menerus berulang terjadi dalam setiap proses penetapan APBD. Saat itulah

Kang Doel Aziz terus konsisten melawannya. Setelah 5 tahun berjuang, muncullah kesempatan emas itu. Saat ia terpilih menjadi ketua Bapemperda (badan pembentukan peraturan daerah) DPRD Jawa Tengah tahun 2015, ia menginisiasi perda khusus untuk mengakhirinya. Akhirnya, keputusan tentang perda SP3T (sistem penganggaran dan perencanaan terpadu) mengakhiri rentang panjang perjalanan krusial selama ini.

Sebagai wakil rakyat dari Fraksi PPP, tidak aneh jika ia berlutut pada isu dan agregasi politik tentang keadilan sektor pendidikan. Untuk itu, ia gigih berjuang memunculkan inisiasi kebijakan BOSDA Jateng. Sebuah program insentif siswa swasta (SMA/SMK/SLB/MA) se-Jawa Tengah agar terlihat setara dengan siswa negeri yang telah memperoleh subsidi. Begitu juga terkait insentif untuk guru Madin/TPQ/Pesantren se-Jawa Tengah. Ia tak lekang berjuang agar dana itu tetap mengalir untuk mereka yang selama ini ‘terlupakan’.

Yang aneh, meski mewakili fraksi santri (FPPP DPRD Jawa Tengah), ia juga sangat gigih berjuang untuk isu lingkungan hidup. Gonjang-ganjing penolakannya atas beberapa proyek strategis nasional : seperti trase tol Bawen-Jogja, enam (6) locus baru PLTU batubara di Jawa Tengah, rencana industrialisasi skala besar pabrik semen di pegunungan kendeng, rencana konversi kawasan pesisir pantai berhutan bakau (mangrove) menjadi kawasan industri di Kendal dan Demak, adalah beberapa kasus yang meneguhkan posisinya sebagai politisi pejuang. Membaca memoar ini, akan menemukan jati dirinya sebagai sosok politisi pejuang yang ‘out of the box’

(di luar kotaknya). Ya, pejuang dengan pemikiran dan terobosan kebijakan untuk masa depan lingkungan hidup kita.

Semua kesempatan perjuangan itu tentu saja karena peluang beruntun nya memimpin berbagai panitia khusus (pansus) DPRD Jawa Tengah, antara lain pansus Perda revisi RTRW Jawa Tengah tahun 2009-2029, pansus Perda RPJMD Jawa Tengah tahun 2018-2023, pansus Perda SOTK dan ketua Bapemperda DPRD Jawa Tengah tahun 2014-2017. Dengan menjadi ketua pansus, ia memiliki otoritas dan pengambil inisiatif keputusan yang dianggap perlu. Keputusan kebijakan yang ia perjuangkan secara konsisten dan bernada keluar ‘pakem’. Keputusan kebijakan yang kadang membuat ‘sesak’ nafas para pejabat baik di provinsi maupun pusat.

Gus Aziz, begitu ia biasa disapa orang-orang saat berada di rumahnya, Lasem Rembang. Sebagai aktivis santri, ia menggagas berdirinya ‘Museum Islam Nusantara’ Lasem. Lasem pada sekitar abad 15 M, ditandai dengan hadirnya Sunan Bonang (Syeh Makdum Ibrahim) di pesantren Bonang Lasem. Dakwahnya menjadi titik awal dakwah Islam pada masa sesudahnya. Dakwah Islam yang berdamai dengan budaya lokal, melanjutkan tradisi keilmuan sunni, dan berhasil menjadi pintu masuk islamisasi nusantara. Inilah kemudian para akademisi sekarang menandai Sunan Bonang sebagai ‘masterpiece’ awal Islam Nusantara. Atas alasan itulah kemudian Abdul Aziz menggagas pembangunan Museum Islam Nusantara di kota Lasem. Museum itu sekarang telah berdiri megah di komplek Masjid Jami Baiturrohman

Lasem. Sebuah museum bergaya arsitektur ‘aneh’ diantara bangunan rumah khas Jawa dan komplek pecinan Lasem. Aneh sebab bergaya arsitektur rumah gadang minang Sumatra Barat. Pilihan ‘gaya’ ini tentu mencerminkan sosok pengagasnya, yang sering bertindak ‘out of the box’ dalam berbagai langkahnya.

Yang masih belum tuntas, belum terwujud, atau ‘*ngganjel*’ di pikirannya, adalah gagasan terkait pembangunan ‘replika Istana kerajaan Demak’. Gagasan ini ia terus gulirkan dalam berbagai forum diskusi, obrolan santai, dan bahkan forum pembahasan di komisi ataupun Banggar DPRD Jawa Tengah. Gagasan ini merupakan tindak lanjut pasca terbangunnya museum Islam nusantara Lasem. Gagasan tentang rekonstruksi sejarah Demak sebagai basis pengembangan pariwisata ‘ikonik’ dan membanggakan Jawa Tengah atas perannya dalam dakwah Islam di nusantara.

Kang doel Aziz dan memoar politiknya, telah memperkaya literasi politik lokal bagi kita. Bagi para politisi pada umumnya, ia menjadi inspirasi di tengah ‘oase’ politik Indonesia yang telah mengering. Bagi politisi PPP khususnya, memoar politik ini adalah kontribusi yang patut ditiru. []

HUJAN

yang belum turun kemarin,
telah menggulirkan
spekulasi, akankah AWAN
yg menggiring

MENDUNG itu direvisi ?

#adilnyaBOSDAjateng

yang belum final
kemarin, telah
memuntahkan
spekulasi, akankah
perda RPJMD jateng
2019-2023

itu DIREVISI ?



@abdolaziz



@azizabdoelhamed



Abdulazizhami

07.11.2019 @kangdoelaziz.instagram

— ANOMALI POLITIK ANGGARAN DAERAH —

Rapat Banggar RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2019 berjalan penuh ketegangan. Saya berada di puncak ekspresi dan terpaksa “walk out” dari ruang rapat. Rukma Setyabudi (ketua DPRD Jawa Tengah sekaligus ketua banggar) berdiri dan mengejarku. Beruntung Joko Purnomo (anggota Banggar dari fraksi PDIP) mencegahnya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Walk Out terpaksa saya lakukan sebagai bentuk protes atas anomali politik anggaran yang terus berulang dan berulang.



Suasana rapat Banggar pembahasan RAPBD tahun 2019 (foto dok Humas DPRD Jateng)

Anomali politik anggaran selalu terjadi dan terus berulang. Setiap kali pembahasan RAPBD, hal yang sama selalu terjadi. Ini produk dinamika politik lokal yang khas pasca era reformasi. Saya sudah merasakannya sejak tahun 2005 saat memimpin partai (ketua DPC PPP) di Kab. Rembang. Setelah terpilih menjadi wakil rakyat di DPRD Jateng tahun 2009, hal yang sama langsung saya hadapi.

Di periode pertama (2009-2014), saya membuktikan bahwa memang betul inkonsistensi proses politik 'budgeting' selalu terjadi. Proses-proses perencanaan, penganggaran, sistem perencanaan pembangunan, selalu berjalan secara sporadis. Terlalu banyak proses-proses yang bersifat spekulatif karena perilaku para politisinya dalam sistem politik lokal. Banyak aspek dan banyak kepentingan politik yang berkelindan. Prosesnya berjalan dengan penuh 'intrik' oleh aktor orang-orang inti di dalam gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah. Sejak itulah posisi saya selalu melawannya dengan kritik-kritik tajam.

ALIBI SINKRONISASI

Saya masih ingat saat itu, langkah membongkar praktik politik anggaran terpaksa saya lakukan setelah kritik tidak lagi 'mempan' di tahun-tahun pertama (2010, 2011, 2012). Saat pembahasan APBD tahun keempat periode pertama (tahun 2013), dalam sebuah paripurna penetapan APBD, secara terbuka saya mempertanyakan "apa itu makhluk yang bernama 'sinkronisasi'? Kenapa atas nama 'sinkronisasi' bisa menggeser anggaran

bernilai 1 triliun lebih ? Kalau angka pergeseran mencapai triliunan rupiah kan tidak sinkronisasi lagi namanya. Sinkronisasi itu yang lazim kan hanya terkait angka-angka kecil, misal 10 juta, 100 juta, 1 miliar atau maksimal Rp 10 miliar. Jadi angkanya kecil sebab alasan kebutuhan rinci biaya yang dibutuhkan untuk menopang sebuah kegiatan sehingga perlu disinkronkan”, tegasku saat melakukan interupsi.

Kritik tajam terpaksa saya sampaikan sebab jika hanya secara landai dan konstruktif, tidak cukup memperoleh perhatian. Kritik adalah hal yang biasa dalam fungsi kontrol sebagaimana diatur Undang-undang. Namun setelah 3 tahun berjalan, kesabaranku mulai surut. Proses budgeting politik lokal yang berjalan sporadis dan melibatkan pergeseran anggaran yang cukup besar memaksa pikiran ‘waras ku berusaha mengurainya dengan langkah interruptif. Saat wawancara dengan awak media pasca interupsi, saya pun mengiyakan ketika mereka memakai istilah ‘dana siluman’ untuk menyebut kasus yang terjadi.

Pangkal soal anomali politik anggaran dalam konstelasi politik lokal jika kita urai setidaknya bersumber dari dua sisi. Dari sisi eksekutif (Pemprov Jateng), draft dokumen perencanaan nya sering tidak konsisten. Apa yang menjadi prioritas program untuk mewujudkan visi-misi Gubernur tidak tercermin dalam pagu indikatif anggarannya. Target indikator kinerja program yang ingin diwujudkan juga tidak sinergis dengan dukungan anggaran per sektor programnya. Antar dokumen perencanaan pembangunan seolah berjalan sendiri

sendiri. Sinergitasnya berada dalam frekuensi rendah. Disisi lain, apa yang disajikan dan kemudian telah disepakati lewat proses politik pembahasan (baik di banggar dan komisi), seringkali tiba-tiba berubah. Dokumen kesepakatan KUA/PPAS (kebijakan umum anggaran/prioritas plafon anggaran sementara) tiba-tiba berbeda dengan dokumen draft yang disodorkan di RAPBD nya. Dalam konteks yang terakhir ini, ketelitian ekstra memang dibutuhkan oleh sang legislator. Permainan sering muncul dari oknum-oknum eksekutif yang memiliki kepentingan politik tertentu yang berkelindan dengan para oknum politisi di gedung berlian.

Sementara dari sisi legislatif, perilaku intrik para anggotanya menambah keruwetan tersendiri. Pragmatisme politik yang ditandai dengan maraknya politik uang dalam setiap proses pemilu membawa ekses yang memperparah keadaan. Para aktor politik lokal di DPRD yang terbebani biaya politik tinggi selalu berfikir balik modal setelah mengeluarkan ‘ongkos’ pemilu yang cukup besar. Logika dagang mereka bertumbuh subur. Para pimpinan partai nya juga memiliki kepentingan yang sama. Rata-rata mereka terpilih juga karena mengeluarkan ‘uang’. Setelah posisi itu diraih, mereka juga sama-sama berpikir mempertahankan jabatannya di periode berikutnya. Akhirnya, di tempuhlah jalan pintas dalam proses budgeting politik.

Apa yang telah diputuskan dalam rapat (komisi/banggar) bisa berubah dengan mudah. Bahkan setelah paripurna penetapan APBD sekalipun, pergeseran dan perubahan angka dan judul kegiatan

masih terjadi dengan sangat mudah. Semua dengan dalil dan atas nama ‘sinkronisasi’. Alibi tentang sinkronisasi yang melibatkan angka cukup besar inilah yang merisaukan pikiran. Jadi ‘makhluk’ yang bernama ‘sinkronisasi’ di periode pertama ini (2009-2014) menjadi sesuatu yang istimewa di pikiran saya. Makhluk itu masih saya kenang hingga sekarang.

PERDA ANTI ANOMALI

Memasuki periode kedua, yakni periode tahun 2014-2019, masuklah saya pada sebuah kesempatan yang sangat taktis dan strategis. Atas perintah partai, saya ditunjuk menjadi ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jawa Tengah. Saat pertama rapat Bapemperda, saya langsung menyampaikan usul agar lembaga ini memiliki inisiasi Peraturan Daerah (Perda). Selama ini, konon lembaga ini belum pernah menggunakan haknya mengajukan inisiatif Perda. Padahal Di Tata Tertib DPRD diatur, setiap alat kelengkapan DPRD, baik komisi atau badan, mempunyai hak inisiatif rancangan perda. Nah, dalam rapat itulah saya sampaikan penegasan tentang pentingnya sebuah Perda yang bertujuan mengakhiri semua bentuk anomali politik budgeting selama ini.

Akhirnya, rapat menyetujui inisiasi Raperda ini masuk dalam program pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) DPRD Jawa Tengah tahun 2016. Judul raperdanya berbunyi Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (SP3T). Ada tiga poin yang kami anggap penting harus masuk di perda ini. *Pertama,*

ruang lingkupnya yang mencakup seluruh proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang 25 tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang 5 tahunan, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Kedua, timeline proses politik budgeting yang harus semakin diatur sistematis. Kami memunculkan **terobosan** penting, yakni semua proses perencanaan kegiatan, khususnya yang bersumber dari pokok-pokok pikiran DPRD atau istilah ‘beken’nya dana aspirasi, harus selesai pada saat kesepakatan RKPD. Selama ini, pokok-pokok pikiran DPRD yang bersumber dari serap aspirasi lewat reses selalu menjadi isu krusal proses budgeting politik lokal. Pada sepanjang periode pertama, input data aspirasi masuk pada saat proses pembahasan RAPBD (bahkan setelah paripurna). Akhir-akhir ini, timeline input bergeser sampai pada batas akhir kesepakatan KUA/PPAS. Nah dengan Perda baru ini, input seluruh pokok-pokok pikiran DPRD harus tuntas sebelum penandatanganan RKPD.

Memang saat pembahasan terkait poin ini, terjadi perdebatan yang cukup keras. Eksekutif mengklaim wilayah perencanaan RKPD hanya milik mereka, sesuai amanat PP. No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. DPRD tidak memiliki kewenangan ikut cawecawe. DPRD terlibat hanya saat pembahasan KUA/PPAS.

Namun saya terus berusaha meyakinkan, bahwa perencanaan RKPD harus dilakukan bersama. Eksekutif dan legislatif harus duduk bersama menuntaskannya.

Kenapa ? Argumennya karena itulah yang sesungguhnya dikehendaki dalam konsep Pemerintah Daerah di UU Nomor 23/2014. Pemerintah daerah terdiri dari satu kesatuan antara eksekutif dan legislatif. Karena itu, maka proses perencanaan RKPD legislatif harus terlibat. Harus ada forum bersama antara Komisi-komisi DPRD dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau dinas-dinas untuk membahas RKPD. Waktu itu, eksekutif memang punya konsep dialog interaktif. Padahal semestinya forum bersama yang kita lakukan atas inisiatif bersama antara eksekutif dan DPRD untuk memutuskan final RKPD. Jadi pada poin ini, kita membuat sistem perencanaan tuntas di RKPD dimana DPRD terlibat. Kemudian waktu pembahasan KUA-PPAS adalah forum untuk memberi anggaranya, melakukan finalisasi pagu anggaran terhadap semua kegiatan atau program-program yang sudah dirancang bersama. Kemudian pembahasan APBD untuk melakukan finalisasi keputusan atas seluruh rencana pendapatan dan belanja daerah.

Saat raperda ini kami konsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri, pihak Direktur Jenderal Otonomi Daerah memberikan apresiasi positif. Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik saat itu mengatakan bahwa Raperda ini merupakan “terobosan” pertama yang ada di Indonesia, dan bisa menjadi percontohan untuk provinsi dan kabupaten/kota yang lain. Raperda ini bisa menjadi konsep perencanaan yang berlaku secara nasional,

dimana kita menggarisbawahi kebersamaan Gubernur dan DPRD di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemda. Raperda ini juga mengkonkretkan lagi konsep yang diatur dalam UU 13/2019 tentang perubahan ketiga atas UU no. 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa DPRD punya hak untuk pokok pokok pikiran.



Konsultasi akhir Bapemperda DPRD Jateng ke Kementerian Dalam Negeri (foto Humas Dprd Jateng)

Poin ketiga adalah terkait pentingnya sistem informasi yang mencakup seluruh proses perencanaan pembangunan dan penganggaran. Semua proses politik mulai dari awal pembahasan sampai final keputusannya harus masuk ke dalam sistem informasi yang terjamin dan ‘aksesable’. Misalnya saat pembahasan RPJMD, mulai draf awal yang disodorkan seperti apa bentuknya dan detailnya, kemudian setelah dituntaskan pembahasannya

menjadi Perda RPJMD, harus tersaji dalam sistem informasi dari awal sampai akhir keputusan. Begitu pula RKPD, KUA/PPAS dan RAPBD. Draf awal yang disodorkan itu seperti apa, setelah proses di DPRD, final keputusannya seperti apa. Jadi masyarakat punya kesempatan mengakses mulai proses awal hingga akhir keputusannya.

Alhamdulillah, akhirnya perda ini diketuk palu menjadi keputusan dan ditetapkan sebagai peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (SP3T). Secara keseluruhan raperda ini bertujuan untuk menuntaskan carut-marut perencanaan yang selama ini terjadi. Kata sakti ‘sinkronisasi’ yang berimbang pergeseran angka anggaran dalam jumlah besar harus diakhiri. Praktek pembahasan APBD yang di dalamnya langsung memuat keputusan-keputusan perencanaan sekaligus penganggaran saatnya dikoreksi. Forum KUA-PPAS yang sebelumnya menjadi sarana input judul-judul kegiatan dalam jumlah yang besar juga harus dihentikan. Di Perda yang baru ini, perencanaan harus dituntaskan sebelum RKPD. KUA/PPAS adalah proses pembahasan untuk menentukan pagu indikatif anggarannya. Sementara pembahasan RAPBD merupakan finalisasi seluruh keputusan budgeting politik, untuk mewujudkan pembangunan daerah yang diinginkan bersama.



Ketua Bapemperda menyampaikan laporan penetapan Perda SP3T Nomor 6/2017 di rapat paripurna (foto Humas DPRD Jateng)

Tahun 2018, Perda tersebut mulai diimplementasikan meskipun terseok-seok. Saya ingat perjalanan implementasinya butuh perjuangan yang tak kalah keras. Salah satu dinamika itu menyeruak dalam rapat banggar RAPBD tahun 2019. Saya yang tak lagi sabar dengan praktek anomali politik anggaran yang berusaha terus dilanjutkan, memprotesnya dengan keras. Akhirnya, walk out pun jadi pilihan terakhir yang saya ambil.

Hikmahnya setelah peristiwa itu, perjalanan proses budgeting politik lalu berjalan sebagaimana ketentuan perda SP3T. Setelah Perda ini berhasil diimplementasikan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperoleh penghargaan sebagai Provinsi dengan Perencanaan Anggaran Terbaik secara Nasional berturut-

turut sampai tiga kali. Jawa Tengah cetak hattrick penghargaan tersebut dari pemerintah pusat (<https://news.detik.com/berita/d-6772209/jateng-cetak-hattrick-penghargaan-pembangunan-terbaik-dari-bappenas>). Penghargaan terakhir diterima tahun 2023. Benar-benar membuat kami ‘lega’ dan ikut bangga.

Alhamdulillah...

2

— MENEROBOS BOSDA JATENG —

Momentum datang tak diundang dan tak terduga. Ia mengalir bagai air yang datang begitu saja. Ia hadir untuk menuntaskan berbagai jenis ‘agregasi’ politik yang selama ini telah ada. Saat pansus (panitia khusus) perda RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) tahun 2018-2023 dibentuk, alhamdulillah saya terpilih jadi ketua. Inilah kesempatan emas yang tidak boleh saya buat alpa. Sebuah momentum untuk memperjuangkan hak keadilan untuk sekolah swasta.

Itulah tekad saya sejak awal. Perjuangan saya awali dengan melihat strategi besar perencanaan pembangunan daerah yang terangkum dalam visi-misi Gubernur/wakil Gubernur terpilih Jawa Tengah periode 2018-2023. Dari penjabaran visi misi itu, duet Ganjar-Yasin telah menetapkan sektor pendidikan sebagai prioritas program dalam lima (5) tahun kedepan. Pansus pun sependapat dengan pilihan strategis ini. Pendidikan adalah investasi terpenting yang perlu dipilih untuk menjamin masa depan yang lebih baik. Untuk mewujudkannya, tidak bisa tidak, diperlukan alokasi anggaran yang besar dan berkeadilan di sektor pendidikan.

Alokasi dana besar sudah muncul dalam mandat 20% dana pendidikan berdasarkan UU 20/2023 tentang

Sisdiknas (sistem pendidikan nasional). Pasal 49 ayat 1 undang-undang itu berbunyi, “dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD”. Namun problemnya, alokasi besar 20% itu salah menghitungnya. Problem ketidakadilan pendidikan masih mencuat tajam antar berbagai sektor pendidikan yang ada. Tuntutan untuk lebih “berkeadilan” adalah aspirasi yang terus muncul dan faktual. Salah satu isu nya adalah bahwa pendidikan harus berkeadilan untuk semua siswa tanpa kecuali, baik di sekolah negeri maupun swasta.

MENGGUGAT KETIDAKADILAN

Saat memimpin rapat Pansus, mata saya langsung tertuju pada Dinas Pendidikan Jawa Tengah. Berbagai pikiran saya lontarkan sebagai gugatan atas ketidakadilan yang selama ini terjadi. “Bagaimana mungkin Dinas Pendidikan bisa menganaktirikan siswa-siswi SMA/SMK/SLB swasta hingga tanpa serupiah pun dana mengalir untuk mereka? Bukankah mereka juga punya hak sama dengan siswa sekolah negeri? Bukankah mereka juga memiliki tanggungjawab yang sama untuk menyongsong masa depan ? Jika siswa negeri memperoleh BOP (bantuan Operasional Pendidikan) Rp 1 juta/siswa/tahun, maka siswa sekolah swasta layak memperoleh bantuan yang sama. Siswa swasta berhak memperoleh BOSDA (bantuan operasional sekolah daerah).



Rapat Pansus RPJMD dengan Rumpun Kesra (ex officio Dinas pendidikan) dihadiri Sekda Jateng Sri Puryono, SH., (Foto dok Abdul Aziz)

Atas gugatan-gugatan tersebut, Sri Puryono Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah menjawabnya normatif sesuai ketentuan peraturan yang ada. Sesuai undang-undang (UU 23/2014 pasal 12), urusan wajib pendidikan menengah (DIKMEN) hanya untuk sekolah negeri. Sementara Pj. Diknas Jateng Sulistyo mengatakan, “Sekolah swasta itu milik yayasan, dimana operasional pendidikan menjadi tanggung jawab mandiri yayasan. Mereka yang berinisiatif mendirikan sekolah, maka mereka yang bertanggung jawab mengelola sekolahnya. Pemerintah Provinsi posisinya hanya membantu, jika kondisi keuangan pemerintah daerah mampu memberikannya”.

Atas argumen itu, saya tak kalah membantahnya. “Tidak benar penjelasan wajib untuk negeri sementara

swasta tidak atau sunnah (untuk menggambarkan posisinya yang tergantung ketersediaan anggaran). Apalagi, jika kita jujur terkait posisi fiskal dalam APBD Jawa Tengah yang berkisar 24 triliun. Sebenarnya kita mampu memberikan alokasi yang sama antara siswa negeri dan swasta. BOP dan BOSDA dapat sekaligus dianggarkan untuk sekolah menengah negeri dan swasta se Jawa Tengah. Intinya tinggal soal kemauan politik (political will) dan kebijakan politik anggaran daerah”.

Lebih lanjut saya mengurai argumentasi atas tiga alasan. *Pertama*, kebijakan anggaran BOS dari APBN untuk tingkat SD, SMP dan SMA, tidak membedakan antara sekolah negeri dan swasta, lalu mengapa politik anggaran di pemerintah provinsi tidak menerapkan kebijakan yang sama. Kalau siswa SMA/SMK negeri diberi Rp 1 juta per tahun, maka idealnya siswa SMA/SMK swasta juga dikasih Rp 1 juta. *Kedua*, terdapat 3 target indikator kinerja utama yang dipasang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, yang juga tidak membedakan antara sekolah negeri dan swasta. Tiga indikator kinerja itu meliputi (1) indikator partisipasi kasar dan murni lulusan, (2) indikator kinerja kompetensi lulusan, dan (3) indikator sarana prasarana pembelajaran sesuai standar. Ketiga indikator ini sama diberlakukan untuk semua siswa SMA/SMK/SLB se-Jawa Tengah, baik negeri maupun swasta. Tapi kenapa ketika memberi dana operasional siswa kok dibedakan, hanya untuk siswa negeri siswa swasta tidak? *Ketiga*, siswa atau orangtua siswa sekolah negeri dan swasta kalau membayar pajak kendaraan bermotor itu besarannya sama, tidak dibeda-bedakan.

Misalnya kalau siswa negeri wajib bayar, kalau siswa swasta gratis atau bayar seboro. Kenyataannya tidak begitu kan....", ketusku dalam rapat tersebut.

Ketua Fraksi PPP DPRD Jateng Masruhan Syamsurie menegaskan dukungannya atas apa yang saya perjuangkan. Urusan pendidikan seharusnya tidak ada diskriminasi antara negeri dan swasta karena semuanya berjuang untuk meningkatkan kualitas SDM warga Jateng. Menurutnya, perlu kebijakan yang memihak, apalagi ini berkaitan dengan peningkatan SDM dan masa depan generasi muda. "Saya mendukung penuh anggota Fraksi PPP Kang Abdul Aziz untuk memperjuangkan hak sekolah swasta ini. Harus ada keberpihakan, terutama untuk sekolah swasta yang selama ini justru hidup dari gotong royong masyarakat sendiri," tandas Masruhan.

PERJUANGAN BERHASIL

Setelah proses panjang perdebatan dalam berbagai sesi rapat, alhamdulillah berkat rahmat Allah SWT, kerja kerasku di Pansus RPJMD membuat hasil. Sebagaimana dikutip berbagai media massa, paripurna penetapan perda RPJMD 2018-2023 menandai lahirnya kebijakan baru yang bernama BOSDA Jateng. Sebuah kebijakan yang menjadi penanda penting jalan menuju keadilan sektor pendidikan di Jateng. Kebijakan ini memuat jaminan bahwa setiap siswa sekolah menengah (SMA/SMK/SLB) swasta se Jateng akan mendapatkan subsidi dana dari APBD sejumlah sama dengan siswa sekolah menengah negeri yang realisasi

dilakukan bertahap selama lima tahun. Siswa SMA/SMK/SLB negeri tetap menerima BOP senilai Rp 1 juta/siswa/tahun. Sedang siswa SMA/SMK/SLB swasta akan memperoleh anggaran BOSDA sebesar Rp 500 ribu/siswa/tahun pada tahun kedua RPJMD, yakni 2020. Kemudian tahun ketiga (2021) naik menjadi Rp 750 ribu/siswa/tahun. Tahun keempat dan kelima (2022-2023), mereka akan mendapatkan bantuan yang sama dengan siswa negeri yaitu Rp 1 juta/siswa/tahun.



*Ketua Pansus RPJMD DPRD Jateng H. Abdul Aziz S.Ag saat menyampaikan laporan di paripurna, Senin (18/2).
(Jateng Pos)*

Sebagai tambahan, selain mengalokasikan dana BOSDA untuk SMA/SMK/SLB swasta, perda RPJMD juga memutuskan alokasi BOSDA untuk siswa Madrasah Aliyah negeri dan swasta di Jawa Tengah. Awalnya,

Pemerintah Provinsi menolak dengan alasan MA itu milik instansi vertikal, dalam hal ini Kementerian Agama, sehingga Pemerintah Provinsi tidak punya kewenangan untuk intervensi. Namun dengan argumentasi yang saya bangun, akhirnya disepakati alokasi BOSDA permanen sebesar Rp 500 ribu/siswa/tahun untuk sekitar 27.000 siswa MA (negeri dan swasta) se Jawa Tengah.

REALISASI INKONSISTEN

Lalu bagaimana realisasi kebijakan RPJMD dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun berjalan? Sayangnya, Dinas Pendidikan kembali berulah dan alokasi anggaran pun berubah. Dalam RKPD tahun 2020, siswa negeri yang di RPJMD ditetapkan memperoleh BOP Rp 1 juta/siswa/tahun, tiba-tiba melonjak menjadi Rp 1,5 juta. Lonjakan ini disebabkan Pemerintah Provinsi mengeluarkan kebijakan sekolah gratis bagi siswa SMAN/SMKN/SLBN se-Jawa Tengah. Padahal kebijakan ini sebelumnya tidak ada di RPJMD. Program sekolah gratis ini menaikkan BOP dari Rp 1 juta menjadi Rp 1,5 juta. Lalu kekurangannya ditopang lewat pintu lain dengan kebijakan tambahan insentif untuk GTT-PTT (guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap) sekolah negeri sebesar Rp 500 miliar. Jika dihitung kumulatif, maka akan ketemu angka untuk siswa SMA/SMK/SLB negeri sebesar Rp 2,5 juta/siswa/th. Dengan skema baru ini, maka total alokasi yang digelontorkan ke sekolah negeri mencapai lebih dari Rp 1,3 triliun.

Sementara itu di sisi lain, alokasi BOSDA juga mengalami perubahan total. Draf RKPD tahun 2020

memilah peruntukan BOSDA berdasarkan status akreditasinya. SMA/SMK/SLB swasta berakreditasi A tidak memperoleh dana BOSDA, berakreditasi B mendapat Rp 250 ribu/siswa/tahun, dan akreditasi C memperoleh Rp 500 ribu/siswa/tahun. Otomatis jumlah dana BOSDA untuk SMA/SMK/SLB swasta menjadi jauh berkurang dibanding alokasi yang telah diputuskan di dokumen RPJMD. Menurut hitungan awal RPJMD, BOSDA mestinya berjumlah sekitar Rp 399 miliar. Tetapi dengan skema baru ini, jumlahnya berkurang hanya menjadi sekitar Rp 140 an miliar.

Dalam penjelasannya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah Jumeri mengungkapkan, pemprov telah mengalokasikan dana bantuan bagi siswa sekolah swasta setingkat SMA. Besarannya, mencapai Rp 123,85 miliar yang disalurkan melalui mekanisme BOSDA. Selain BOSDA, sekolah swasta juga mendapat bantuan terkait sarana prasarana melalui hibah. "Untuk jenjang sekolah itu, diberikan hanya bagi sekolah yang berakreditasi B dan C. Sementara sekolah yang akreditasinya A tidak, karena sekolahnya besar dan muridnya banyak. Sudah mantap mereka. Kalau yang akreditasi B dan C perlu support agar bisa naik derajat," ucapnya (Suara Merdeka, 15/1/2020). Ia menyebut, besaran bantuan BOSDA diperuntukkan murid sekolah swasta mulai Rp 250 ribu per siswa bagi sekolah terakreditasi B. Sementara, untuk murid sekolah berakreditasi C mencapai Rp 500 ribu per siswa. Selain bantuan untuk jenjang SMA swasta, Pemprov Jateng juga memberikan bantuan untuk Madrasah Aliyah negeri dan

swasta, dengan alokasi anggaran BOSDA sebesar Rp 26,5 miliar. Bantuan tersebut, ungkap Jumeri, guna memupus angka putus sekolah di Jawa Tengah. Selain itu, penggratisan SPP juga bertujuan meningkatkan partisipasi siswa ikut kegiatan belajar. "Angka putus sekolah di Jateng di bawah dua persen. Itu termasuk tinggi, harusnya setengah persen. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi, sekarang 78 persen, harapannya bisa meningkat jadi 80 persen," tuturnya.

Sebagai penggagas lahirnya BOSDA Jateng, saya pun melayangkan protes keras. Perdebatan sengit kembali muncul dalam rapat-rapat pembahasan R-APBD tahun 2020, baik saat di Banggar maupun Komisi. Perlu saya sebut di sini, dulu kepindahan saya dari Komisi D (bidang infrastruktur) ke Komisi E (bidang pendidikan), pun karena ingin mengawal keputusan BOSDA ini. Saya sadar saat itu, terkait potensi dinamika politik yang akan muncul pasca keputusan RPJMD 2018-2023.

BERJUANG TANPA HENTI

Sebagai ketua FPPP DPRD Jawa Tengah, respon saya aktualisasikan dengan menggelar FGD (focuss group discussion) mengundang seluruh perwakilan sekolah swasta dibawah naungan Kemenag se Jawa Tengah di Hotel Kesambi Hijau Semarang.



Anggota FPP DPRD Jawa Tengah (Jateng) Abdul Aziz (dua dari kiri) pada "Sarasehan Menuju Bosda Jateng yang Berkeadilan" di Hotel Kesambi Hijau Semarang, Sabtu (19/10). (GATRA/Insetyonoto/ft)

Stakeholder sekolah swasta dibawah naungan Diknas yang sejak awal terus memantau soal ini juga terlibat aktif memberikan dukungannya. Mereka mengundang kami dalam acara ‘curhat’ Guru SMA/SMK Swasta se-Jawa Tengah.

Puncaknya, para kepala sekolah dan guru MA/SMA/SMK swasta yang tergabung dalam Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) Jawa Tengah menggelar silaturahmi akbar di depan Gedung Gubernuran. Mereka ingin bertemu Gubernur, tetapi hanya diterima oleh Asisten I Sekdaprov Jawa Tengah. Sayapun terlibat dalam pertemuan audiensi itu. Dalam tuntutannya, ketua FKSS Jawa Tengah Roni Widodo menyampaikan, “kembalikan kebijakan BOP dan BOSDA sesuai RPJMD. Selain soal BOSDA, mereka juga menyampaikan poin tuntutan tentang pentingnya kesejahteraan guru swasta juga diperhatikan. Jika insentif untuk GTT/PTT sekolah

negeri mencapai 500 miliar, bagaimana dengan nasib guru-guru kami”, kata Roni (17/2/2020).



Abdul Aziz beri paparan kronologi keputusan BOSDA Jateng dalam forum curhat guru swasta se Jateng (foto; dok Abdul Aziz)

Apakah ada dampaknya? Alhamdulillah dengan berbagai gerakan di atas akhirnya memunculkan dampak. Dalam draf RKPD APBD tahun 2021 sudah muncul rancangan perubahan kebijakan terkait BOSDA. Sekolah akreditasi A yang awalnya nol rupiah akhirnya mendapatkan Rp 150 ribu/siswa/tahun. Sementara untuk sekolah akreditasi B dan C kebijakannya tidak berubah, yakni tetap 250 ribu/siswa/tahun untuk akreditasi B dan 500 ribu/siswa/tahun untuk akreditasi C.

Akan tetapi justru terkait BOP muncul perubahan lagi. BOP Dalam APBD tahun 2020 dapat Rp 1,5

juta/siswa/tahun, tahun 2021 muncul menjadi Rp 2,5 juta/siswa/tahun. Nampaknya, ini siasat untuk menghilangkan nomenklatur insentif GTT/PTT, yang lalu digabung dalam nomenklatur BOP. Karena Indeks kebutuhan per siswa SMA vis a vis SMK berbeda, maka besaran bantuan juga berbeda, yakni Rp 2,6 juta/siswa/tahun untuk siswa SMK dan Rp 2,4 juta/siswa/tahun untuk siswa SMA. Sementara untuk Madrasah Aliyah, tidak berubah dan tetap mendapat Rp 150 ribu/siswa/tahun.



AKSI DAMAI: Sebanyak 1.425 Kepala SMA Swasta dari 25 kabupaten/ kota di Jawa Tengah melakukan aksi damai dari Taman Indonesia Kaya Kota Semarang menuju depan Kantor Gubernur Jawa Tengah di Jalan Pahlawan, Senin (17/8). (foto SM/ M Alfi Makhsun).

Yang menarik, saat pandemi Covid-19 menerjang seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa ini, kebijakan terkait Bosda tidak berubah. Saat itu, banyak anggaran dinas mengalami koreksi dan ‘refocusing’ untuk kepentingan darurat covid-19. Pendapatan asli daerah dalam APBD Jawa Tengah tahun 2020 saja berkurang sebesar Rp 1,9 triliun. Tapi kebijakan Pemprov Jateng untuk BOSDA tetap bertahan, tidak ada koreksi, tidak ada evaluasi. Tentu saja, kita patut syukuri ini dengan ucapan, alhamdulillahi rabbil ‘aalamiin”..{}

— MENOLAK TOL DEMI REL —

DPRD Jawa Tengah Tolak Pembangunan Tol Bawen-Jogja (CNN, 16/10/2023), Dewan Tolak Tol Bawen-Jogja, Ini Respon Ganjar (Kompas, 16/10/2018). DPRD Jateng Tolak Tol Bawen Jogja, Ganjar Minta Riset Ulang (Jawa Pos, 16/10/2018), DPRD Jateng Tolak Proyek Strategis Tol Bawen-Yogyakarta (Medcom.id, 19/10/2023), DPRD Jateng Tolak Proyek yang digagas Jokowi (Viva.co, 16/10/2023), Pansus DPRD Jateng Tolak Tol Bawen-Jogja; Ini Kata Jokowi (Suara.com, 20/10/2023). Tolak Tol Bawen-Jogja, DPRD Jateng Sarankan Aktivasi Jalur KA (SindoNews, 23/10/2023). Inilah sederet judul berita yang muncul di berbagai media nasional sehari setelah paripurna penetapan penetapan Perda no. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.



Ketua Pansus Revisi RTRW Jateng Abdul Aziz menjelaskan kepada wartawan perihal keputusan Pansus menolak proyek tol Bawen-Yogyakarta. (Foto: Humas DPRD Jateng)

LIMA ALASAN

Sebagai ketua pansus, saya menyampaikan bahwa penolakan kami terhadap ruas TOL Bawen-Jogja sebenarnya hanyalah salah satu dari lima (5) isu strategis yang dituntaskan pansus revisi RTRW. Saat pembahasan, hilangnya ruas TOL Bawen-Jogja dianggap lebih seksi untuk disorot media. Padahal sesungguhnya, yang kami lakukan adalah menunda ‘*timeline*’ jadwal pembangunan Tol Bawen-Jogja demi prioritas jalur Rel yang kami anggap lebih strategis.

Seperti dikutip di berbagai berita media, terdapat lima (5) alasan yang mendasari penolakan kami atas rencana PSN Tol Bawen-Jogja. *Pertama*, terdapatnya alternatif pengembangan jalur transportasi lain yang kami nilai lebih prioritas dan strategis untuk dibangun, yakni rel kereta api Bawen-Yogyakarta. Reaktivasi jalur rel kereta api disamping bernilai investasi lebih efisien, juga berdimensi strategis sebagai prioritas pengembangan sistem transportasi massal/publik.

Kedua, Pembangunan Ruas tol Bawen-Yogyakarta sepanjang 75 KM berpotensi menggerus lahan lestari LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) dalam jumlah yang besar. Berdasarkan data, luas lahan sawah lestari yang akan tergerus sekitar 340 Ha. Ini akan menjadi tantangan problematis bagi target swasembada beras Jawa tengah. *Ketiga*, munculnya kebutuhan bahan baku tambang yang besar. Ada jutaan kubik material tambang yang akan tereksploitasi untuk mewujudkan pembangunan jalan bebas hambatan TOL. Eksplorasi bahan tambang yang besar akan berdampak pada

kerusakan lingkungan yang masif dan mengancam ekologi. *Keempat*, terdapatnya potensi geologis kegempaan dan kebencanaan lahar gunung berapi di jalur tersebut. Dan kelima, telah eksisting (on progress) terbangun ruas tol pararel Semarang-Solo-Jogja dengan jarak tempuh yang tidak terlalu berbeda.



Konsultasi ke Kemenko RI terkait aktivasi Rel Bawen-Yogyakarta,
21/5/2018 (dok. kemenko RI)

Atas semua alasan itu, Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah merespons nya dengan sikap hati-hati. Ganjar menyampaikan menghormati keputusan yang telah diambil oleh pansus. Namun ia akan terlebih dulu berkonsultasi dengan pemerintah pusat. Kalau DPRD sudah memutuskan seperti itu secepatnya kami konsultasi dengan pusat untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi. Ganjar tidak keberatan jika dewan memutuskan menolak tol bawen-jogja yang masuk proyek

strategis nasional (PSN). Namun, penolakan harusnya disertai dengan alternatif solusi. Jika memang ada solusi lain dan disepakati bersama, Ganjar akan mengikuti hal itu. Namun jika tidak, ia keberatan.

FGD KHUSUS

Lebih lanjut Ganjar meminta dilakukan kajian serius dalam ‘focus group discussion’ dengan menghadirkan para pakar terkait. Ganjar berharap agar diadakan riset ulang. "Satu tolong di cek kondisi geologisnya, karena kan alasannya gempa. Kedua, kalau alasan lahan subur tolong dicek berapa lahan subur yang terkena," katanya, Selasa (Kompas, 16/10/2018). Akhirnya, FGD pun digelar dengan kehadiran pakar dan seluruh stakeholder terkait.



Ganjar Pranowo membuka FGD yg digelar pasca penolakan tol Bawen Jogja 30/10/2018 (foto Jatengprov.go.id)

Dalam FGD, saya menyampaikan poin-poin seperti yang saya tulis di medsos sehari setelahnya :

"Kami berharap pak Gubernur dan ketua DPRD Jateng tetap menghormati keputusan final pansus, sebab perda revisi RTRW ini sudah disetujui "tanpa interupsi" dalam paripurna (artinya eksekutif dan dprd satu kata) tgl 15 oktober 2018 yang lalu. Oleh sebab itu dalam FGD kemarin saya sampaikan :

- *Berharap keppres 56/2018 tentang Proyek Strategis Nasional (PSN) direvisi khususnya terkait rencana tol bawen jogja.*
- *Kami bukan anti tol, sebab bahkan kami memunculkan usulan trase tol baru kota semarang dan kendal (pesisir pantai) sbb urgensinya untuk sabuk pantai mengatasi problem rob dan abrasi*
- *Kembali mengingatkan pemerintah terhadap 5 isu strategis provinsi yg melatar disodorkannya revisi perda no 6/2010 ini, yaitu a) keberpihakan pada lingkungan hidup, b) pangan, energi dan air sbg kebutuhan strategis masa depan, c) infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi, d) pengembangan industri dan e) pemerataan pembangunan.*

Jadi, infrastruktur jangan mengalahkan nilai strategis pangan dan lingkungan. Artinya, jika ada pilihan "konektivitas" lain yaitu rel kereta api, kenapa harus tol ??? bukankah sementara ini (entah 5 thn lagi) sudah cukup selesai dengan tol semarang solo Jogja yg sdh terbangun???

Terkait poin nomer 2, saya memang secara khusus mengusulkannya kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan ke dalam PSN (proyek strategis nasional) revisi. Urgensinya lebih mendesak dibanding trase tol Bawen Jogja. Untuk mengatasi jalur padat jalan nasional arteri utara kota semarang yang dipenuhi truk-truk besar sepanjang hari.

SOAL LEBIH BAIK REL

Kenapa Pansus RTRW lebih memilih REL dibanding TOL ? Pertama, REL adalah bukti komitmen pansus pada pilihan penting pengembangan sistem transportasi massal ke depan. Sistem transportasi cepat massal atau *mass rapid transportation system* adalah keniscayaan yang perlu segera dilakukan, termasuk di Jawa Tengah. Banyak kota-kota besar telah memulainya dengan lebih agresif. Ini dapat menjadi pilihan populis sebuah kebijakan politik penataan ruang yang ditunggu oleh masyarakat. Langkah yang kami tempuh sesungguhnya adalah soal *timeline* pelaksanaan kebijakan yang menempatkan ‘reativasi’ REL di ruas Bawen-Magelang-Jogja lebih didahului dibandingkan TOL. Dengan argumentasi yang sama, pansus juga merelease keputusan percepatan jadwal reaktivasi jalur REL Semarang-Kudus-Pati-Lasem yang memiliki urgensi dan nilai strategis yang sama dengan jalur REL Bawen-Jogja.

Kedua, rel jauh lebih ramah lingkungan karena tidak membakar terlalu banyak bahan bakar (BBM) fosil. Pilihan jalur tol hanya akan semakin mendorong semua orang membeli mobil pribadi akibat buruknya fasilitas sistem transportasi massal kita. Jadi ini soal pilihan ‘paradigmatik’ sistem transportasi kita ke depan. Apakah transportasi yang memproduksi polutan yang merusak kualitas udara dan memproduksi karbon dioksida (Co2) yang berkontribusi pada pemanasan global, atau transportasi publik yang ramah lingkungan.

Ketiga, reaktivasi jalur rel secara investasi juga jauh lebih murah, antara Rp 25-35 miliar per kilometer. Totalnya di estimasikan hanya sekitar Rp 2 triliun atau lebih hemat Rp 8 triliun ketimbang biaya pembangunan TOL yang mencapai hampir Rp 11 triliun (sekitar 130-140 miliar/KM). Keempat, secara khusus ini penting menurut saya, lajur Bawen-Magelang-Yogyakarta itu kan jalur yang eksotik, banyak pemandangan indah hamparan persawahan dan pegunungan. Jadi dengan menggunakan kereta api jauh lebih asyik untuk menikmati alam, dibanding memakai mobil. Menikmati alam bersama-sama rombongan besar, lima hingga enam gerbong, tentu ini menimbulkan kenyamanan dan menghadirkan keindahan tersendiri.

PANSUS REBORN

Tetapi lagi-lagi, saya harus garis bawahi disini, ini adalah kasus yang kesekian keputusan kami dibatalkan oleh pemerintah pusat. Pilihan menolak TOL demi REL ini sudah kita lakukan, berhasil kita paripurnakan, sukses

sebagai keputusan resmi pansus, tapi kemudian dianulir lewat proses rapat lintas sektoral (Linsek) dan persetujuan substansi (PERSUB) yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN.

Saat itu, kami memang bergerak lebih cepat dengan segera menggelar paripurna sebab tidak kunjung terjadwalnya rapat ‘linsek dan persub’ kementerian ATR/BPN. Sementara, pemerintah provinsi juga mendesak agar perda ini segera diselesaikan. Alasannya, agar perda ini dapat menjadi landasan proses penyusunan Raperda Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2013.

Akhirnya, setelah proses linsek dan persub kelar, Pansus RTRW terpaksa dihidupkan kembali untuk mengesahkan keputusan pasca persetujuan substansi kementerian ATR/BPN. Sebagaimana diatur dalam UU no. 26/2007 tentang Penataan Ruang, seluruh perda RTRW Kabupaten/Kota dan Provinsi sebelum disahkan harus memperoleh persetujuan substansi dari kementerian ATR/BPN. Karena khawatir dianggap cacat hukum, maka Pansus dihidupkan kembali atau “reborn”. Untuk mengambil keputusan ini, pimpinan DPRD Jawa Tengah menggelar rapat khusus bersama seluruh pihak terkait. Dan keputusannya pun ditandatangani oleh ketua dan seluruh wakil ketua yang ada.



Rapat khusus setelah pansus RTRW Reborn, 9/5/19
(foto dok Abdul Aziz)

Barangkali, Pansus Reborn ini adalah kejadian pertama yang terjadi. Mungkin saja, ia menjadi kasus pertama dalam sepanjang sejarah proses pengambilan keputusan politik lokal di Jawa Tengah (atau mungkin juga secara nasional). Dan akhirnya, Pansus RTRW reborn kembali mengesahkan munculnya Trase tol Bawen-Jogja dalam struktur ruang jalan nasional bebas hambatan di Perda RTRW. Selain soal Tol Bawen-Jogja, beberapa isu lain seperti kawasan lindung hutan bakau di pesisir Kendal dan Demak, isu lingkungan di pegunungan kendeng, juga menyeruak lagi dalam berbagai pembahasan. Tapi akhirnya, Perda no. 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 yang didalamnya terdapat trase TOL Bawen Jogja kelar menjadi keputusan. []

— HIBAH YANG MENGHIMPIT —

“**Jika** ini kita biarkan terus, lambat laun suara PPP bisa tergerus oleh partai-partai umum,” demikian saya ungkapkan dalam rapat internal fraksi PPP DPRD Jawa Tengah. Data mengungkap, PPP dari pemilu ke pemilu (1999-2014) terus merosot suaranya. Bahkan data kolektifnya, jumlah kursi partai-partai berbasis agama di gedung berlian, *vis a-vis* partai nasionalis, terus tergerus perbandingannya. Kita merosot mereka tambah banyak. “Ini semua gara-gara dana Hibah. Sebab itu, yuk kita tolak saja”, tandasku mengakhiri usulan.



Rapat Fraksi PPP DPRD Jawa Tengah 24/01/2013 (foto dok. Abdul aziz)

Sebagai partai Islam, PPP secara historis memiliki basis dukungan ideologis dari kelompok-kelompok

segmental yang secara taktis banyak bergerak di bidang pendidikan dan keagamaan. Basis politik partai ini adalah para kader dan simpatisan yang mengelola lembaga keagamaan, lembaga dakwah dan Tarbiyah, seperti Pondok Pesantren, Masjid, Mushola, Madrasah Diniyah (madin), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) dan Majelis Taklim. Keberadaan lembaga-lembaga non formal ini tersebar di seluruh pelosok negeri terutama di pulau Jawa. Mereka telah lahir dan mengakar kuat di tengah masyarakat. Keberadaan mereka selama ini cenderung terpinggirkan. Mereka itulah yang menjadi 'core' basis ideologis PPP.

Pasca reformasi, kontestasi pemilu telah menghadirkan banyak partai baru duduk di kursi legislatif di semua tingkatan. Dari basis kelompok nasionalis, selain PDIP dan Golkar, muncul berbagai kekuatan politik baru seperti partai Gerindra, partai Demokrat, partai Nasdem, partai Hanura dll. Sementara dari basis kelompok agama, muncul partai Kebangkitan Bangsa, partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dll. Setiap kali pemilu, semua partai dihadapkan pada tantangan kompetisi politik yang semakin ketat dan pragmatis. Kita dihadapkan pada fakta bahwa kelompok-kelompok sosial kemasyarakatan yang selama ini bergerak di sektor pendidikan seperti madin dan TPQ, karena keterbatasan dana yang mereka miliki untuk mendukung operasional dan membangun fasilitas lembaga pendidikannya, maka secara objektif mereka butuh untuk yang penting saya dapat bantuan, meski dari manapun asal partai aspiratornya.

Jika mereka hanya mengandalkan bantuan dari partai-partai agama, tentu serba terbatas secara kuantitas. Karena faktanya, berdasarkan data hasil pemilu 1999, partai-partai berbasis agama jumlahnya seimbang bila dibandingkan partai yang berbasis umum. Akhirnya partai-partai umum pun punya ruang untuk memasuki lembaga-lembaga keagamaan yang notabene menjadi basis dukungan kelompok partai agama. Partai umum juga punya kepentingan untuk menggerus basis-basis partai agama. Akhirnya dari pemilu ke pemilu pasca reformasi, partai-partai berbasis agama itu kalau dihitung secara kumulatif suaranya terus menurun, sementara partai-partai umum terus naik. Karena partai-partai umum, para legislatornya juga masuk mengadvokasi dana hibah dan bansos ke kelompok-kelompok basis elektoral partai agama. Inilah salah satu penyebab kenapa saya merasa dana hibah/bansos ini jadi blunder. “Lebih baik tidak sekalian”, tegasku dalam rapat fraksi saat itu.

REGULER BUKAN PROPOSAL

Lebih lanjut saya mencoba memperdalam argumentasi. Saatnya politik anggaran untuk sektor pendidikan keagamaan non formal ini memperoleh perhatian serius pemerintah daerah, lewat anggaran yang bersifat reguler, bukan lewat proposal dalam alokasi hibah atau bansos. Selama ini, ajuan proposal dari mereka bergantung pada jatah aspirasi yang terangkum dalam pokok-pokok pikiran anggota dewan. Katakanlah, jumlah kursi anggota DPRD dari kelompok partai agama hanya 50% dari total kursi DPRD, sementara yang mengajukan

proposal hibah/bansos sangat banyak melampaui kapasitas anggota dewan mereka, maka banyak yang lepas tidak tertampung. Mereka akhirnya berpaling ke anggota dewan dari partai-partai umum agar memperoleh kesempatan kucuran bantuan yang mereka butuhkan. Kadang-kadang bahkan mereka terpaksa menggilir ajuan proposalnya dari partai A ke partai B secara berturut-turut. Ini semua mereka tempuh sebab kebutuhan dukungan dana operasional dan pengembangan yang mendesak.

Dalam beberapa kesempatan saat pelaksanaan reses atau obrolan santai, saya sering memperoleh fakta-fakta menarik ungkapan jujur dari mereka para pengasuh pesantren dan pengelola madrasah diniyah atau TPQ. “Kalo lewat jenengan terus, ya saya sungkan dong Gus”, kata seorang pemilik Madin dari sebuah desa di Pati. Pengasuh sebuah pesantren di Rembang juga pernah menyampaikan hal yang bernada sama, “sudah bolak-balik dapat dari jenengan Gus, malu saya”. Bahkan banyak dari mereka secara terang-terangan menyampaikan, “yang penting dapat bantuan”, nggak peduli dari partai manapun”. Ada juga yang berargumen “kan kewajiban mereka menyalurkan bantuannya kepada kita”.



Berkunjung ke pengurus RA YKU 1 Sarang 24/2/2020 (foto dok abdul aziz)

Pada sisi yang lain, kondisi politik lambat laun berjalan semakin pragmatis. Kontestasi pemilu pasca reformasi diwarnai dengan praktek politik uang yang semakin menggerus nalar ideologis yang melandasi pilihan rakyat terhadap partai. Inilah yang kemudian mencairkan kondisi psikologis perilaku pemilih. Mereka tidak lagi merasa ada perbedaan yang mencolok antara berbagai partai politik yang ada. Semua partai dianggap sama. Maka pengajuan proposal bantuan pun dapat mereka ajukan kepada semua partai yang ada.

Inilah yang melandasi jalan pikiran saya agar “lebih baik hibah/bansos pendidikan keagamaan dihapus saja”. Teman-teman dari sesama partai agama di gedung berlian heran dengan sikap lugas saya ini, “Ini gimana PPP kok malah mau menghilangkan dana hibah/bansos”,

kata Muh Zen ADV dari Fraksi PKB. "Ya karena dana hibah/bansos ini menghimpit kita", ketusku. "Menghimpitnya bagaimana", tukas Zen. "Menghimpit karena membuat kita partai-partai Islam makin tergerus. Pertama, jumlah anggota legislatif kita cenderung turun dari pemilu ke pemilu. Saya bicaranya tidak hanya demi kepentingan PPP saja, tapi juga demi kepentingan kita (kelompok partai Islam), yang tentu punya spektrum urusan yang sama. Sementara partai-partai berbasis nasionalis yang awalnya seimbang jumlah kursinya menurut Pemilu 1999, lama-lama menggeser posisi kita".

Yang kedua, bukankah keberadaan lembaga-lembaga pendidikan non formal ini selama ini telah berjasa besar di tengah-tengah masyarakat? Bukankah mereka yang selama ini telah berjasa membangun akhlak dan moral generasi kita ? Ini bahkan mereka lakukan dengan ikhlas pada saat negara tidak mampu hadir sebab keterbatasan anggarannya. Sebab itu, saatnya negara hadir membantu mereka. Caranya, saatnya mereka memperoleh alokasi anggaran politik keberpihakan. Saatnya muncul anggaran dalam bentuk "insentif" yang bersifat reguler untuk menebus ketidakadilan yang selama ini terjadi.

Saya memang sering berdiskusi dan menyampaikan gagasan itu kepada banyak orang saat ada dalam berbagai kesempatan. Untuk memperkuat argumentasi, saya mempersilahkan teman-teman kelompok partai agama ngecek berapa alokasi hibah/bansos yang tersalur lewat partai umum dan bandingkan dengan yang tersalur lewat partai berbasis

agama dalam APBD tahun 2010, 2011, 2012. Bahkan kalau perlu dilacak dari awal, ngitungnya berarti mulai dari dokumen APBD tahun 1999 sampai 2013. Pada periode awal, mungkin proporsionalitasnya masih relatif seimbang. Tapi seiring pemilu ke pemilu, keseimbangannya mulai terganggu karena hibah dari partai umum masuk semua. Golkar juga masuk ke pondok, PDIP juga masuk ke madin, begitu juga Gerindra, Nasdem, dll.

Atas penyaluran dana Hibah/Bansos ini, muncul banyak catatan kritis yang diberikan para akademisi, lembaga pengawas dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Kritik mereka menyasar dua hal. Pertama, potensi politisasi dana hibah/bansos untuk kepentingan politik elektoral. Ada kecenderungan, alokasi dana hibah/bansos selalu naik setiap menjelang pemilu. Kedua, potensi korupsi dalam penggunaan dana hibah/bansos. Muncul beberapa kasus, dana hibah/bansos disunat untuk kepentingan finansial pragmatis politik.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah setiap tahun menganggarkan dana bantuan hibah/bansos dalam jumlah yang besar. Gubernur Ganjar Pranowo pernah wanti-wanti agar semua bantuan untuk berbagai bidang tersebut harus digunakan sesuai dengan usulan dan jangan diselewengkan. "Harus digunakan sesuai dengan yang diusulkan, harus penuh integritas, serta harus ada laporan. Bantuan ini menggunakan uang negara, jadi jangan dikorupsi," tegas Gubernur usai penyerahan hibah bansos kepada lembaga swadaya masyarakat di Semarang (23/8/2018 jatengprov.go.id). Jika itu bisa

dilaksanakan, kata dia, “maka output-nya akan terlihat dan outcome-nya berbuntut. Misalnya, bantuan pembangunan ruang kelas baru Madin/TPQ, jika terwujud tentu akan sangat membantu lembaga pendidikan non formal ini menampung santri-santri yang tempat belajarnya berada di teras masjid atau musholla”.

SECERCAH PERIODE KETIGA

Dulu memang sebatas wacana dan diskursus yang terus bergulir. Respon keras sering saya terima dari berbagai pihak yang tidak setuju dengan pendapat saya. Namun seiring waktu yang terus berjalan, saat saya memasuki periode ketiga di gedung berlian (periode 2019-2024), dinamika terus bergerak dan menemukan momentumnya. Alhamdulillah, lewat proses politik yang unik dan penuh kejutan, akhirnya muncullah keputusan alokasi dana insentif guru madin/TPQ se Jawa Tengah. Keputusan ini kami munculkan lewat dokumen visi-misi pasangan calon gubernur Ganjar-Yasin dalam kontestasi pilgub tahun 2018.



Ganjar Pranowo menyerahkan secara simbolis insentif Guru keagamaan tahun 2023 kepada Mustain (kankemenag Jawa Tengah). Foto dok Jatengprof.go.id

Jadi, ini ‘inline’ atau sejalan dengan pikiran dan perjuangan saya di periode pertama dan kedua dulu. Saya menolak politik anggaran sektor pendidikan non formal keagamaan yang bersifat hibah/bansos berdasarkan aspirasi anggota dewan. Kami menghendaki agar alokasi itu bersifat reguler dan menjadi belanja rutin perangkat daerah kepada mereka para guru-guru kita yang telah berjasa besar mencerdaskan anak bangsa. Akhirnya, dengan telah dikunci melalui visi-misi dan program prioritas Calon Gubernur/wakil Gubernur, implementasinya dalam kebijakan APBD dapat berjalan dengan lancar. Di tahun 2019, telah muncul dana insentif guru Madin/TPQ sebesar 207 miliar. Dua tahun terakhir

yakni APBD tahun 2022 dan 2023, dana insentif guru keagamaan ini melonjak mencapai 277 miliar untuk sekitar 230 ribu guru keagamaan se Jawa Tengah.

Ada catatan menarik saat menjelang penetapan APBD 2024 terkait anggaran insentif guru keagamaan ini. Penjabat (PJ) Gubernur Jawa Tengah yang baru, Nana Sudjana, tiba-tiba memutuskan menghapus anggaran ini. Selain insentif guru keagamaan, ada total 2 triliun lebih yang mengalami refocusing anggaran, termasuk anggaran BOSDA jateng sebesar 169 miliar. Atas rencana tiba-tiba ini, saat rapat banggar saya bersuara lantang menolaknya. Mungkin perlu saya garis bawahi, sayalah satu-satunya yang bersuara tegas menolak soal hilangnya dana insentif dan Bosda ini. Sementara teman-teman banggar lain fokus ke soal dana-dana lain yang juga dihapus.



Rapat Banggar pembahasan APBD 2024 (14/11/23) (foto dok Abdul Aziz)

Terkait Bosda tentu ini saya kaitkan dengan sejarah panjang keputusan politiknya yang penuh perjuangan. Tidak mudah mengawalinya sebagai keputusan. Sementara terkait insentif guru keagamaan, ini soal nasib guru-guru yang terus terlupakan oleh para pengambil kebijakan politik di negeri ini. Dan alhamdulillah, keputusan refocusing dana insentif dan Bosda itu akhirnya dapat dibatalkan.
<https://regional.kompas.com/read/2023/11/19/21272441/pemprov-jateng-tetap-anggarkan-insentif-guru-keagamaan-dan-bosda-di-apbd>.

Secara detail, para guru madin/TPQ itu hanya menerima 100rb/bulan/guru. Angka 100rb bagi mereka tentu saja belumlah dirasa cukup. Masih sangat jauh dari angka dan standar layak. Belum soal dana operasional proses belajar mengajar, dana pengembangan bangunan fisik dan dana peningkatan SDM. Masih banyak yang jadi pekerjaan rumah. Problemnya masih ‘bergelayut’ jika diskusi terus kita arahkan untuk lembaga pendidikan non formal ini.{}

— INSENTIF GURU YANG TERLUPAKAN —

Cita-cita yang lama terpendam bagi aktivis PPP seperti saya adalah munculnya keputusan pemberian insentif (pendapatan tambahan) untuk Guru-Guru Madrasah Diniyah (madin), Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ) dan Pondok Pesantren. Cita-cita ini seolah menjadi misi yang paling faktual bagi kader PPP. Ia menjadi misi **ideologis** yang paling ‘**membumi**’ bagi mereka. **‘What the reason’**? Sebab, sejak PPP lahir pada tahun 1973, partai ini secara ‘istiqomah’ digerakkan oleh para pendiri, pengelola dan aktivis terdepan lembaga-lembaga pendidikan non formal tersebut. Para aktivis dan Guru yang selama ini nasibnya terlupakan.

Nasib yang terlupakan memang layak disematkan kepada mereka. Selama ini, perjuangan mereka dikenal yang paling ikhlas dan tanpa pamrih apapun dalam mengabdi di sektor pendidikan. Niat utama mereka adalah mengamalkan ilmu (‘tasharruf al ilm’). Keikhlasan itu berjalan seiring dengan keyakinan keagamaan yang mereka miliki, bahwa menjadi guru adalah pekerjaan paling mulia disisi Allah swt jika dibanding pekerjaan apapun yang lainnya. Bahkan, ini merupakan ‘jihad sosial’ yang harus dikerjakan meski tanpa imbalan yang setimpal.

MOMENTUM DRAMATIK

“Dan alhamdulillah, lewat sebuah momentum dramatik yang sebelumnya tak pernah terbayangkan, kebijakan tersebut akhirnya muncul di Jawa Tengah. Saya sebut dramatis karena keputusannya muncul seiring peristiwa politik yang terjadi secara mendadak. Peristiwa itu berkelindan terjadi sesaat setelah terpilihnya Gus Yasin sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah mendampingi Ganjar Pranowo dalam Pilgub tahun 2018”.

Secara kronologis saya mencatatnya sebagai berikut. Pagi itu ba'da Subuh, salah satu calon gubernur yang namanya sudah santer beredar, Sudirman Said, berada di rumah KH Maimoen Zubair (sesepuh PPP) Sarang Rembang. Sudirman saat itu sedang menunggu jawaban dari Mbah Moen, agar salah satu putranya bersedia menjadi calon wakil gubernur mendampinginya dalam kontestasi PILGUB. Tapi sekitar jam 9, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Jakarta, entah apa sebabnya, tiba-tiba memutuskan calon wakil gubernur mas Ganjar di periode kedua adalah putranya Mbah Maimoen. Lalu keluarga besar mbah Maimoen menggelar rapat kecil, dan di putuskanlah Gus Yasin (anggota FPPP DPRD Jawa Tengah) sebagai calon wakil gubernur, mendampingi Ganjar, bukan Sudirman.



Diskusi santai di ndalem mbah Maimun Zubair 10/1/2018 (foto dok abdul Aziz)

Saat itu, kita pengurus DPW PPP masih berada di rumahnya masing-masing. Tidak tahu menahu. Setelah mendengar keputusan itu, saya lalu menginisiasi teman-teman PPP untuk berdiskusi dan merapatkan barisan. Karena sebagai calon wakil gubernur, kita tentu punya hak untuk ikut menyodorkan konsep tentang visi misi dan program program yang kita anggap prioritas. Salah satu poin yang kita garis bawahi dalam diskusi ini tentu saja adalah nasib mereka yang selama ini terlupakan, yakni para guru Madin/TPQ/Pontren. Inilah momentum penting untuk memunculkan komitmen kebijakan politik yang berpihak kepada mereka. Saatnya kita perjuangkan nasib mereka dengan kontrak politik yang masuk dalam

dokumen janji politik di kontestasi Pilgub Jawa Tengah tahun 2018.

MASUK PRIORITAS PROGRAM

Diskusi lalu kita kembangkan untuk menemukan konsep yang tepat dalam rangka memasukkan gagasan tersebut. Komunikasi pun kita bangun dengan pihak-pihak terkait. Akhirnya, kita menemukan titik temu dalam rumusan yang terdapat dalam salah satu misi yang telah tersusun oleh tim Ganjar di sektor pendidikan. Ada konsep pendidikan ‘tanpa sekat’ untuk Jawa Tengah. Sebagai penjabaran dari konsep pendidikan tanpa sekat, muncullah diktum tentang ‘insentif guru agama’. Insentif guru keagamaan (Madin/TPQ/Pontren) akhirnya disepakati masuk sebagai salah satu program prioritas sektor pendidikan yang akan diwujudkan oleh pasangan Ganjar-Yasin jika terpilih dalam Pilgub tahun 2018.

Jadi, sudah terkunci dalam dokumen perencanaan politik janji sang calon gubernur/wakil gubernur. Inilah kesepakatan atau ‘deal politik’ yang sangat melegakan bagi kami. Meskipun masih sebatas sebagai ‘janji politik’ pilkada, namun cukup membuat hati kami tenang. Setidaknya ini menjadi ‘step’ awal yang sangat penting. Kami bisa memanaskan mesin dukungan politik kontestasi pilgub khususnya di kalangan basis-basis pemilihan Islam tradisional dengan membawa ‘bekal’ komitmen ini. Kami meyakini efektifitas janji ini sebab masuk menjadi program prioritas yang akan diwujudkan oleh pasangan Gubernur/wakil Gubernur yang diusung oleh PDIP dan PPP.

REALISASI YANG MEMIKAT

Roda bergerak dengan cepat tapi pasti. Tidak perlu menunggu kontestasi Pilgub selesai dan dilantik dulu baru janji itu diwujudkan. Sesaat setelah komitmen terbangun dalam dokumen program prioritas pasangan calon gubernur/wakil gubernur yang diusung PDIP-PPP, dalam perencanaan RAPBD tahun 2019, program insentif ini langsung di ‘launching’. Ini merupakan tahun perencanaan saat proses pilkada sedang jalan. Jadi, sebagai calon gubernur incumbent, Ganjar Pranowo langsung ‘cancut taliwondo’ untuk mewujudkan. Ia bergerak cepat dengan langsung memunculkan nomenklatur anggaran untuk insentif Guru Madin/TPQ/Pontren di tahun saat ia masih menjabat sebagai incumbent Gubernur.



Ganjar Pranowo silaturahmi bersama Ulama (foto *Slam Humas Jateng*)

Tidak tanggung-tanggung, di rancangan APBD tahun 2019, muncul nominal sebesar 207 miliar untuk mereka para guru yang terlupakan. Angka itu mencakup kuota sebesar 171.131 Guru Madin/TPQ/Pontren se-Jawa Tengah dengan rincian Rp. 100.000/guru/bulan. Kira-kira angka ini mencakup sekitar 80% guru di lembaga-lembaga pendidikan Islam non formal yang terdata dalam ‘database’ yang bernama EMIS (education Management Information System) kementerian agama Jawa Tengah. Jadi semua guru yang ada di database belum semua dapat insentif. Masih tersisa ‘waiting list’ sekitar 40rb-an Guru Madin/TPQ/Pontren yang belum masuk alokasi. Apalagi kalo plus yang belum masuk database EMIS, maka jumlahnya menjadi semakin banyak lagi.

Pada tahun kedua (RAPBD tahun 2020), yakni tahun dimana pasangan Ganjar-Yasin tampil sebagai gubernur/wakil gubernur terpilih, alhamdulillah kuotanya bertambah menjadi Rp 210 miliar. Angka ini mengcover *kuota guru* sebesar 204.125 Guru Madin/TPQ/Pontren se Jawa Tengah. Yang berbeda dengan kebijakan di tahun pertama (2019), insentif guru keagamaan di tahun ini dialokasikan juga kepada guru-guru keagamaan non Islam, yakni guru agama Kristen, Katolik, Budha dan Hindu. Jumlah kuota untuk guru non Islam sebesar 5153 orang. Rincian datanya ; Guru madin 80.437 orang, guru TPQ 104.231 orang, guru Pontren 19457 orang, Guru sekolah minggu Kristen 4057 orang, Guru sekolah minggu katolik 434 orang, Guru Vijjal Budha 498 orang dan Guru pasraman Hindu 164 orang. Jadi, total insentif guru keagamaan tahun 2020 kuotanya sebesar 211.455 orang.

Nomenklatur anggaran ini berjalan selama 3 tahun berturut turut APBD pemerintah Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2020-2021-2022.

Pada RAPBD tahun 2023, alokasi yang muncul untuk insentif guru keagamaan bertambah lagi. Inilah tahun terakhir kepemimpinan Ganjar Yasin di Jawa Tengah. Mungkin muncul pertimbangan sebagai tahun terakhir, akan memberi kenang-kenangan manis untuk mereka yang selama ini terlupakan. Dalam draft RKUA/PPASS RAPBD tahun 2023 yang kami terima, telah muncul tambahan kuota baru sebesar 19rb-an sehingga total kuota untuk insentif guru keagamaan se Jawa tengah menjadi 230.830 orang. Dengan alokasi sebesar Rp. 1,2jt/tahun/orang, maka anggaran totalnya mencapai 270,2 miliar. Sebuah keputusan yang patut kita syukuri dan tentu kami full dukung dalam pembahasan penetapan APBD tahun 2023.

BERMUTU DAN PROFESIONAL

Dalam sebuah kesempatan di awal peluncuran program insentif guru keagamaan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan, pemberian dana ini sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Jateng terhadap kondisi guru madrasah agar semakin bermutu dan profesional dalam mendidik generasi ke depan. "Kami ingin generasi kita nantinya menjadi manusia baik, mempunyai pemahaman baik tentang kehidupan. Bantuan ini memang juga belum mengcover seluruh guru-guru Madin/TPQ/Pontren yang terdata di Kementerian Agama," katanya di Rumah Dinas Puri Gedeh, Semarang,

22/1/2019. Pola pencairannya, kata Gubernur, "melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jateng. Para penerima akan menerima dana ini melalui rekening dengan alamat yang sudah didata sebelumnya. Tahun 2019, ada 170 ribuan guru Madin, TPQ dan pengasuh pondok pesantren yang terverifikasi di Kemenag".

Sementara, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengharapkan, para guru madin, TPQ dan pengasuh pondok pesantren membantu penguatan paham Islam "rahmatan lil 'alamin". "Semoga dengan bantuan ini bermanfaat dan tidak ada keluh kesah lagi dari para guru maupun ustad. Pondok pesantren dan madrasah telah berjasa sejak sebelum kemerdekaan," tutur Gus Yasin, 22/1/2019. Dia menambahkan, "para Kiai zaman dahulu berinisiatif membangun negara dengan agama. Para penerus dan santri pun harus dikembalikan pemahamannya mengenai hal tersebut. Di Rembang, Batang, Tegal, Batang, Pekalongan, Kudus, Kebumen bantuan seperti itu sudah dilakukan melalui pemerintah kabupaten setempat. Jadi kita kolaborasi dengan kabupaten/kota, agar mereka memperoleh tambahan kesejahteraan yang mereka butuhkan, sekaligus memperkuat pemahaman nasionalisme di kalangan mereka", tandasnya.



*Gus YASIN memberikan bantuan simbolis insentif guru Madin
(foto Jatengprov.go.id)*

PEJUANG BERTANDA JASA 'BINTANG'.

Bagi saya, guru Madin/Tpq/Pontren adalah para pahlawan ‘tanpa tanda jasa’ bagi negeri ini. Mereka telah berjasa dengan mengabdi dan berkhidmah untuk menjaga pendidikan akhlak untuk generasi penerus di seluruh pelosok negeri. Saat era perjuangan kemerdekaan, mereka menjadi bagian dari para pejuang pergerakan yang ikut mengangkat senjata meski hanya berbentuk ‘bambu runcing’. Kiai Subchi adalah sosok pencetus senjata bambu runcing yang terkenal dan ditakuti Jepang dan Belanda. Beliau adalah sosok guru ‘ngaji’ bersahaja dari Parakan Temanggung. Bambu runcing akhirnya dikenal sebagai senjata andalan para pejuang kemerdekaan. Dengan gigih para gerilyawan yang terdiri dari para guru ‘ngaji’ ini berjuang mengusir penjajahan. Setelah Indonesia merdeka, mereka berkhidmah mendidik dan membina pendidikan akhlak anak negri

tanpa pamrih dan tanpa lelah. Mereka adalah para pejuang tanpa tanda jasa yang disematkan di pundak bak para pahlawan yang gugur di medan perperangan.

Bagi partai kami (PPP), mereka adalah pejuang-pejuang tangguh kami yang dengan istiqomah menjadi penggerak partai di tingkat bawah. Mereka adalah para pejuang yang dengan bangga menyematkan 'emblem' bintang di dadanya. Para pejuang bertanda jasa 'bintang' ('metafora' dari logo PPP yang bergambar 'bintang' saat itu). Mereka merupakan 'garda terdepan' perjuangan membangun dukungan politik ummat sejak partai ini lahir pada tahun 1973.

PPP lahir merupakan hasil fusi empat partai Islam era sebelumnya. Baik partai NU, Parmusi, Perti dan PSII yang menjadi penopang eksistensi politik lahirnya PPP di era Orde Baru, adalah partai-partai Islam yang berbasis pergerakan para aktivis dakwah di bidang pendidikan keagamaan. Disamping pondok pesantren, madin/TPQ, mereka juga berkhidmah dalam berbagai aktivitas dakwah keagamaan di mushola, masjid, surau, majlis taklim dan lain sebagainya. Tanpa mereka, partai ini tidak akan lahir dengan sempurna.

Saat gempuran rezim politik orde baru berkembang semakin represif, keberadaan para pejuang ber emblem bintang' PPP ini ikut terguncet. Negara menjadi alat penetrasi partai yang berkuasa untuk menghimpit keberadaan para aktivis ini sehingga mereka bernasib sangat tertekan. Sinisme dan perlakuan diskriminatif mereka terima dengan penuh ketabahan. Namun meski begitu, mereka tetap eksis dalam barisan perjuangan di

bawah panji-panji ‘emblem bintang’ PPP. Mereka tetap istiqomah pada jalur pilihan ideologis politik bersama PPP sebagai wadah satu-satunya saluran politik saat itu.

Oleh sebab itu, dengan munculnya kebijakan insentif guru Madin/TPQ/Pontren di Jawa Tengah ini, bagi kami adalah merupakan janji yang terlunasi. Meski secara jumlah masih terbilang kecil, yakni 100.000/guru/bulan, namun ia dapat menjadi tambahan penghasilan yang bermanfaat. Ini juga bisa menjadi ‘trigger’ bagi wilayah lain agar mengeluarkan kebijakan yang sama dengan Jawa Tengah. Berdasar data, tidak semua pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Tengah memiliki kebijakan yang sama dengan pemerintah Provinsi. Bahkan, hanya ada 6 provinsi yang memiliki kebijakan yang sama terkait insentif Guru keagamaan ini. Secara nasional, barangkali kebijakan “insentif guru agama” ini saatnya dimasukkan dalam salah satu isu penting dalam kontestasi PILPRES 2024 yang akan datang.]

— SERTIFIKASI HALAL UKM —

Saatnya bantuan sertifikasi halal untuk usaha kecil menengah (UKM) di Jawa Tengah kita berikan, demikian saya sampaikan dalam rapat pembahasan perda RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023. Dan alhamdulillah, meski di draft awalnya belum ada, usul itu disetujui. Inilah isu simbolik yang saya anggap penting dalam kontek kepemimpinan politik Ganjar-Yasin di Jawa Tengah.



Rapat Pansus RPJMD 2018-2023 perihal sertifikasi halal UKM bersama dinas-dinas rumpun ekonomi. (foto Humas DPRD Jawa Tengah)

Dalam dokumen RPJMD 2018-2023 yang sudah diundangkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023,

saya berhasil mematok target tinggi untuk program ini. Setiap tahun harus ada 1000 UKM yang mendapatkan sertifikasi halal. Program ini nanti difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UKM. Nilai anggaran per UKM sebesar Rp 1,5 juta. Labelisasi halal ini pasti dibutuhkan oleh UKM kita di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Saya kira ini bentuk konkret pendampingan untuk UKM kita. Di tengah persaingan produk yang semakin kompetitif, labelisasi halal bisa menjadi 'branding' penting yang membantu posisi mereka.

HEALTHY BRANDING

Keberadaan UKM di Jawa Tengah harus benar-benar terdata dan memperoleh sertifikasi. Data merupakan cara agar kita memiliki pengetahuan utuh potensi yang kita miliki. Dengan data akan tergambar kemampuan kita untuk menggerakkan sektor riil ekonomi masyarakat. Sementara sertifikasi bertujuan agar tercipta 'quality branding' produk UKM. Dengan standar tertentu dalam proses sertifikasi halal, akan menjamin produk UKM yang aman dan sehat untuk dikonsumsi. Pada akhirnya, ini akan memunculkan "healthy branding" untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap UKM.

Jika merujuk pada program usaha koperasi pesantren yang dijanjikan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin saat kampanye, maka pendidikan perkoperasian dan UKM serta pengembangan akses pembiayaan dan kapasitas bisnis mereka menjadi poin yang harus diprioritaskan. Sektor ini memang benar-benar sudah terbukti bisa meningkatkan perekonomian

masyarakat. Penciptaan lapangan kerja baru harus terus didorong lewat sektor ini. Tentu butuh anggaran yang tidak sedikit untuk mewujudkan itu. Sinergitas antara Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota harus terus dilakukan. Komitmen anggaran menjadi faktor penting dalam rangka mewujudkan targetnya. Namun yang tidak kalah penting, inovasi dan terobosan kebijakan untuk UKM menjadi faktor penentu di tengah kondisi anggaran yang serba terbatas.

Nah, salah satu bentuk terobosan yang saya anggap penting saat pembahasan draft RPJMD adalah kebijakan sertifikasi Halal ini. Konon, pada tahun 2012, program ini pernah muncul di Jawa Tengah. Sertifikasi halal bisa menjadi ikhtiar penting yang berdimensi anggaran kecil sehingga terjangkau dan bisa dilakukan oleh semua pemerintah daerah. Ini dapat menjadi pilihan taktis yang dapat digunakan di tengah kondisi fiskal yang serba terbatas. Oleh karena itu, Pansus RPJMD memutuskan untuk meningkatkan fasilitasi sertifikasi halal bagi UKM dengan sasaran 1000 UKM per tahun mulai tahun 2019. Selain itu, muncul pula penambahan alokasi anggaran bagi program penguatan kelembagaan dan diversifikasi usaha koperasi pesantren dari 10 menjadi 100 koperasi pesantren tiap tahun. Sebagai tulang punggung perekonomian nasional, pemerintah provinsi Jawa Tengah harus ikut berkontribusi terhadap pemberdayaan sektor riil ekonomi lewat UKM.

PELAKU UKM ANTUSIAS

Para pelaku UKM sangat antusias menanggapi Program Sertifikasi Halal ini. Selain untuk memperkuat ekosistem halal, sertifikasi ini juga menjadi salah satu jembatan bagi para pelaku UKM di Jawa Tengah, agar produk-produk unggulan yang mereka hasilkan bisa naik kelas.

“Alhamdulillah, sejak program Pemprov Jawa Tengah ini digulirkan, hingga saat ini sudah ada ribuan produk UKM yang telah mengantongi sertifikasi halal,” ungkap Kepala Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah, Endah Ariyanti, (Republika, 28/1/2022). Endah menyampaikan, Gubernur Jawa Tengah sangat memberikan perhatian terhadap peningkatan dan pengembangan UKM di daerahnya, salah satunya melalui program fasilitasi sertifikasi halal kepada UKM. Sejak program fasilitasi ini digulirkan tahun 2012, lalu muncul lagi tahun 2020 hingga tahun 2022, sudah ada sedikitnya 2.144 UKM yang telah disertifikasi halal di berbagai daerah di Jateng. “Setelah memperoleh sertifikat halal, keuntungan yang didapat para pelaku UKM di antaranya adalah memperluas jaringan pasar dan menaikkan kelas produk UKM tersebut,” tambahnya.

Menurut Endah, “sertifikasi halal juga membantu meningkatkan kepercayaan konsumen. Di sisi lain, sertifikasi ini juga semakin memberikan ketenangan berkegiatan usaha bagi para produsen. Termasuk juga memperbaiki manajemen produksi, meningkatkan daya saing produk hingga jaminan serta kejelasan sumber

bahan baku produk UKM yang sesuai syariat Islam," lanjutnya.

Oleh karena itu, Dinkop UKM Jateng terus melakukan pendampingan kepada pengusaha UKM dalam rangka membantu fasilitasi sertifikasi halal, khususnya bidang makanan dan minuman. Selain itu juga memberikan sosialisasi pemahaman terkait produk halal dan mempertemukan para pelaku UKM dengan jaringan seperti toko retail, pusat oleh-oleh hingga pengusaha skala besar. Untuk bisa mendapat sertifikasi halal, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pelaku UKM. Di antaranya nama dan izin usaha, daftar bahan yang digunakan, proses pengolahan dan sistem jaminan halal. "Pemprov Jawa Tengah terus berkomitmen mendorong industri halal semakin berkembang. Ini dibuktikan dengan adanya dana alokasi anggaran khusus untuk Program Sertifikasi Halal yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah," tutur Endah. Perlu Gotong-Royong.

EKOSISTEM HALAL NASIONAL

Secara nasional, Pemerintah terus menggenjot penguatan ekosistem produk halal dengan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibawah Kementerian Agama RI . BPJPH bertanggung jawab mengeluarkan sertifikasi kehalalan yang sebelumnya menjadi wewenang LPPOM MUI. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. "Ada tiga aktor yang diatur dalam UU No 33 tahun 2014, terlibat dalam proses

Sertifikasi Halal, yaitu BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH, dan MUI," jelas Aqil Irham ketua BPJPH di Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Menurutnya, masing-masing pihak sudah memiliki tugas dan tanggung jawabnya dalam tahapan sertifikasi halal, sejak dari pengajuan pemilik produk hingga terbitnya sertifikat. BPJPH misalnya, memiliki tugas menetapkan aturan/regulasi, menerima dan memverifikasi pengajuan produk yang akan disertifikasi halal dari Pelaku Usaha (pemilik produk), dan menerbitkan sertifikat halal beserta label halal. Sementara Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), bertugas melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk yang diajukan untuk sertifikasi halalnya. Pemeriksaan ini dilakukan oleh auditor halal yang dimiliki oleh LPH. Pihak ketiga yang berperan dalam proses sertifikasi halal adalah MUI. MUI berwenang menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal. Ketetapan halal ini, baik yang terkait dengan standar maupun kehalalan produk. Sertifikat halal yang diterbitkan BPJPH didasarkan atas ketetapan fatwa halal dari MUI," tegas Aqil.

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi pusat produsen halal terkemuka di dunia. *The State of the Global Islamic Economy Report (SGIE Report)* 2022 melaporkan bahwa pengembangan ekosistem halal Indonesia atau ekonomi syariah Indonesia semakin membaik, terbukti bahwa Indonesia berhasil menjadi peringkat kedua di dunia. Laporan ini menunjukkan bahwa sektor-sektor unggulan di Indonesia mampu bangkit setelah mengalami deflasi akibat pandemi

Covid-19. Sebagai salah satu negara konsumen produk halal terbesar di dunia, Indonesia menyumbang sebesar 11,34% dari pengeluaran halal global. Pada sektor produk makanan halal (*halal food*) misalnya, Indonesia merupakan konsumen terbesar kedua di dunia. Selain itu, terdapat potensi yang dapat memperkuat industri halal nasional diantaranya seperti tercermin dari data *Indonesia Halal Markets Report* 2021-2022 yang menunjukkan bahwa pada tahun 2020, Indonesia telah menghabiskan sebesar US\$1,9 triliun untuk konsumsi produk halal. Kajian ini dapat dijadikan acuan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pusat produsen halal terkemuka di dunia.{}

— SAAT PANSUS SOTK —

Mungkin karena sudah 'garis tangan', setelah menghindar dari giliran jatah ketua pansus covid-19 Jateng, justru dapat giliran menggawangi Pansus SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja) Pemerintah provinsi Jawa Tengah (perda 9/2016). Sebuah pansus yang akan menetapkan struktur organisasi perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah yang bertanggung jawab mengelola APBD tahunan sekitar 27 triliun.

Tentu saja, garis tangan dalam benang merah urutan :

1. Saat akhir 2017 sebagai ketua pansus revisi RTRW, kami mencoba berdialog keras tentang 25 tahun rancang bangun Jawa Tengah. Pemerataan pembangunan dan Jateng lestari menjadi isu strategis perdebatan kami. Dan alhamdulillah, sebagian telah menghasilkan rekomendasi kelestarian yang patut jadi komitmen semua pihak.
2. Setahun kemudian (2018), sebagai ketua pansus RPJMD Jawa Tengah, kami mengelaborasi RTRW ke dalam rancang bangun 5 tahun pemerintahan kedua Ganjar-Yasin (2018-2023). RPJMD menghasilkan poin penting tentang 'keadilan sektor pendidikan', penguatan pengentasan kemiskinan, pengangguran dan pertanian organik jateng.
3. Sekarang, secara '*ndilalah*', kami ditunjuk menjadi ketua pansus revisi Struktur Organisasi Perangkat

Daerah (OPD). OPD adalah batang tubuh pemerintahan yang menjadi ujung tombak pelaksanaan visi, misi, program dan kegiatan pemprov Jateng. Mereka lah yang bertanggung jawab apakah target pendapatan akhir tahun tercapai atau tidak. Mereka pula yang akan mengawal pelaksanaan APBD.

Seperti biasa, sebagai ketua pansus, saya selalu melemparkan diskursus yang menggelitik anggota pansus. Diskursus muncul terkait pilihan-pilihan taktis dan strategis konsolidasi organisasi perangkat daerah (OPD) Jawa Tengah yg berjumlah 42 buah (terdiri dari 23 dinas, 8 badan, 9 biro, 1 sekwan, 1 inspektorat). Akhirnya rapat pertama pansus sepakat, pembahasan tdk hanya terpaku pada materi yang disodorkan eksekutif, yakni pembentukan BRIDA Jateng. Tetapi evaluasi dan kontekstualisasi seluruh OPD setelah 5 tahun berjalan menjadi tantangan penting yang harus dijawab.



Rapat pansus SOTK DPRD Jateng, 4/12/2021 (foto Humas DPRD Jateng)

Rapat-rapat pembahasan pun berjalan maraton. Diskusi berjalan dinamis dan berkembang sengit. Muncul beberapa pertanyaan penting tentang :

1. Relevansi penggabungan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah ditengah kebutuhan dan kesimpulan berkali-kali rapat banggar tentang pentingnya optimalisasi aset untuk pendapatan daerah.
2. Relevansi keberadaan Dinas Arsip Dan Perpustakaan dalam era transformasi digital yang semakin determinan.
3. Relevansi penggabungan dinas pemuda olahraga dan pariwisata yang sarat beban kerja dan kebutuhan prioritas pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
4. Relevansi penggabungan dinas Pendidikan dan kebudayaan untuk memperkuat prioritas pariwisata berbasis budaya.
5. Relevansi keberadaan dinas ketahanan pangan, yg seperti bekerja di ruang hampa pasca gagalnya program sislogda (sistem logistik daerah) dan terlalu kuatnya arus pasar bebas di sektor pangan.
6. Relevansi penggabungan dinas pemberdayaan masyarakat, desa dan kependudukan dan catatan sipil.
7. Inspektorat yang memiliki kewenangan pengawasan sampai level kab/kota.



Rapat pansus SOTK DPRD Jateng, 21/12/2021 (foto Humas DPRD Jateng)

Dengan kata kunci mandat reformasi birokrasi dalam Nawacita Presiden Jokowi, yaitu perampingan birokrasi, saya mengembangkan diskursusnya mencakup :

1. Menyetujui pembentukan BRIDA dan perubahan fungsi RSUD provinsi menjadi Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK).
2. Membentuk Badan Aset Daerah (terpisah dari BPKAD), menuju optimasi dan kapitasi aset.
3. Menggabung Dinas Arsip Perpus dg Dinas Kominfo, menuju digitalisasi arsip perpus dan memperluas jangkauan literasi.
4. Merubah penggabungan 3 OPD urusan pekerjaan umum dari 3 menjadi 2 (dinas bina marga cipta karya, dinas psda tata ruang dan dinas perkim).

5. Merubah penggabungan 2 OPD menjadi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan, demi mewujudkan prioritas pariwisata jateng berbasis budaya, dan
6. Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga, sebab infrastruktur olahraga yg tersebar di seluruh lembaga pendidikan kita.
7. Menggabung Dinas ketahanan pangan dg dinas pertanian dan perkebunan, untuk integrasi penanganan ketahanan pangan.

Namun sayang, dari 7 poin ‘exercise’ yang saya kembangkan di atas, pansus hanya menyetujui 3 poin pertama untuk diputuskan. Teman-teman anggota pansus tampaknya sepakat untuk tidak terlalu spekulatif. Mereka ingin bermain aman sehingga menyisakan 3 poin tersebut sebagai keputusan, yakni 1. menyetujui BRIDA, 2. membentuk Badan Aset Daerah dan 3. menggabungkan Dinas Arsip ke Dinas Kominfo. Akan tetapi saat fasilitasi secara tertulis ke Kementerian Dalam Negeri, 2 poin terakhir pun dianulir. Hanya BRIDA yg disetujui. Atas keputusan itu, kamipun ‘ngluruk’ ke Jakarta, meminta penjelasan.

Saat konsultasi, kemendagri memunculkan 2 opsi baru kepada kami :

1. Badan aset daerah dibentuk biro aset atau dibentuk UPT aset daerah.
2. Dinas arsip perpus dimasukkan ke dalam salah biro di setda.

Dan akhirnya, setelah pansus rapat 2x pasca konsultasi, dan atas faktor pertimbangan zona nyaman, kami pun menyerah. Keputusan terakhir pansus pasca konsultasi adalah 1. menyetujui pembentukan BRIDA, 2. Memberi rekomendasi kepada pemprov untuk membentuk UPT aset lewat Pergub dengan kewenangan mengelola minimal 50% aset milik pemprov.

Bagi kami, menyerah setelah perjuangan tentu "sesuatu" sekali. Dan sesuatu itu adalah "kikuk"...{}

— SKEMA BACKLOG PERUMAHAN —

Program backlog perumahan adalah sebuah keputusan baru dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023. Sebelumnya tidak ada dan belum tertera dalam draft awal yang disodorkan pemerintah Provinsi. Sebuah inovasi yang muncul setelah kami memperoleh penjelasan problem-problem krusial yang kita hadapi di sektor perumahan rakyat.

Program bantuan RTLH (rumah tidak layak huni) merupakan pilihan lazim yang sudah berjalan dan kembali disodorkan. Saat masih duduk di Komisi D, saya terus mengawal keputusan anggaran RTLH ini dimana setiap tahun dialokasikan sangat besar, yakni tiga titik di setiap desa se-Jawa Tengah. Nilai bantuan tiap titik sebesar Rp 10 juta rupiah. Jadi kalau jumlah desa ada 8.000-an, maka Pemprov Jateng mengalokasikan bantuan RTLH setiap tahun sekitar Rp 240 miliar. Anggaran ini sudah berjalan dan dalam draf RPJMD tetap dialokasikan.

Nah, yang belum tersentuh adalah kewajiban negara hadir atas problem ekstrim perumahan. Banyak warga kita memiliki keterbatasan dan ketidakberdayaan untuk pengadaan ‘papan’ ini. Pemerintah wajib menyiapkan tempat dan rumah untuk rakyat yang betul-betul tidak mampu atau masuk kelompok miskin krusial. Kita perlu secara bertahap masuk dengan skema program

backlog hunian sebagai solusi problem penyediaan papan.

Apa itu *backlog*? *Backlog* adalah selisih antara kebutuhan dan persediaan rumah, linier dengan selisih jumlah keluarga dan rumah yang tersedia. Secara data, kekurangan kebutuhan atau *backlog* perumahan bagi masyarakat di Jawa Tengah masih cukup tinggi, baik dari sisi kepemilikan maupun kepenghunian. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah mencatat *backlog* mencapai 705.000 unit rumah dari aspek kepemilikan, sedangkan 503.000 unit dari sisi hunian. Fakta lapangannya bisa jauh lebih besar dari angka itu. Untuk itu, saatnya intervensi program langsung kita sasarkan untuk pengadaan rumah. Pemprov Jawa Tengah saatnya masuk melakukan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sehingga jumlah *backlog* perumahan bisa berkurang.

Hadi Santoso (anggota Pansus RPJMD dari FPKS) memberikan penegasan dukungannya atas solusi baru ini. Ia menyampaikan "pemerintah provinsi tidak bisa lepas tangan dari peran serta menangani dan mengintervensi problem ketidaktersediaan perumahan rakyat ini. Pemerintah tidak boleh hanya merehab, tetapi juga harus membangun rumah baru bagi rakyat dengan kategori miskin ekstrim. Tanpa intervensi pemerintah, mereka selamanya tidak akan mampu mewujudkan kebutuhan dasarnya atas papan", tandas Hadi dalam kesempatan rapat pensus.

Setelah mempertimbangkan berbagai aspeknya, akhirnya usulan skema backlog perumahan ini disepakati bersama. Awalnya, kami mengusulkan intervensi pertahun sebesar 30 miliran dengan asumsi 1000 titik rumah baru yang akan dibangun dengan alokasi 30jt/rumah (berdasarkan indek terendahnya). Akan tetapi, pemerintah provinsi keberatan dengan angka itu. Akhirnya muncullah kesepakatan alokasi 300 titik rumah/tahun dengan anggaran 9 miliar/tahun selama 5 tahun (45 miliar). Tapi syaratnya, penerima adalah warga miskin ekstrim dan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Dan kedua, penerima memiliki lahan atau tanah hak milik. Mereka akan dibuatkan rumah sederhana yang seluruh biayanya ditanggung oleh Pemprov.



Rapat pansus RPJMD tentang backlog hunian (foto dok abdul aziz)

MENGURANGI ANGKA BACKLOG

Dalam realisasinya, pemerintah provinsi kemudian mengemas program ini dengan slogan “*tuku lemah oleh omah*”. Dalam keterangannya, Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jateng Nova Adiwianto menyampaikan, “Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya mengurangi angka selisih antara kebutuhan dan persediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (*backlog*) melalui beberapa program dengan menggandeng berbagai pihak. “Banyak ikhtiar yang telah dilakukan Pemprov untuk menyediakan rumah layak huni bagi warganya di antaranya program pembangunan rumah sederhana sehat untuk warga miskin, dan Program *Tuku Lemah Oleh Omah* bagi masyarakat miskin berpenghasilan kurang dari Rp 3 juta, yang tidak mampu mengakses perbankan,” (Antara, 11/08/2023).

“Pada 2022 sudah ada 639 unit rumah yang terbangun melalui Program *Tuku Lemah Oleh Omah* yang digagas Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Sedangkan pada 2023 sekitar 615 unit rumah akan dibangun. Selain itu, Pemprov Jateng bekerja sama dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP. Tapera), Forkom Asosiasi Pengembang Perumahan, dan Bank BTN menggelar Jateng Tapera Expo 2023. Menurut dia, Jateng Tapera Expo 2023 juga menjadi upaya Pemprov Jateng untuk memberikan informasi untuk masyarakat berpenghasilan rendah, untuk mengakses kepemilikan rumah sederhana sehat bersubsidi”, lanjutnya.

Para pengembang dan perbankan diharapkan aktif memberi peluang bagi masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah sendiri yang sehat. Selain itu, juga menjadi upaya pemerintah untuk mengurangi *backlog* rumah di Jateng. “Ini merupakan bentuk dukungan agar permasalahan *backlog* perumahan angkanya semakin mengecil,” ujar Nova.

Ketua Forum Komunikasi Developer Jateng Andi Kurniawan mengungkapkan, *backlog* perumahan di Jawa Tengah mencapai 16 ribuan. Sedangkan secara nasional angkanya mencapai 12,1 juta. Angka tersebut terus bertambah 700-800 ribu setiap tahunnya. “*Backlog* di Jateng disebabkan karena banyak hal. Antara lain developer lebih susah mencari tanah yang representatif, dan daya beli masyarakat yang turun setelah pandemi,” kata Andi Kurniawan saat acara *Ngobrol Bareng Ngomongin Rumah Murah untuk Rakyat Bersama Gubernur Jawa Tengah* di Hotel Ciputra Semarang.

Acara tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Perumahan Nasional dan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah ke-78. Hadir Direktur Jenderal Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna, Komisioner BP Tapera Adi Setianto, Direktur Rumah Umum dan Komersialisasi Kementerian PUPR Fitrah Nur, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Jateng Sujarwanto Dwiatmoko dan Ketua Forum Komunikasi Developer Jateng Andi Kurniawan (*Tribun Jateng*, 11/8/2023).

STRATEGI KEBIJAKAN

Direktur Rumah Umum dan Komersialisasi Kementerian PUPR Fitrah Nur mengatakan, "Provinsi Jawa Tengah menempati urutan lima besar angka *backlog* perumahan secara nasional. Selain menyiapkan konsep kredit pemilikan rumah, diperlukan peran serta pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat menekan angka *backlog*. "Dengan dikeroyok dan intervensi dari berbagai pihak, maka akan mempercepat penanganan problem backlog perumahan ini", imbuhnya.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Jateng Sujarwanto Dwiatmoko mengatakan, "pemprov Jawa Tengah selain memiliki program 'tuku lemah entuk omah', juga tetap melanjutkan program-program lain yang selama ini telah berjalan. Beberapa program itu antara lain *Jateng Gayeng Ndandani Omah Bareng*, yaitu peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) dan rehabilitasi rumah korban bencana dengan kerusakan ringan. Kemudian ada juga program *Tuku Lemah Sak Omahe* yakni Kredit mikro pembiayaan rumah untuk masyarakat tidak mampu, dengan target warga tidak mampu sampai masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kepala Dinas Permukiman Provinsi Jawa Tengah Arief Djatmiko mengatakan, program inovasi bangun rumah layak huni melalui bantuan sosial dan Simperum diwujudkan dalam dua program. Yakni *Jateng Gayeng Mbangun Omah Bareng* dan *Tuku Lemah Oleh Omah*, yang dilakukan dengan memfasilitasi pembelian tanah melalui kredit mikro BPR BKK Jawa Tengah. Fasilitasi

juga diberikan untuk pembentukan kelompok masyarakat guna penyiapan pembangunan rumah. Selain itu, ada fasilitasi pembangunan rumah melalui bantuan sosial stimulan rumah sederhana sehat, dengan bantuan senilai Rp.35 juta, berupa struktur ruspin (Rumah Unggul Sistem Panel Instan) dan arsitektural. “Tujuan program itu adalah mengurangi angka *backlog* rumah di Provinsi Jawa Tengah dengan sasaran masyarakat miskin non-*bankable* yang tidak memiliki rumah,” paparnya.



Gubernur Ganjar Pranowo meninjau lokasi pembangunan rumah program Tuku Lemah Oleh Omah di Kampung Tulung, Kota Magelang. (Foto: Rofik Syarif/Radar Magelang)

LOKASI PEMBELAJARAN NASIONAL

Akibat langkah-langkah penanganan perumahan ini, Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 ditunjuk Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menjadi lokasi pembelajaran nasional

bidang perumahan dan kawasan permukiman. Ini karena, Pemprov Jateng mempunyai inovasi bangun rumah melalui bantuan sosial dan Sistem Informasi Perumahan (Simperum). Direktur Perumahan dan Permukiman Kementerian PPN/ Bappenas Tri Dewi Virgilyanti mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Pemprov Jateng. Untuk itu, ia mengajak pemprov lain agar dapat belajar dari Jawa Tengah, terkait program pengadaan rumah bagi warga kurang mampu.

Menurut Tri Dewi, setidaknya ada lima hal utama yang bisa dipelajari dari Jawa Tengah terkait tata kelola perumahan permukiman. Yaitu praktik tata kelola kolaboratif, pemenuhan hak bermukim, praktik siklus tata penyelenggaraan perumahan dan permukiman, serta inovasi *branding* program. “Jateng punya *branding* program *Jateng Gayeng Mbangun Omah Bareng, Tuku Lemah Oleh Omah*. Itu inovatif dan inspiratif, karenanya pembelajaran dilaksanakan di sini,” ujarnya (*jatengprov.go.id*, 27/20/2021).



Para peserta horizontal learning belajar penanganan backlog perumahan di Kampung Tulung Kota Magelang. (Foto: jatengprov.go.id)

Dikatakan, target pembangunan perumahan dan permukiman pada 2024 sebesar 70 persen, sesuai mandat RPJMN 2020-2024. Hingga 2020 capaian pembangunan baru menyentuh 59,54 persen dari target. Guna memperkecil kesenjangan target, Kementerian PPN/Bapenas melakukan empat langkah penting. Yakni, fasilitasi penyusunan strategi program, perumusan program unggulan, internalisasi indikator dan program unggulan, serta modeling program unggulan perumahan.

{

— 100 MILIAR UNTUK DESA WISATA —

Sejak saya dilantik menjadi legislator di gedung DPRD Jawa Tengah, saya sengaja mengganti motto di profil akun facebook saya (fb@abdolaziz). Saya menulis motto “Jateng Setara”. Sebuah motto yang mengekspresikan harapan agar Jawa Tengah setara dengan provinsi-provinsi tetangganya; Yogyakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat.

Di sektor pariwisata, tantangan kesetaraan muncul karena tertinggalnya pengembangan infrastruktur pariwisata di Jawa Tengah dibanding dengan provinsi tetangga. Potensi pariwisata Jawa Tengah sangatlah besar, yang tidak kalah jika dibanding provinsi tetangga. Namun Jawa Tengah nampak nyata ketertinggalannya. Beberapa indikator yang menunjukkan ketertinggalan itu antara lain, 1) Jumlah Wisatawan: Pada tahun 2017, Jawa Tengah dikunjungi oleh 21,1 juta wisatawan (dalam maupun mancanegara), sedangkan Yogyakarta dikunjungi oleh 24 juta wisatawan dan Jawa Timur dikunjungi oleh 29,2 juta wisatawan. 2) Pendapatan Pariwisata: Pada tahun 2017, pendapatan pariwisata Jawa Tengah sebesar Rp 10,8 triliun, sedangkan Yogyakarta sebesar Rp 12,6 triliun dan Jawa Timur sebesar Rp 21,1 triliun.

Dari kacamata kalangan luas masyarakat, mereka secara mudah sering membuat perbandingan. Jika di

Jawa Timur sudah memiliki Jatim Park' 1, 2, 3 dan 4. Sementara di Jateng, sampai kini rencana pembangunan 'Jateng park' tak kunjung terwujud. Oleh karena itu, inilah saatnya kita serius mengembangkan pariwisata Jawa Tengah. Saatnya pariwisata betul-betul kita jadikan sektor unggulan dan prioritas.

OPSI BERBEDA

Saat menggawangi ketua panitia khusus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Pansus RPJMD) 2018-2023 DPRD Provinsi Jawa Tengah, opsi berbeda saya sampaikan saat pembahasan. Untuk mengejar ketertinggalan, kita harus punya ide dan strategi lain. Jika kita tidak bisa mengejar Jawa Timur dengan membangun destinasi-destinasi wisata besar yang prestisius, maka kita bisa mensetarai Jawa Timur dan Yogyakarta dengan membangun destinasi wisata berbasis desa-desa potensial pariwisata. Kita perkaya Jawa Tengah dengan beragam wisata potensial yang tersebar di seluruh desa-desa.

Singkatnya, kita mengepung dari desa-desa. Kita membangun desa-desa wisata dalam jumlah yang sangat banyak. Kita kembangkan potensi-potensi wisata unggulan yang sudah ada di desa, dengan intervensi anggaran yang konkret dan besar, yakni Rp 1 miliar per desa. Berapa jumlah desa wisata yang kita targetkan? lewat rapat-rapat intensif, Pansus RPJMD akhirnya memutuskan target 100 desa pertahun. Dengan 100 desa wisata yang kita support dengan anggaran Rp 1 miliar/desa, maka dalam jangka waktu lima tahun, akan

muncul 500 desa wisata baru sebagai destinasi wisata unggul di Jawa Tengah.



Rapat pembahasan Pansus RPJMD DPRD Jawa Tengah soal pariwisata (foto dok abdul aziz)

INKONSISTENSI

Dalam realisasinya, inkonsistensi kembali terjadi. Keputusan final pembahasan APBD 2019 mengoreksi platform kebijakan sektor pariwisata dalam RPJMD . Memang benar, setiap tahun Pemerintah Provinsi akhirnya tetap mengalokasikan anggaran untuk 100 desa wisata/tahun. Namun jumlahnya tidak Rp 1 miliar per desa sehingga totalnya Rp 100 miliar per tahun sebagaimana amanat RPJMD. Yang memperoleh alokasi anggaran Rp 1 miliar cuma lima desa, kemudian lima desa lagi menerima alokasi Rp 500 juta, sedang sisanya 90 desa hanya mendapat jatah Rp 100 juta perdesa. Siasat ini mirip dengan realisasi Bosda untuk sekolah swasta, yang

diakali dengan klasifikasi akreditasi A, B dan C. Sedang untuk desa wisata ini diakali dalam tiga cluster: Rp 1 miliar, Rp 500 juta, dan Rp 100 juta.

Begitulah eksekutif menyiasati realisasi anggaran untuk sebuah kebijakan yang telah diputuskan. Selalu ada alasan yang mereka sampaikan untuk menjelaskannya. Tidak ada komitmen baik untuk menghormati apa yang telah disepakati bersama dalam dokumen RPJMD. Saya membayangkan, seandainya komitmen itu tetap dijalankan, maka setiap tahun ada alokasi anggaran 100 miliar untuk 100 desa wisata potensial. Dengan asumsi untuk 35 kabupaten/kota, maka setiap kabupaten/kota bisa mendapat alokasi tiga desa wisata/tahun. Selama lima tahun, setiap kabupaten/kota akan punya tambahan sekitar 15 desa wisata baru. Pilihannya bisa juga memperkuat desa prioritas yang telah dipilih. Sehingga pembangunan infrastruktur pariwisatanya dapat betul-betul dituntaskan. Namun sekali lagi sayang.

Di Kabupaten Pemalang, salah satu desa wisata yang memperoleh anggaran Rp 1 miliar pada tahun 2022 adalah Desa Sikasur, Kecamatan Belik. Anggaran tersebut digunakan untuk membangun sejumlah sarana dan prasarana hingga perbaikan jalan akses menuju tempat wisata. Bantuan Rp 1 miliar diberikan langsung secara simbolis oleh Gubernur Jawa Tengah (2/8/2022). Tempat wisata yang menjadi prioritas pengembangan di Belik, yakni Telaga Silating dan Curug Bengkawah. Kedua tempat wisata ini digadang-gadang akan menjadi destinasi wisata unggulan, karena ada air terjun curug

Bengkawah, geologi batuannya sangat khas, sehingga bisa untuk riset dan arung jeram.

TARGET TERCAPAI

Kepala Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah Riyadi Kurniawan menyatakan jumlah desa wisata di Jateng mengalami peningkatan selama tahun 2022. Angka tahun ini naik berjumlah 818 desa wisata dibandingkan dengan jumlah desa wisata tahun 2021 sejumlah 717 desa. Sebanyak 609 desa wisata itu sudah melaporkan kriteria sedangkan 209 desa wisata belum melaporkan kriteria. Dari 609 yang melaporkan kriteria dengan rincian untuk desa wisata rintisan ada 409, yang berkembang ada 110,” ujarnya (joglo jateng.com, 28/11/2022).

Perlu diketahui, desa wisata memiliki kriteria diantaranya desa wisata rintisan, maju, berkembang dan mandiri. Riyadi menjelaskan bahwa target RPJMD di Provinsi Jawa Tengah sudah terpenuhi hingga tahun 2023. Pada tahun 2019 baru ada 147 desa wisata, sedangkan target sampai 2023 ada penambahan 500 desa wisata. Sedangkan posisi tahun 2022 sudah di angka 818 desa. Kabupaten/kota di Jateng yang memiliki desa wisata terbanyak adalah Kabupaten Semarang yang memiliki 72 desa wisata. Dia berharap kesejahteraan masyarakat desa meningkat melalui pengembangan pariwisata. “Adanya desa wisata bisa membuka lapangan pekerjaan di desa sehingga masyarakat desa tidak perlu melakukan urbanisasi ke kota,” harapnya.

DESA WISATA TERBAIK

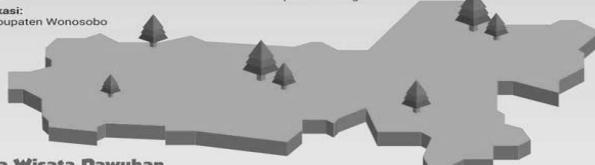
Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah telah mengumumkan daftar desa wisata yang masuk 10 besar desa wisata terbaik dalam Gelar Desa Wisata Jawa Tengah 2022 pada Senin (14/11/2022). Nominator desa wisata melakukan pameran dengan menampilkan produk-produk lokal. Selama pameran berlangsung, penilaian dilakukan sampai akhirnya terpilih desa wisata terbaik untuk kategori paket wisata, atraksi seni budaya, sapta pesona dan CHSE, homestay dan toilet bersih.

Sepuluh besar Desa Wisata di ajang Gelar Desa Wisata Jawa Tengah 2022 adalah Desa Wisata Guyanti (Wonosobo), Desa Wisata Kandri (Kota Semarang), Desa Wisata Conto (Wonogiri), Desa Wisata Dawuhan (Banjarnegara), Desa Wisata Muncar (Kabupaten Semarang), Desa Wisata Sambongrejo (Blora), Desa Wisata Somongari (Purworejo), Desa Wisata Karangrejo (Magelang), Desa Wisata Pekunden (Banyumas) dan Desa Wisata Sidowarno (Klaten).[]

10 Desa Wisata Terbaik di Jateng

1 Desa Wisata Guyanti

- Prestasi:
Juara Seni dan Budaya
- Letas:
Antara lereng Gunung Sumbing dan Sindoro dengan ketinggian 700 meter di atas permukaan laut.
- Lokasi:
Kabupaten Wonosobo



2 Desa Wisata Conto

- Prestasi:
Juara Sapta Pesona dan Candi
- Lokasi:
Sisi selatan lereng Gunung Lawu di Desa Conto, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri.

4 Desa Wisata Dawuhan

- Prestasi:
Harapan 2 Ajang Desa Wisata Jateng 2022
- Lokasi:
Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara
- Fasilitas:
Wahana permainan tubing, kolam renang, arena bermain dan outbond, serta pemandangan lembah berhias ratusan kelok pemotongan sawah.

5 Desa Wisata Karangrejo

- Prestasi:
Juara Homestay dan Toilet Bersih
- Lokasi:
Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang
- Fasilitas:
Pukul Puntuk Setumbu, keliling desa dengan VW, homestay kelas dunia.

6 Desa Wisata Muncar

- Prestasi:
Harapan 2 Ajang Desa Wisata Jateng 2022
- Prestasi:
Juara 2 Ajang Desa Wisata Jateng 2022
- Lokasi:
Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang

3 Desa Wisata Kandri

- Prestasi:
Juara Paket Wisata
- Lokasi:
Desa Kandri, Kecamatan Gunungkidul, Kota Semarang

7 Desa Wisata Sambongrejo

- Prestasi:
Juara 3 Ajang Desa Wisata Jateng 2022
- Lokasi:
Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora
- Fasilitas:
Famtrip sedulur sikep (Samin)

8 Desa Wisata Sidowarno

- Prestasi:
Harapan 1 Ajang Desa Wisata Jateng 2022
- Lokasi:
Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten
- Fasilitas:
turi wisata dan menyaksikan pembuatan kulit untuk wayang.

9 Desa Wisata Somongari

- Prestasi:
Harapan 3 Ajang Desa Wisata Jateng 2022
- Lokasi:
Klepuh, Pandanrejo, Kaligesing, Kabupaten Purworejo
- Fasilitas:
Berbagai destinasi wisata dan atraksi budaya

10 Desa Wisata Pekunden

- Prestasi:
Juara I Ajang Desa Wisata Jateng 2022
- Lokasi:
Pekunden, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas
- Daya Tarik:
Sentra pembuatan nopia, peyek, dan mendoan; kebun buah naga, dan pembuatan batik.

Sumber: Instagram dipenjaringanpramita, @soloposdotcom, @koransolopos, www.solopos.com

Data 10 desa wisata terbaik jateng th 2022

10

— THE END OF PLTU BATUBARA —

Saya menyentil teman-teman aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) yang saat itu lagi ngobrol santai di ruang Komisi D DPRD Jawa Tengah. Mereka membincangkan pro-kontra pertambangan di Pegunungan Kendeng dalam pembahasan perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Tengah Tahun 2009-2029. Tambang di pegunungan Kendeng memang telah lama mereka tolak. Isu itu terutama mencuat saat rencana pembangunan pabrik Semen beberapa tahun sebelumnya di pegunungan kendeng.

“Kalian itu jangan fokus soal Gunung Kendeng saja”, kata saya. “Soal-soal krusial yang kita sorot di RTRW itu banyak. Kenapa kalian tidak mengkritisi rencana penambahan PLTU batubara ? Memangnya kalian setuju”, ketusku. “Ini lho drafnya, silahkan dibaca,” imbuhku sambil meletakkan sebendel berkas revisi perda RTRW khususnya pasal tentang locus untuk pembangkit listrik tenaga uap berbasis batubara yang diajukan Pemerintah. Mereka pun seketika membaca berkas itu. Mereka terkesiap, tersadar lalu berkomentar, “iya, penting banget ini. Kenapa mau nambah PLTU batubara lagi ? Bukankah saat ini Jawa Tengah sudah surplus energi listrik” ?

PLTU batubara memang menjadi salah satu isu krusial dalam pembahasan pansus DPRD Jawa Tengah untuk revisi Perda RTRW Jateng 2009-2029. Sebagai pemegang palu kepemimpinan Pansus, saya merasa punya tanggung jawab penting atas segala keputusan yang akan diambil. Saya lalu melibatkan teman-teman Walhi, yang kebetulan waktu itu sering mengajak diskusi tentang kasus Pegunungan Kendeng. Walhi menyajikan catatan kritisnya atas soal ini. Menurut data, Jawa Tengah sudah tidak butuh lagi tambahan PLTU baru mengingat kondisi stok listrik di Jateng yang masuk sistem jaringan listrik regional Jawa-Bali sudah surplus atau over capacity mencapai 33 persen atau sekitar 8.000 megawatt. Bahkan Jateng menyuplai kebutuhan energi untuk DKI Jakarta dan Jawa Barat. Makanya kita mempertanyakan, “Mengapa masih diusulkan tambahan PLTU lagi ? Enam titik lagi” ? tandas ku.

Pemerintah Provinsi beralasan, kita sudah menghitung proyeksi pertumbuhan kebutuhan energi dalam jangka waktu yang panjang. Kita berhitung dengan jumlah populasi penduduk yang terus meningkat. Seiring itu, pemerintah pusat juga punya target melakukan akselerasi target pertumbuhan ekonomi khususnya di Jawa Tengah, dan umumnya pulau Jawa”, demikian disampaikan Ir. Teguh Dwi Paryono kepala ESDM Jawa Tengah saat pembahasan.

SEMUA PLTU BARU DITOLAK

Visi besar “Jateng yang berdaya saing, sejahtera dan **lestari**” adalah poin penting yang melatari perdebatan

yang muncul seputar isu ini. Konsep peruntukan ruang untuk sistem jaringan sumber daya energi di Jateng harus tegas dalam menyikapi dua kepentingan sekaligus yang selalu berbeda satu sama lain. Di satu sisi Jateng ingin mewujudkan daya saing sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang kuat. Pada sisi lain Jateng harus tetap memperhatikan aspek krisis lingkungan hidup yang terus mengancam.

Penyediaan fasilitas atau sarana prasarana sistem energi, menjadi titik krusial perdebatan. Energi itu bermacam-macam. Ada energi yang berbasis air, udara, tenaga surya, batubara dan lain sebagainya. Untuk energi berbasis batubara, Pemerintah Provinsi dalam rancangan revisi RTRW mengusulkan penambahan enam titik (locus) baru untuk pembangunan PLTU batubara di Jawa Tengah. Enam titik tersebut berlokasi di Demak, Kota Semarang, Kendal, Pekalongan, Pemalang dan Brebes. Sementara PLTU batubara ‘eksisting’ berada di empat daerah, yaitu Kabupaten Rembang, Jepara, Batang dan Cilacap.

Setelah Pansus RTRW dan Pemprov berdebat panjang, Pemprov akhirnya menerima keberatan Pansus. Pemprov diwakili Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Jateng Teguh Dwi Paryono menyetujui pembatalan lima locus baru PLTU Batubara yakni Semarang, Demak, Kendal, Pekalongan dan Brebes. Sedangkan Pemalang waktu itu masih dipertimbangkan mengingat lokasi di Pemalang sudah berjalan proses pembebasan lahannya, yang saat itu disiapkan menjadi alternatif seandainya pembangunan PLTU Batang gagal.

PLTU Batang sendiri sudah ‘on process’ tapi masih mengalami penolakan dan pro-kontra di tengah masyarakat. Namun di akhir kerja Pansus, lewat negosiasi kecil saya dengan pak Teguh (kadir ESDM), Pansus dan Pemprov akhirnya menyepakati lokasi Pemalang juga dihilangkan.

Alhamdulillah, akhirnya tak satupun locus baru untuk PLTU batubara disetujui dalam revisi RTRW Jateng. Meski PLTU merupakan proyek nasional dari PLN, namun perihal penataan ruang merupakan kewenangan Pemerintahan Provinsi, dalam hal ini DPRD dan Pemprov Jateng. Pemerintahan Provinsi yang berhak menentukan locus-locus peruntukan tata ruangnya, termasuk apakah PLTU batubara bisa dibangun lagi di Jateng atau tidak. Karena dipandang penambahan PLTU baru tidak relevan maka Pansus RTRW menolak semua usulan penambahan baru PLTU batubara.



*Rapat pansus RTRW memutuskan nasib PLTU batubara
(foto Humas DPRD Jateng)*

Lokasi pembangunan PLTU batubara yang selalu berada di wilayah pesisir pantai juga menjadi argumen yang saya sodorkan. Banyak nelayan akan mengalami gangguan mata pencaharian akibat keberadaan pembangunan PLTU baru di wilayahnya. Pencemaran dan kerusakan lingkungan pesisir akan menjadi ancaman serius akibat pembuangan limbah air panas dan pembangunan jetty sebagian bagian dari PLTU batubara. Rusaknya ekosistem pesisir dan laut seperti terumbu karang, mangrove dan habitat ikan bisa dipastikan akan terjadi secara massif yang merugikan kehidupan sekitar.

Energi bersih atau ‘green energi’ juga menjadi isu penting yang melatari penolakan kami. Seperti kita tahu, pemanasan global telah menjadi ancaman serius yang nyata di depan mata. Masa depan bumi telah menjadi bahan kajian penting banyak negara seiring perubahan iklim dan suhu yang semakin panas. Kekeringan muncul dimana-mana sehingga mengancam ketahanan pangan umat manusia. Banyak negara telah dengan serius mengantisipasi tantangan ini. Salah satu langkah kongkritnya adalah menaikkan target energi hijaunya dengan menutup operasional PLTU batubaranya secara bertahap.

Pemerintah Pusat sesungguhnya telah mencoba bergerak di jalur yang diharapkan. Dalam dokumen Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), telah ditetapkan target bauran energi sebesar sebesar 23 % tahun 2024 dan 31 % tahun 2050. Sementara sekarang, berdasar data Dewan Energi Nasional (DEN), bauran energi primer nasional tahun 2019 baru sebesar 37,15

persen dari batu bara, 33,58 persen dari minyak bumi, 20,13 persen dari gas bumi, dan 9,15 persen dari EBT. Ini tentu memerlukan kerja keras lagi untuk mewujudkannya. Bagi saya, penolakan locus baru PLTU berbasis batubara dalam dokumen RTRW jateng ini merupakan langkah konkret dan konsisten untuk menuju target tersebut.

IKLH JATENG

Secara lebih makro saya melanjutkan argumentasi dengan mengaitkan isu ini dengan target capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Jawa Tengah. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ada 4 faktor yang dinilai dalam IKLH, yaitu (a) Indeks Kualitas Air (IKA) yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, pH, DO, BOD, COD, Total Fosfat, NO₃, dan Fecal Coli; (b) Indeks Kualitas Udara (IKU), yang diukur berdasarkan parameter SO₂ dan NO₂; (c) Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang diukur berdasarkan kondisi tutupan hutan dan vegetasi non hutan, serta dipengaruhi oleh keberadaan kanal dan kejadian kebakaran jika berada di kawasan ekosistem gambut; dan (d) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yang diukur berdasarkan parameter TSS, DO, Minyak dan Lemak, Amonia Total, dan Orto-Fosfat.

Saat pembahasan pensus, posisi IKLH Jawa Tengah berada di angka 63,7 %, dalam posisi yang lebih rendah dibanding angka nasional. Penambahan PLTU

Batubara baru tentu akan semakin menaikkan polusi di wilayah udara Jawa Tengah. Polusi udara sudah menjadi masalah dunia. Data menyebutkan polusi udara bertanggung jawab terhadap 4,1 juta kematian setiap tahun. Penyebabnya, sebanyak 7 dari 10 orang di dunia menghirup udara berpolusi setiap hari, tak terkecuali penduduk Indonesia. Sumber utama polutan antara lain berasal dari pembangkit listrik, petrokimia, kimia dan industri pupuk, serta pabrik industri lainnya. Sumber lain termasuk mobil, kereta api, sepeda motor, dan kendaraan lainnya. Ada pula sumber polutan yang berasal dari alam yang meliputi bencana seperti kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, badai debu, hingga pembakaran lahan. Sumber-sumber polutan tersebut bisa menyebabkan gangguan kesehatan, seperti penyakit paru-paru, asma, bronkopneumonia, jantung, batuk dll yang berakibat fatal pada kematian.

Rancangan kebijakan strategis proyeksi pemanfaatan ruang di Jawa Tengah yang nyaman untuk dihuni adalah Jawa Tengah yang memiliki IKLH berkualitas terbaik secara nasional. Dorongan ini menjadi alasan kenapa penolakan locus baru PLTU batubara akhirnya harus kami lakukan. Ini agar menjadi ‘trigger’ bagi langkah kebijakan-kebijakan strategis lainnya yang lebih berani dalam menghadapi tantangan krisis iklim yang sedang terjadi.



Sumber foto : Kompas, 15/08/2023.

Tantangan krisis iklim sangatlah nyata, dan ada di depan mata. Tahun 2021, Pertemuan Kepala-Kepala Negara G-20 di Bali membuktikan fakta nyata tantangan krisis iklim global yang sedang kita hadapi. Salah satu keputusan penting hasil KTT G20 adalah munculnya proyek besar “green energy”, yang secara bertahap akan mengikat seluruh negara agar menghapus PLTU batubaranya, untuk mengurangi risiko lubang ozon. Pasca G20, Majalah Tempo menyajikan laporan detail yang membedah proyek PLTU batubara di Indonesia. Terakhir, baru saja tahun kemarin (2023), kasus polusi udara di Jakarta menjadi berita yang menyesakkan posisi kita di dunia internasional. Banyak media asing menulis Jakarta sebagai kota paling tercemar di dunia. Kantor berita Reuters (berkantor pusat di London) menulis, menurut data perusahaan teknologi kualitas udara Swiss, IQAir, Jakarta secara konsisten menempati peringkat atas di

antara 10 kota paling tercemar secara global sejak Mei 2023. Sementara kantor berita AFP (berkantor pusat di Paris) membahas penyebabnya adalah kabut asap industri, kemacetan lalu lintas, dan pembangkit listrik tenaga batubara yang mempengaruhi kehidupan dan kesehatan mereka. Sementara Greenpeace Indonesia menyebut, 10 pembangkit listrik tenaga batubara beroperasi dalam radius 100 kilometer (62 mil) dari ibu kota. Pembangkit batubara ini menjadi menyumbang terpenting polusi udara di ibu kota.

Melihat fakta diatas, saya pun langsung memposting tulisan di salah satu akun media sosial saya. Saya menulis “dulu, empat tahun lalu, 5 titik rencana PLTU Batubara baru di Jawa Tengah kami tolak dalam struktur ruang peruntukan energi di revisi RTRW Jawa Tengah. Sekarang, kita dipaksa tergiur oleh dana besar dunia untuk menutup seluruh PLTU Batubara kita dengan tenggat akhir 2050”. {}



— SOAL ABRASI DAN AKRESI —

Peristiwa abrasi dan akresi juga menjadi tema serius yang memunculkan perdebatan panjang dalam panitia khusus Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang dan Wilayah (Pansus Raperda RTRW) tahun 2009-2029. Berdasarkan data Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2013 hingga 2017, telah terjadi abrasi dan akresi di sepanjang pesisir pantai utara dan selatan Jawa Tengah dalam jumlah angka yang cukup signifikan. Luasan abrasi mencapai sekira 7.957,89 hektar, sementara akresi mencapai sekitar 2.601,80 hektar.



Rapat pansus terkait Abrasi Pantai Jateng, 20/4/2018, (foto dok abdul Aziz).

Apa itu abrasi dan apa itu akresi ? Abrasi adalah proses pengikisan tanah di pesisir pantai akibat ombak dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasa juga disebut dengan erosi pantai. Umumnya abrasi disebabkan oleh gejala alam, namun tidak sedikit penyebabnya karena ulah manusia. Oleh sebab itu, apabila dibiarkan, abrasi akan terus mengikis bagian pantai dan air laut yang bisa menyebabkan bencana, seperti banjir di daerah sekitar pantai tersebut.

Sementara akresi pantai adalah perubahan garis pantai menuju laut lepas karena adanya proses sedimentasi dari daratan atau sungai menuju arah laut. Proses sedimentasi di daratan dapat disebabkan oleh pembukaan areal lahan, limpasan air tawar dengan volume yang besar karena hujan yang berkepanjangan dan proses transport sedimen dari badan sungai menuju laut. Akresi pantai juga dapat menyebabkan terjadi pendangkalan secara merata ke arah laut yang lambat laun akan membentuk suatu daratan berupa delta atau tanah timbul. Proses akresi pantai biasanya terjadi di perairan pantai yang banyak memiliki muara sungai dan energi gelombang yang kecil serta daerah yang jarang terjadi badai.

Di Jawa Tengah, berdasarkan data di atas, mengalami kejadian abrasi cukup besar. Di Kota Semarang, dari penelitian antara 2015-2020, terjadi penurunan antara 0,9-6 sentimeter per tahun. Di Kota Pekalongan penurunan muka tanah terjadi antara 0-11 sentimeter. Penurunan tanah disertai peningkatan pasang laut ini akhirnya memicu abrasi di berbagai wilayah di

Jawa Tengah. Berdasarkan perhitungan resmi kantor BIG yang berkantor di Bogor, wilayah pesisir yang hilang karena dampak abrasi mencapai 7.957,89 hektar. Dari angka itu, Kabupaten Brebes tercatat sebagai daerah paling parah mencapai 2.391,95 hektar, disusul Demak 2.218,23 hektar dan Semarang 1.919,57 hektar.



Sebuah pemukiman di Kecamatan Sayung, Demak dikepung air laut (Foto: Detikcom).

Selain abrasi, Jawa Tengah juga mengalami penambahan daratan (akresi) dampak sedimentasi, mencapai 2.601,80 hektar. Sama dengan abrasi, Brebes juga tercatat sebagai daerah dengan tambahan daratan paling luas, sampai 850,74 hektar, disusul Demak 389,30 hektar dan Kendal seluas 382,95 hektar.

FAKTOR PENYEBAB

Pakar Geospasial Prof Dewayany Sutrisno mengatakan, ada banyak faktor kalau akhirnya pantura benar-benar tenggelam baik dari sisi antropogenik, perubahan iklim, hingga alih fungsi lahan. Terkait kenaikan muka laut, katanya, ada tiga tipe penyebab yang bisa dikenali. Pertama, akibat lapisan es mencair yang dipicu peningkatan suhu global. Kedua, sebagai akibat dari aktivitas tektonik. Ketiga, faktor relatif kondisi regional tertentu. Khusus pantura Jawa ini, lebih dominan karena unsur relative *sea level rise*, termasuk aktivitas manusia.

Untuk mencegah abrasi berlanjut, menurut Prof Dewayany, pemerintah dan berbagai pihak harus menempuh berbagai cara. Salah satunya, menetapkan geospasial ekosistem, misal, pakai kayu guna menangkap sedimen agar garis pantai kembali maju ke laut. "Jadi, langsung pada inti penyebabnya. Contoh badan panas, tidak cukup dengan memberi obat penurun panas. Bawa panas turun memang iya, tapi nanti pasti akan naik lagi karena tidak ke inti persoalan," katanya.

Direktur Pengairan dan Irigasi Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas Abdul Malik Sadat mengatakan, situasi Pantura Jawa sudah lama menjadi perhatian Bappenas. Hasil pengamatan Bappenas, perairan Jawa mengalami peningkatan 0,8 sentimeter per tahun, penurunan tanah banyak terjadi karena pembangunan di wilayah pesisir serta pengambilan air tanah berlebihan. Menurut Malik, ada beberapa skenario yang disiapkan bersama para ahli guna mencegah penurunan muka tanah (*land subsidence*) ini, misal, dengan mengurangi

penggunaan air tanah. Berdasarkan perhitungan, penghentian penggunaan air tanah 50% saja, diyakini mampu menekan laju *land subsidence* dari 2 cm menjadi 8 mm per tahun. (A.Asnawi/mongabay.co.id/11/12/2021)



Perahu nelayan melintas di sekitar rumah yang rusak dan ditinggalkan penghuninya akibat abrasi di pesisir Sayung, Demak.
(Foto ANTARA/Aji Setyawan)

HILANGNYA HAK ATAS TANAH

Dalam persoalan ini, saya selaku ketua Pansus secara khusus menyoroti tingginya kasus abrasi yang berpotensi konflik sosial serius jika dikaitkan dengan undang-undang Pokok Agraria (UUPA) nomor 24/1997. Pasal 27 UUPA mengatur hilangnya hak milik atas tanah akibat abrasi. Tanah yang berubah bentuk akibat peristiwa alam, maka hak atas tanahnya dinyatakan dihapus. Selanjutnya, tanah yang telah dihapus dikuasai negara,

untuk digunakan sepenuhnya kepentingan umum.

Kasus abrasi seluas 7.957,89 hektar tentu bukan angka kecil. Pemiliknya kebanyakan dari kalangan nelayan, petambak, atau umumnya rakyat kecil. Posisi kita jelas sangat berkepentingan membela mereka. Dan akhirnya, kita putuskan menolak menggunakan ‘landscape’ peta pesisir pantai berdasarkan data BIG tahun 2013. Artinya, ini berarti kita menyelamatkan 7.957,89 hektar tanah hak milik yang terkena abrasi.

Tidak mudah untuk menghasilkan keputusan tersebut. Proses yang kita lewati termasuk cukup berliku. Kita mendatangkan *stakeholder* yang terdampak. Kita ‘ngluruk’ (mendatangi) ke kantor pusat Badan Informasi Geospasial. Kita konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri. Tentu mereka yang terdampak ingin memperjuangkan hak miliknya, sementara BIG kita dorong untuk memperkuat konsideran kepastian hukumnya. Artinya data BIG tahun 2017 itu data yang didukung oleh sebuah lembaran surat keputusan yang sifatnya tidak hanya sekedar informatif. Namun disinilah repotnya, karena posisi BIG ternyata hanya memberikan data yang sifatnya informatif, bukan keputusan.

Selain soal pemihakan, ada aspek hukum yang juga kita pertimbangkan. Kalau kita gunakan data 2017, warga telah siap-siap melayangkan gugatan hukum. Dan kita kena getahnya nanti. Kita dianggap menghilangkan hak milik rakyat. Karena itu akhirnya, kita mengambil jalan pintas terakhir, yakni menolak data BIG tahun 2017. Kita kembali ke data eksisting BIG tahun 2013. Karena kita tidak mau menghilangkan hak milik atas tanah rakyat. {

— MEMPERTAHANKAN MANGROVE KITA —

Kali ini soal kawasan mangrove kita yang juga menyeruak dalam pembahasan panitia khusus DPRD Jawa Tengah untuk revisi Perda 6/2010 tentang RTRW Jawa Tengah Tahun 2009-2029. Sejak awal, pansus telah memutuskan bahwa luasan kawasan mangrove atau pesisir pantai berhutan bakau di Jawa Tengah adalah \pm 56.000 hektar. Luas tersebut merupakan luas eksisting yang kita pertahankan sebagai keputusan. Namun tiba-tiba, saat pansus RTRW dihidupkan kembali (Pansus Reborn), muncul draft baru untuk merubahnya.



*Ganjar Pranowo menanam Mangrove di pantai Mangunharjo
Semarang (foto : jatengprov.go.id)*

Tepatnya di Kabupaten Kendal dan Demak, muncul opsi untuk mengkonversi peruntukan kawasan lindung mangrove menjadi kawasan industri. Kebutuhan luasnya sekitar 2.500 hektar. Khusus di Kendal, alih fungsi itu tersebab adanya rencana pendirian pabrik baja di Kecamatan Patebon, tepatnya di kawasan mangrove sepanjang Pantai Patebon, yang nilai investasinya mencapai Rp. 35 triliun. Sementara di Demak, kepentingan yang sama muncul untuk mengakomodir investasi di kawasan tersebut.

MANGROVE BUKAN KAWASAN INDUSTRI

Payung hukum konversi lahan mangrove ini oleh pemerintah provinsi selalu dikaitkan dengan Peraturan Presiden (perpres) nomor 78/2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang dan Purwodadi (Kedung Sepur). Perpres ini ditetapkan pada tanggal 3 Agustus 2017 dan merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Kawasan kedungsepur adalah kawasan pertumbuhan inti untuk Jawa Tengah. Pemerintah pusat memiliki target Jawa Tengah mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi 7 % dalam lima tahun ke depan.

Perpres itu bertujuan agar pembangunan di kawasan kedungsepur terus digenjot dan akseleratif. Oleh sebab itu, langkah-langkah kongkrit untuk kawasan pusat pertumbuhan inti harus terus diwujudkan. Investasi skala besar tidak boleh terganggu masuk di kawasan tersebut.



Konsultasi ke Kementerian ATR/BPN di Jakarta (foto dok abdul aziz)

Saat perdebatan terjadi, Hadi Santoso (anggota pansus) mencium gelagat tidak sedap dalam usulan tersebut. Kenapa usulan ini baru muncul sekarang ? Kalau pabrik baja itu telah lama direncanakan (menurut keterangan sejak tahun 2014), kenapa perpres 78/2017 masih berbunyi kawasan mangrove ? Kalo memang sudah ada petunjuk rencana investasi pabrik baja, kenapa tidak dimunculkan saat draf awal Pansus, tidak malah baru keluar saat Pansus dihidupkan kembali (reborn) ? Ini

bukti kecerobohan perencanaan yang sangat patut disayangkan.

Rapat pun berjalan alot terkait poin dalam pasal ini. Saat konsultasi, Pemerintah Pusat memunculkan opsi atas pro-kontra yang terjadi. Opsinya adalah perencanaan alih fungsi kawasan hutan bakau di kendal diberlakukan sebagai ‘holding zone’. Dalam istilah tata ruang, kebijakan ‘holding zone’ merupakan kebijakan penetapan kawasan dalam tata ruang yang belum dibebankan izin pemanfaatan sebelum ada payung hukum yang jelas. Ini bersifat sementara sebelum perpres 78/2017 dirubah menjadi lebih jelas mengatur alih fungsi kawasan konservasi mangrove tersebut.

Meski sudah muncul opsi baru dalam bentuk kebijakan ‘holding zone’, kami tetap menolaknya. Perubahan peruntukan kawasan konservasi mangrove untuk industri termasuk isu serius sektor lingkungan dimana posisi saya sebagai ketua Pansus jelas. Konon, eksistingnya sudah tidak mangrove, hanya rawa-rawa, tidak ada mangrovenya. Konon kawasan mangrove itu sudah dibebaskan oleh investor. Saya jelas tidak mau terkecoh dengan alasan itu. Kalau kawasan lindung ya lindung. Kalau mau industri ya cari kawasan lain yang tidak lindung. Makanya keputusan saya sebagai ketua Pansus tetap menolak perubahan peruntukan dari kawasan lindung mangrove menjadi kawasan industri.

EVALUASI KEMENDAGRI

Pada saat konsultasi akhir menjelang paripurna kedua penetapan Perda revisi RTRW (setelah pensus

reborn), kami diterima langsung oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri di ruangan khususnya. Waktu itu ada saya, Prof. Sri Puryono (Sekda Provinsi), dan Pak Dirjen. Pak Dirjen melobi, "Nanti keputusannya yang itu saja ya, sesuai Perpres". Saya jawab, "pak Dirjen, yang jelas tugas saya sudah selesai. Pansus sudah mengambil keputusan dalam rapat-rapatnya. Biarkan ini jalan sesuai keputusan. Kalo memang nanti mau dirubah lewat kewenangan 'evaluasi', ya silahkan. Itu sudah diluar ranah kami.

Memang lobi Dirjen ini sebelum digedok di rapat paripurna. Rapat Pansus sudah memutuskan menolak, tinggal pengesahan di paripurna. Nah di sela-sela itu, saya dipanggil oleh Dirjen. Tapi gimana lagi, memang dalam ketentuan proses penyusunan perda itu, Kemendagri punya kewenangan evaluasi. Jadi kalau Kemendagri memutuskan berbeda ya memang itu kewenangannya yang dibolehkan peraturan perundangan. Dan keputusan final itu ada di forum evaluasi atas perda-perda pemerintah daerah. Kalau evaluasi Kemendagri bilang A, ya keputusan akhirnya A. Jadi akhirnya, Raperda RTRW diminta menyesuaikan hasil evaluasi Kemendagri.]

— PEGUNUNGAN KENDENG NIRTAMBANG —

Gunretno berorasi membakar semangat puluhan orang yang menamakan diri Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) di depan Kantor Gubernur dan DPRD Jawa Tengah, Semarang (10/10/2018). Sambil mengepalkan tangan ke angkasa, Gunretno berapi-api meneriakkan tuntutan-tuntutan di hadapan massa bertopi caping itu. “Selamatkan Kendeng!” “Tolak pabrik semen!”, “Kendeng lestari!” “Tolak tambang di Kendeng!”



*Demo JMPPK di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah
(foto : dok abdul aziz)*

Demonstrasi JMPPK itu berkaitan dengan proses pembahasan revisi Perda Nomor 6 /2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Tengah Tahun 2009- 2029. Gunretno yang memimpin JMPPK menuntut Pansus RTRW berpijak pada rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang disusun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Diantaranya, menghilangkan eksplorasi pertambangan di kawasan Pegunungan Kendeng. “Pemerintah Jawa Tengah dan beberapa kabupaten di sekitar Pegunungan Kendeng harus tunduk pada KLHS kementerian LH yang meniadakan pertambangan di Kendeng,” tegas Gunretno.

MENOLAK PRIORITAS PERTAMBANGAN

“Buka mata dan buka telinga”, itu guman saya saat menerima tuntutan mereka dalam demonstrasi itu. Kita pun akhirnya meloloskan keinginan teman-teman JMPP untuk menghentikan eksplorasi tambang besar-besaran di kawasan kendeng. Kawasan Pegunungan Kendeng berada di wilayah enam kabupaten, yaitu Rembang, Blora, Purwodadi, Juwana (Pati), Jepara, Kudus dan Pati, atau sering disingkat Banglor Wanarakuti. Di kawasan ini, termaktub di Pasal 17 ayat 3 huruf d dan e, muncul arahan prioritas pengembangan kawasan yang meliputi pertanian, industri, pariwisata, minyak-gas bumi, perikanan dan perdagangan barang/jasa dan pertambangan. Arahan prioritas pengembangan ini dimaksudkan sebagai pijakan bagi stakeholder untuk mengambil kebijakan pembangunan di kawasan tersebut.

Kawasan Banglor Wanarakuti merupakan zona ekonomi wilayah timur Jawa Tengah yang diharapkan menjadi simpul penting pertumbuhan ekonomi regional Jawa Tengah.



*Diskusi mengangkat tema Perda RTRW di UNIKA Sugiyopranoto
(foto dok abdul aziz)*

Namun, atas dasar visi ekologis di atas, maka Pansus memutuskan untuk **menghilangkan sektor ‘pertambangan’** sebagai sektor unggulan di wilayah Pengembangan Banglor-Wanarakuti. Dengan demikian, di wilayah pengembangan Banglor sektor unggulannya meliputi : pertanian, industri, pariwisata, minyak dan gas bumi serta perikanan. Adapun di wilayah Wanarakuti sektor unggulan yang akan dikembangkan meliputi: pertanian, industri, perdagangan dan jasa, dan perikanan.

Mengapa saya menolak pertambangan di Pegunungan Kendeng? Agar setelah pembatasan secara normatif dalam RTRW ini, muncul kebijakan ‘moratorium’ perizinan tambang (menghentikan sementara) di kawasan tersebut. Moratorium izin tambang sudah saatnya dilakukan di kawasan kendeng sebab berdasarkan data yang saya terima, telah muncul rencana ijin-ijin baru di kawasan tersebut. Izin-izin baru ini bekerja dibalik rencana pendirian pabrik-pabrik semen baru di Rembang dan Pati. Tidak tanggung-tanggung, setidaknya ada 4 rencana pabrik semen baru di kawasan tersebut. Sejauh ini penguasaan lahannya sudah jalan. Di Rembang ada PT. SIR (Semen Indonesia Rembang), PT. Bosowa, PT. GMM. Sementara di Pati ada PT. SMS (Sahabat Mulia Sakti) yang merupakan anak perusahaan PT. Indocement. Jika semua rencana izin pabrik semen baru ini diloloskan, maka kawasan pegunungan kendeng akan menjadi kawasan prioritas industri berbasis pertambangan. Nah, dampaknya tentu bisa dibayangkan, akan terjadi kerusakan lingkungan besar akibat eksploitasi yang terjadi secara besar-besaran.

Moratorium izin tambang berarti tidak boleh ada lagi izin tambang-tambang besar baru, demikian keputusan Pansus RTRW yang saya pimpin. Ternyata terbukti, ketika kami berkunjung ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta, kami diterima oleh kepala subdirektorat yang menangani soal-soal pertambangan. Kasubdit menyampaikan bahwa Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup sedang mengkaji permohonan izin pabrik semen di Rembang, Pati

dan Blora. Posisi Kementerian Lingkungan Hidup memang sering berlawanan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kementerian ESDM sudah oke, tapi Kementerian Lingkungan Hidup masih keberatan. Jadi konflik antar instansi pemerintah pun terjadi di tingkat pusat. Visi Kementerian Lingkungan Hidup itu peduli lingkungan, sementara visi Kementerian ESDM pro-industri. Kami yang berada di posisi regional mungkin berusaha ikut memberikan kontribusi untuk pembatasan. Di keputusan Pansus Perda RTRW ini kalau kita hilangkan prioritas pertambangan, harapannya ada jeda sejenak eksplorasi pertambangan”, demikian ungkap saya kepada Kasubdit.



Konsultasi di kementerian LH dan kehutanan RI (foto Humas DPRD Jateng)

Apa saja potensi pertambangan di Pegunungan Kendeng? Potensinya banyak. Semua turunan bahan baku tambang semen ada di situ. Apakah kita melarang usaha tambang di sini? Tidak. Kita hanya ingin melakukan

moratorium izin tambang. Dengan menghilangkan prioritas pertambangan, tujuannya agar ada jeda atau moratorium dalam jangka waktu tertentu. Itulah keputusan pensus yang telah dituangkan dalam pengesahan rapat paripurna.

Akan tetapi lagi-lagi, muncullah “pensus reborn”. Pensus RTRW yang dihidupkan kembali membuka peluang pembahasan ulang yang sengit atas isu-isu strategis lingkungan hidup yang kami perjuangkan. Saya tetap kekeh pada keputusan menolak prioritas pertambangan di kawasan pegunungan kendeng. Tapi kewenangan evaluasi kemendagri berpendapat dan memutuskan berbeda. Akhirnya prioritas pertambangan tetap muncul untuk kawasan pegunungan Kendeng. Kami kalah. []

— AGAIN, PANSUS RTRW JAWA TENGAH —

Undesirable, itulah secuil tulisan saya di status media sosial yang saya singgung dalam prolog di buku ini. Pada medio juni 2023, saat rapat pertama pansus baru tentang perda RTRW Jawa Tengah tahun 2024-2044, saya terpilih menjadi wakil ketua pansus. Tiba-tiba, keputusan itu dianulir 5 menit kemudian. Rapat digelar lagi dan saya siap hanya menjadi anggota saja. Ketua terpilihnya Alwin Basri dari Fraksi PDIP dan M. Sholeh dari Fraksi Golkar sebagai wakil ketua.

Undang-undang nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja dan PP nomor 21/2021 tentang penyelenggaraan Penataan ruang mewajibkan dilakukannya integrasi ruang darat dan ruang laut dalam satu rencana tata ruang wilayah. Pemerintah Jateng lalu mengajukan rancangan perda baru tata ruangnya. Perda RTRW Jateng nomor 16/2019 dan perda RZWP3K Jateng nomor 13/2018 diajukan untuk digabung menjadi satu perda RTRW Jateng. Tujuannya agar menjadi satu peta jalan ruang untuk pembangunan di Jawa Tengah.

Sebagai anggota, saya tidak patah arang. Ada agenda besar yang menantang untuk terus saya perjuangkan. Rancangan perda baru RTRW Jawa Tengah tahun 2024-2044 memiliki makna strategis dalam jangka panjang. Di medsos saya pun menulis :

3 Agustus 2024

“Tata Ruang Jateng untuk 20 tahun ke depan adalah pondasi penting untuk gagasan baru tata ruang Indonesia 100 tahun ke depan. ‘Senyampang’ pindahnya IBU KOTA NUSANTARA, maka saatnya pusat pertumbuhan mulai dirancang secara serius beralih ke luar Jawa”.

“Masa depan Jawa adalah pusat-pusat perkotaan yang nyaman dan jauh dari kebisingan, keterasingan dan manusia-manusia yang tercerabut dari akar sejarahnya. Masa depan Jawa Tengah bukan menuju kota megapolitan seperti Jakarta atau surabaya. Masa depan Jawa tengah adalah Jawa Tengah yang tetap “natural in the Njawani”.

“Maka saatnya tata ruang Jawa Tengah menjadi terobosan untuk konsep pengendalian atas segala aspeknya. Kendalikan laju pertumbuhan penduduk dan pemukiman. Kendalikan laju pertumbuhan industri dan kawasan bisnis. Kendalikan eksplorasi ruang sebab daya dukung dan daya tampungnya telah berlebihan (sebab krisis air, pangan dan energi dalam 100 tahun ke depan semakin mengancam)”.

Tulisan tersebut adalah refleksi awal sebelum saya terlibat melakukan pembahasan-pembahasan dalam pansus. Setelah pembahasan dimulai, isu-isu strategis yang dulu pernah mencuat saat revisi pansus RTRW

tahun 2018 kembali saya suarakan dengan lantang. Bagi saya, tata ruang adalah mozaik penting untuk menyiasati dan mengantisipasi tantangan masa depan. Sementara tantangan masa depan nampak semakin nyata seiring gelaran KTT (konferensi tingkat tinggi) dunia tentang perubahan iklim yang kebetulan diadakan di Bali, yakni KTT G20 Bali November 2022 dan KTT AIS Forum 2023.

TRANSKRIP NAJWA SHIHAB

Ini konsistensi sikap yang selalu saya jaga selama ini. Saat menjadi ketua pansus revisi RTRW Jateng tahun 2018, isu-isu strategis terkait perubahan iklim mewarnai berbagai keputusan pansus. Bahkan, keputusan terpentingnya muncul terkait hilangnya diktum ‘Jawa Tengah yang berdaya saing’ dalam pasal tentang tujuan RTRW Jawa Tengah. Sekarang, apalagi setelah mendengarkan catatan Najwa Shihab yang berjudul “2050, andai kita tidak melakukan apa-apa”, semangat saya semakin membara, meski hanya sebagai anggota..

Catatan Najwa Shihab transkrip nya berbunyi :

12 November 2021

2050, bayangkan, udara saja tidak berpihak kepada kita. Suhu memanas ekstrem. Sebagian orang terpaksa mendekam setiap hari di ruang ber-ac dengan handuk basah menyeka wajah. Mata terus berair dan kita hanya dapat tertidur setiap Subuh karena cuma itu waktu yang cukup sejuk. Di luar tembok rumah kita, peningkatan suhu menyebabkan kekeringan parah di banyak belahan

dunia. Hanya orang kaya yang bisa membayar air. Kran-kran di tempat publik dikunci. Hutan-hutan terbakar. Dua miliar orang berhadapan langsung dengan suhu yang bisa meroket sampai 60 derajat Celcius. Titik panas di mana tubuh manusia tak dapat bertahan lebih dari 6 jam.

2050, permukaan laut naik drastis menyebabkan badi ekstrim. Kota-kota pesisir tersapu pasang dan banjir menewaskan ribuan dan menggusur jutaan orang. Beberapa kota terpadat di dunia tenggelam termasuk Alexandria, Kairo, Mumbai, Shanghai, Bangkok dan tentu saja Jakarta. Orang-orang harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Setiap hari kita akan melihat foto rombongan keluarga mengarungi banjir. Yang agak beruntung bisa tetap tinggal di rumah dengan genangan air hingga mata kaki, seperti Jakarta di setiap musim banjir, tapi ini di seluruh dunia.

2050, pandemi bukan hanya varian covid. Perubahan suhu, banjir, urbanisasi dan pergerakan populasi manusia mengakibatkan penyebaran penyakit. Setengah dari populasi dunia berisiko tertular malaria atau demam berdarah. wabah baru bisa melampaui angka kematian penyakit jantung, menciptakan krisis perawatan kesehatan. Perusahaan asuransi pun menolak melayani. Apa yang kita lalui dua tahun kemarin tampak tak ada apa-apanya.

2050, kelaparan merajalela. Populasi dunia meningkat sampai 9 miliar jiwa walau tingkat kesuburan manusia menurun drastis. Terlalu banyak mulut yang harus diberi makan, sementara dunia kekurangan air dan lahan yang bisa digarap. Bahan makanan akan semakin mahal. Jumlah orang kurang gizi di dunia pun terus meningkat. Sementara bantuan logistik kalaupun ada, pasti datang terlambat karena terhambat bencana di mana-mana.

2050, hubungan internasional tak lagi akur. Setiap negara menjadi egois dan saling curiga. Perdagangan Global macet karena negara-negara berhenti mengeksport dan memilih mempertahankan sumber daya mereka sendiri. Padahal, jutaan orang butuh bermigrasi tapi banyak negara Lockdown dan menjaga perbatasan dengan tentara. Sedikit kesalahpahaman akan menciptakan perang dan seperti biasanya, netizen lalu memperuncing keadaan dengan memenuhi media sosial dengan teori konspirasi dan video-video propaganda. Teman-teman, meski terdengar seperti naskah disaster movie, itu tadi tidak mengada-ngada, menghayal atau menakut-nakuti. Semua gambaran itu berbasis pada penelitian dan data-data saintifik. Hitungan skenario 2030, 2050, 2100 per tahun, semuanya ada.

Isu ini bahkan telah mempertemukan para pemimpin dunia, tak terkecuali Indonesia. Kemarin Presiden Jokowi hadir dalam KTT COP 26, sebuah forum tingkat tinggi yang diikuti 197 negara. Mereka membicarakan masa depan. Rencana untuk menghalangi skenario skenario tadi terwujud. Memang sulit, karena masing-masing negara punya kepentingannya sendiri. Akan ada tarik ulur yang berbelit-belit. Tapi kesepakatan harus dilaksanakan. Dunia harus melakukan pengurangan karbon secara progresif mencapai target nol emisi, SEGERA. Negara-negara maju yang secara historis lebih bertanggung jawab harus mau membantu pendanaan negara-negara lain untuk ikut memerangi krisis iklim. Dunia berpacu dengan waktu.

Gelisah tidak akan menghalangi 2050 sampai di kalender kita. Kita harus mempelajari isu ini termasuk mengawal kebijakan dan langkah-langkah pemerintah. Sorotan terhadap COP 26 menegaskan Indonesia selama tinggal di planet yang sama, tidak terbebas dari resiko maupun tanggung jawab. Ada yang bisa kita lakukan sebagai individu, tentu saja itu perlu. Namun rangkaian kebijakan negara yang berdampak signifikan itu yang paling kita butuhkan, SEGERA. Kita tak bisa memilih planet. Tapi masa depan, BISA. //

KAWASAN INDUSTRI

Salah satu isu yang mencuat pembahasan adalah soal kawasan industri strategis yang terletak di Jawa Tengah. Ada dua locus penting yang saya sorot, yang pertama kawasan industri Brebes (KIB) seluas 3977 hektar dan terakhir kawasan industri terpadu Batang (KITB) seluas 4300 hektar. Kedua locus kawasan industri ini merupakan ketetapan pemerintah pusat sebagai proyek strategis nasional. Bedanya, KIB nasibnya ditelantarkan sementara KITB memperoleh ‘push’ yang sangat kuat untuk segera dikembangkan.

Terhadap dua locus kawasan strategis tersebut, pandangan saya tetap sama, sebaiknya tetap kita tolak. Dalam konsep baru tata ruang Jawa Tengah yang ‘njawani’, pembukaan kawasan industri baru hanya akan menambah beban baru atas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Locus kawasan industri hanya akan menambah konsentrasi populasi yang tetap bertahan di Jawa (lebih khusus lagi Jawa Tengah) yang telah bertambah semakin berpenduduk padat. Locus-locus baru kawasan industri, kawasan pemukiman dan pusat-pusat kawasan pertumbuhan baru, hanya akan menambah problem krisis air, krisis pangan dan krisis iklim yang semakin terasa mengancam. Karena itu, sebaiknya kita tolak. Akan tetapi memang berat. Usulan ini gagal menjadi keputusan.

LAHAN SAWAH DILINDUNGI

Isu kedua terkait lahan sawah dilindungi (LSD) Jawa Tengah sebagai turunan dari Peraturan Presiden

Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2024 tentang pedoman penetapan LSD dan tata cara pemantauan serta pengendaliannya. Pada saat ini dan dalam jangka panjang, LSD Jawa Tengah semakin mengalami tekanan dari berbagai faktor seperti pertambahan penduduk dan tekanan jual beli lahan akibat kebutuhan hidup petani. Nilai land rent lahan sawah yang semakin rendah dan kontrol tata ruang yang belum optimal juga menjadi katalisator merosotnya luasan LSD.

Dalam kurun waktu 5 tahun saja, LSD yang ditetapkan kementerian ATR/BPN telah berubah berkurang dari awalnya 1,025 jt Ha (ketetapan LP2B dalam RTRW tahun 2019) menjadi 987.648 hektare tahun 2024 (ketetapan LSD tahun 2024). Dan Ironisnya, alih fungsi lahan tertinggi ada di Kabupaten Grobogan yang dikenal sebagai daerah penyumbang padi terbesar di Jawa Tengah. Dalam lima tahun terakhir, lahan sawah seluas 8.387 hektar di Grobogan telah beralih fungsi. Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, luas lahan persawahan di Grobogan pada 2019 mencapai 90.776 hektar. Namun, pada 2024 sawah tersebut beralih fungsi hingga akhirnya menjadi 82.389 hektare. Penyebabnya antara lain menjadi kawasan perumahan, kawasan wisata, atau kawasan industri.

Atas dasar itu, pandangan saya tetap sama, sebaiknya kita tambah target LSD Jawa Tengah dalam perda RTRW ini. Dalam kesempatan 5 tahun lalu saat memimpin pansus revisi RTRW, keputusan menambah lahan LP2B berhasil saya lakukan (dari data awal 981rb

Ha menjadi 1.025jt Ha). Sekarang, dalam konsep baru tata ruang Jawa Tengah yang ‘njawani’, konversi lahan sawah dilindungi menjadi lahan dengan fungsi lain harus ditekan. Pembukaan kawasan sawah baru atau cetak sawah baru harus menjadi prioritas penting. Sebaliknya pembukaan locus kawasan permukiman dan kawasan pusat pertumbuhan baru hanya akan menambah konsentrasi industri dan populasi yang semakin merambah banyak di Jawa (lebih khusus lagi Jawa Tengah). Locus-locus baru kawasan pemukiman, pusat-pusat kawasan pertumbuhan baru, dan kawasan industri, hanya akan menambah problem krisis air, krisis pangan dan krisis iklim yang semakin terasa membuat sesak nafas kita. Karena itu, sebaiknya kita tolak. Akan tetapi sayang : gagal. []

— REKONSTRUKSI LASEM KOTA PUSAKA —

Rekonstruksi Lasem kota pusaka adalah tema tentang rekonstruksi sejarah Lasem. Sebuah tema tentang menelusuri, menemukan dan mengaktualisasikan nilai-nilai sejarah (*explore, discover and actualize historical values*) kota Lasem, kota kecil di pesisir utara wilayah timur Jawa Tengah. Rekonstruksi ini bertujuan untuk menguak masa lalu kota Lasem, dihadirkan kembali di masa sekarang, untuk pengetahuan bagi generasi yang akan datang. Dimensinya tidak hanya penelusuran data dan fakta sejarah, tapi juga tantangan aktualisasinya dalam bentuk fisik dan pembangunan. Karena itu, inilah khidmah yang terasa berat.

Sekilas menguak sejarah kota Lasem, kita akan menemukan penggalan-penggalan sejarah yang sangat menarik. Dimulai dari abad 4 masehi saat sang resi bijaksana bernama Sam Badra di lembah gunung Argasoka (pegunungan Lasem). Sang resi ini konon yang menurunkan para penguasa Jawa Dwipa mulai dari Ratu Shima di Kalingga abad 6-7 M, penguasa Medang atau Mataram Kuno abad 8-11, Kahuripan abad 11. Kala era Majapahit, Lasem tercatat dalam piagam Singasari (1351 M) sebagai kerajaan vassal. Saat itu Lasem diperintah Dewi Indu (adik Hayam Wuruk) yang bergelar Bhre Lasem 1. Dewi Indu dipersunting Rajasawardhana (raja Metaun) yang merupakan panglima armada laut Majapahit. Dua

pemimpin kerajaan itu kemudian meleburkan wilayah kekuasaannya menjadi satu. Rajasawardhana lalu mengubah Lasem sebagai pangkalan laut Majapahit dengan Teluk Regol dan Kairinan sebagai pangkalan utama kapal tempur dan kapal ekspedisi Majapahit.

Pasca Majapahit, Lasem hadir dalam penggalan sejarah penting penyebaran dakwah Islam di Nusantara. Kadipaten Islam Bonang-Binangun (1469 M) menjadi cikal bakal berdirinya kerajaan Islam Demak tahun 1478 M. Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga adalah tiga tokoh walisongo yang memiliki kaitan erat dengan kota Lasem. Saat kekuasaan Pajang yang dilanjutkan Mataram Islam, Lasem menjadi kadipaten Islam bawahannya. Saat kolonialisme, Lasem menjadi sumbu terakhir perlawanan Islam-Tionghoa-Pribumi dalam peristiwa perang kuning 1740-1750.

Lasem juga dikenal dengan julukan kota Tiongkok kecil. Penggalan sejarah kota Tiongkok kecil lahir karena sejarah kedatangan dan kehidupan yang membaur etnis China dengan warga setempat. Konon, pendaratan pertama orang-orang negeri tirai bambu ini telah berlangsung sejak abad 14 M, lewat ekspedisi Laksamana Cheng Ho di Teluk Regol. Sebuah krenteng tertua di Jawa bernama Tjoe Ang Kiong juga berdiri di kota Lasem. Konon krenteng ini berdiri di abad 14. Mereka hidup penuh harmoni bersama warga lainnya. Keberadaan mereka juga membawa serta tradisi batik yang telah turun temurun menjadi keterampilan khusus warga Lasem. Batik tiga negeri menjadi ciri khas yang ikonik Lasem. Lasem kemudian juga dikenal sebagai kota batik.

Penggalan-penggalan sejarah kota Lasem adalah mozaik lengkap tentang peradaban yang kaya makna. Salah satu mozaik itu adalah khazanah peradaban Islam yang hadir dan berkembang di Lasem kota pusaka. Barangkali karena latar belakang santri saya, maka tantangan rekonstruksi sejarah Islam lebih mengusik pikiran saya. Ada dua fase penting yang relevan menjadi objek rekonstruksi. Pertama, fase abad 15 dengan peran tokoh-tokoh penting penyebar dakwah Islam pada masa-masa awal. Kedua fase abad 17, yang menampilkan peran sosok penerus dan pelanjut dakwah yang konsisten dalam tradisi keilmuan dan aktualisasi peradaban. Kedua fase ini telah meninggalkan jejak dan warisan peradaban Islam dalam berbagai bentuknya. Rekonstruksi atas peninggalan ini menguras perhatian saya selama 30 tahun terakhir.

MASJID PUSAKA LASEM

Dalam babad ‘carita Lasem’ yang ditulis Raden Panji Hamzah (1858), Masjid kota Pusaka Lasem berdiri tahun 1588 atas perintah Adipati Tejokusumo 1 atau Mbah Srimpet penguasa Lasem saat itu. Tokoh penting kedua terkait Masjid Lasem adalah Sayyid Abdurrahman Sambu (Mbah Sambu). Tejokusumo 1 mengangkatnya menjadi wali negara kadipaten Lasem dan nadzir pertama Masjid Lasem. Mbah Sambu mengajar agama dengan tekun di Masjid tersebut. Masjid Lasem menjadi tempat penting proses transmisi keilmuan Islam abad 17 di pesisir utara Jawa. Transmisi tradisi keilmuan pesantren yang dibawa

mbah Sambu dari pesantren Ampeldenta tempat ia mendalami ilmu agama sebelum ke Lasem.

Berbentuk arsitektur klasik Jawa dengan perpaduan unsur-unsur Hindu-Islam-Tiongkok, Masjid pusaka Lasem dibangun berdasarkan ekspresi pikiran dan pemahaman mendalam ilmu agama sang arsiteknya ; Tejokusumo 1. Secara genealogis, nasab Tejokusumo 1 tersambung dengan trah Bhre Lasem 1 (cucu Raden Wijaya pendiri Majapahit) dan Bi Nang Oen (perwira penting armada Laut Laksamana Cheng Ho). Corak arsitektural para pendahulunya di Lasem juga memberi pelajaran berharga Tejokusumo 1 dalam memilih desain arsitektur Masjidnya. Berdiri di sisi barat alun-alun Lasem, pasar sebagai pusat ekonomi masyarakat di sisi selatannya, dan kadipaten yang terletak di sisi utaranya, menempatkan posisi Masjid Lasem dalam simbol penting tata kota baru yang dibangun Tejokusumo 1 saat berkuasa.

Setelah itu, masjid Lasem berkembang sebagai pusat kegiatan dakwah yang penting. Bahkan tidak itu saja, masjid Lasem tercatat pernah menjadi sarana konsolidasi perlawanan terhadap penjajah Belanda. Pada Agustus 1750, di halaman masjid Lasem, ‘terpekkik’ seruan jihad pertama dalam sejarah perlawanan atas penjajahan Belanda di nusantara. Pekik jihad itu dikumandangkan oleh koalisi monumental Islam-Jawa-China dengan tiga tokohnya : Kiai Ali Badawi, Raden Panji Margono dan Oei Ing Kiat. Di sekitar Masjid Lasem, berdiri banyak pondok pesantren yang menjadi pusat transmisi keilmuan sunni yang bersumber dari ajaran para wali. Dari pesantren itu

lahir para kiai dan ulama yang menjadi tonggak penting dibalik lahirnya organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU).

Di sekitar awal tahun 2000 an, saya memulai gagasan rekonstruksi itu dengan usulan terkait urgensi ‘ihya al mawat’ (*praktik menghidupkan, mengelola, dan mengolah tanah yang sebelumnya tidak terjamah manusia. Ihya' al-mawat merupakan syariat dalam Islam untuk memakmurkan bumi*). Usul ini terus saya sampaikan kepada Nadzir Masjid Lasem saat itu, Kiai Ahmad Thoyfoer, untuk mengaktivasi tanah seluas 3000 M2 di belakang Masjid. Tanah itu kondisinya ‘wingit’, tidak terjamah dan sangat terbengkalai. Menurut keterangan, tanah ini sebagian merupakan tempat pekuburan anak yang sudah ‘lawas’ tidak berfungsi. Sekitar awal 2005, usul ini akhirnya memperoleh lampu hijau dari beliau, seiring munculnya program ‘wakaf produktif’ di kementerian Agama RI (mitra kerja komisi VIII tempat Kiai Ahmad Thoyfoer bekerja sebagai anggota FPPP DPR RI). Seketika, saya susunlah konsep rekonstruksi Masjid Lasem dengan judul ‘Penataan kawasan bisnis dan wisata Religi’ Masjid Jami Lasem.

Menjelang akhir 2008, lewat perjuangan yang tidak mudah, dana wakaf produktif kementerian Agama RI dapat kami cairkan. Saat itulah proyek rekonstruksi Masjid Lasem langsung kami mulai. Yang pertama, sasarannya ialah menata bagian bangunan utama Masjid. Yang kedua penataan bangunan makam Mbah Sambu dan Mbah Srimpet, Dan ketiga penataan kawasan parkir dan pertokoan yang menempati tanah sisi barat masjid

(kawasan *tanah ihyai al mawat*). Ketiga titik inilah yang saya anggap yang terpenting di awal. Setelah ini, tentu banyak hal lainnya yang menarik masuk agenda lanjutan.

Rekonstruksi bangunan utama Masjid kami lakukan dengan konsep memperkuat desain arsitektur eksisting, dengan beberapa pekerjaan :

1. Meninggikan 2 meter konstruksi dinding bangunan agar semakin tampil kokoh dan relevan.
2. Meninggikan konstruksi soko guru empat berdiameter 30cm, menambah ukiran pada blandar, sunduk, tumpangsari dan menambah dodo peksi baru dengan ciri full ukiran khas Jawa.
3. Mempertajam ciri unsur tiongkok dengan ujung atap empat sisinya semakin melengkung ke atas.
4. Mendesain ulang pintu-pintu utama dari 2 pintu utama dan 1 pintu kecil di samping menjadi 9 pintu utama dengan ukuran sangat besar dan rejangan khas ukiran. 9 pintu baru ini lalu kami sebut sebagai “lawang songo” masjid Lasem.

Rekonstruksi bangunan utama makam mbah Srimpet kami lakukan dengan pekerjaan antara lain :

1. Mengangkat setinggi 1 meter nisan batu utuh 60x135cm yang memiliki tanda ukiran motif surya majapahitan di atas nya.
2. Mengganti dinding pagar keliling dengan desain bata ekspos dan tiga (3) garupa bata pintu masuk desain klasik kerajaan.

Sementara rekonstruksi bangunan utama makam mbah Sambu kami lakukan dengan pekerjaan membangun bangunan makam (sebelumnya hanya bangunan kecil khas arab) berkonsep joglo dan atap genteng sirap serta lengkungan khas pecinan. Adapun pekerjaan penataan kawasan bisnis meliputi pembangunan 27 pertokoan masjid dan pavingisasi kawasan parkir Bus dan mobil seluas kurang lebih 3000 m².



*Bangunan Masjid utama, makam mbah Srimpet dan mbah Sambu
(foto dok. Tamir Masjid)*

Pasca penataan ini, tercatat Masjid Lasem mengalami kenaikan volume kunjungan wisata religi/ziarah cukup signifikan. Sebagai salah satu locus alternatif dalam peta dan rute penting destinasi wisata religi walisongo, komplek Masjid Lasem selama ini telah cukup dikenal. Namun pasca penataan ini, antusiasme kunjungannya semakin meningkat tajam.

MUSEUM PUSAKA LASEM

Sekitar akhir 2016, saat saya memasuki periode kedua di DPRD Jawa Tengah, semangat saya melanjutkan agenda rekonstruksi kembali mengusik. Saat itu, selain diskusi saya juga memperdalam literasi. Beberapa sumber buku memperkuat keyakinan saya pada kesimpulan tentang pentingnya merangkai narasi terkait tonggak-tonggak penting perjalanan dakwah Islam di nusantara, dengan peran sentral kota Lasem di dalamnya. Karena peran penting itu, maka perlu dibangun sebuah monumen dalam bentuk Museum.

Awalnya, gagasan ini saya lontarkan secara terbuka lewat pandangan umum fraksi (FPPP DPRD Jawa Tengah) sebagai laporan akhir tiap kegiatan reses. Dua tahun tidak memperoleh respon, saya lalu memasukkannya dalam inisiatif usulan jalur aspirasi. Karena jalur aspirasi sebagai anggota, penganggarannya pun berjalan lancar, meski sempat tersendat saat proses pencairannya.

Akhir 2019, bertempat di komplek masjid Lasem, pekerjaan pembangunan kami mulai. Tahap pertama, saya mengalokasikan dana aspirasi 2.5 miliar dalam APBD 2018. Tahap kedua sebesar 1 miliar dalam APBD tahun 2022. Hal penting pertama yang kami tuntaskan sebelum memulai adalah desain arsitektur bangunan. Saya sengaja memilih bangunan khas rumah gadang Minangkabau. Alasannya, menghargai karya arsitektur luhur nusantara (setelah di beberapa bangunan kami mengadopsi gaya klasik jawa, arab dan khas pecinan) dan untuk mengenang ulama Minangkabau murid Sunan

Bonang, sultan Mahmud, yang makamnya berada di ‘jejeruk’ desa Bonang Lasem.

Museum Islam Nusantara Lasem menjadi bagian terpenting dari ikhtiar rekonstruksi sejarah peradaban Islam kota Lasem. Selain bangunan dan pilihan desain arsitektur yang mencoba merefleksikan peran ke-nusantaraan, soal isi museum juga menjadi agenda terberat kami. Isi ini terkait benda-benda artefak dan manuskrip kuno peninggalan ulama penyebar dakwah Islam nusantara dari abad 15 hingga sekarang. Secara khusus, kompilasi barangkali akan kami lakukan atas ulama yang memiliki sanad keilmuan dan nasab terhubung dengan Lasem. Artefak benda kecil berbentuk gong yang dipercaya milik Sunan Bonang bernama ‘bende becak’ misalnya (disimpan secara turun temurun oleh ahli waris/juru kunci makam Mbah Bonang di desa Bonang Lasem), bisa menjadi isi terpenting koleksi museum. Namun, ikhtiar ini belum berhasil. Juga sebuah piring keramat yang konon pernah digunakan mbah Mutamakkin Kajen memberi makan anjing. Manuskrip ‘Het Boek Van Bonang’, Kitab ‘Sabda Bodro santi’ (SBS) dan babad ‘Carita Lasem’, manuskrip para pendiri NU abad 20, dan banyak yang lainnya. Sebab itu, pekerjaan ini sangatlah berat dan membutuhkan waktu yang cukup untuk menuntaskannya.



Bangunan Museum Islam Nusantara Lasem (dok. Takmir Masjid)

Sedikit cerita menarik tentang nama museum yang perlu saya sampaikan. Di pesantren Tebuireng Jombang, pada saat bersamaan, telah berjalan pekerjaan pembangunan museum dengan nama ‘Museum Islam Nusantara’. Proyek ini menjadi satu kesatuan utuh proyek penataan komplek makam pahlawan nasional di pesantren Tebuireng, dengan anggaran besar dari APBN. Karena itu, saya terpaksa dengan sengaja memilih judul berbeda dalam proposal ajuan saya di APBD Jawa Tengah, yakni ‘Pembangunan Museum Santri Nusantara’. Pilihan judul ini tidak terlalu berlebihan, sebab sejarah tradisi santri dan pesantren di Lasem adalah kelanjutan dari tradisi santri di pesantren Ampel Denta Surabaya. Akan tetapi menjelang Presiden RI Joko Widodo melakukan peresmian pada tanggal 18 Desember 2018, museum Islam Nusantara Tebuireng berubah nama menjadi ‘Museum Islam Indonesia KH. Hasyim Asy’ari

(MINHA). Bagi saya, ini sebuah kebetulan yang tak terduga. Perubahan penting yang selama ini telah mengganjal pikiran kami, sebab yang lebih tepat museum Islam Nusantara berdiri di kota Lasem. Akhirnya, kami pun bulat memutuskan merubah nama museum kota Pusaka Lasem dengan nama ‘Museum Islam Nusantara Lasem (MINNA).

KOTA PUSAKA LASEM

Pasca pembangunan Museum Islam Nusantara Lasem, sebuah giat perencanaan rekonstruksi dalam skala luas pun berjalan. Giat perencanaan itu melibatkan banyak stakeholder, konsultan perencana, pemerintah daerah, komunitas, termasuk kami teman-teman di Masjid jami Lasem. Dalam rangka pengembangan pariwisata berbasis warisan luhur budaya Nusantara, Pemerintah Pusat (PUPR) berencana melakukan penataan empat kawasan pusaka atau kawasan cagar budaya yang ada di Jawa Tengah, yakni kawasan kota lama Semarang, Masjid Baiturrahman Semarang, kawasan Mangkunegaran Solo dan kawasan kota haroni Lasem. Kami pun dengan penuh antusias terlibat memberikan masukan-masukan yang diperlukan.

“Konsep penataan kawasan disesuaikan dengan fungsi kota sebagai kota budaya dan destinasi wisata yang selaras dengan lingkungan dan tetap mempertahankan kearifan lokal. Hal ini dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pembangunan hingga pengawasannya,” demikian Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (Liputan6.com, 19/11/2021). Staf Ahli

Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S Atmawidjaja mengatakan "Penataan kawasan pusaka atau cagar budaya seperti ini harus sangat cermat dan hati-hati. Kita harus mampu menghadirkan kembali nilai-nilai sejarah sehingga dapat membawa pengunjung ke masa lalu, untuk memahami arti penting kota pusaka ini melalui keberadaan Masjid Jami berarsitektur Jawa yang didirikan 1588 M. Selain itu, makam, alun-alun, kampung pecinan dan kawasan sekitarnya yang sudah berkembang sejak zaman Majapahit". Akhirnya, ruang lingkup penataan kawasan pusaka Lasem meliputi pekerjaan kawasan Alun-alun Lasem, pekerjaan bangunan pasar, pekerjaan lansekap kawasan Masjid Jami dan penataan kawasan Karangturi, Kauman dan Jatirogo. Anggaran penataan ini dirancang sebesar Rp 114,6 miliar yang dilaksanakan secara multi years contract (MYC) 2021-2022.

Masuknya komplek masjid Lasem dalam proyek penataan ini tentu kami sambut dengan penuh kegembiraan. Atas masukan kami, penataan kawasan masjid menjadi momentum melanjutkan agenda rekonstruksi masjid secara hampir tuntas. Pekerjaannya meliputi :

- Mengganti atap masjid depan berkonsep joglo, berbahan kayu jati dengan soko guru 50 cm., agar sesuai dengan desain bangunan masjid utama (awalnya berbahan material besi dan baja ringan, namun dalam adendum, berhasil kami perjuangkan menggantinya dengan material kayu jati).

- Menata ulang kawasan pertokoan dan parkir (kembali ke konsep awal yang dulu saat pembangunan tahap pertama tahun 2008 berubah atas arahan Pak Maftuh Basuni, menteri Agama RI saat itu, setelah memperoleh masukan dari tokoh dan masyarakat).
- Menata kawasan lingkungan halaman dan pagar masjid.



Sebelum Proyek penataan Kota Pusaka (dok. Takmir Masjid)



Setelah proyek penataan Kota Pusaka (dok. Takmir Masjid)

Bagi saya secara pribadi, proyek penataan kota pusaka Lasem dari kementerian PUPR yang pekerjaannya selesai pertengahan tahun 2022, adalah berkah besar yang patut disyukuri. Ini menjadi bagian terpenting dari agenda rekonstruksi sejarah Lasem yang telah lama mengungkit perhatian saya. Dalam perencanaan, proyek ini merupakan tahap pertama, yang telah menyasar banyak aspek nilai sejarah kota Lasem, meliputi penataan alun-alun, pasar, kawasan pedestrian, kawasan pecinan karangturi dan tentu saja masjid lasem. Pada tahap kedua, akan dituntaskan berbagai pekerjaan lain seperti kawasan pedestrian desa Soditan, Sumbergirang, kawasan sungai Babagan, kawasan desa inti Bonang, gapura masuk dan keluar kota Lasem, dll. Sampai hari ini, kami masih menunggu tahap kedua ini diluncurkan.

SUSUR SUNGAI PUSAKA LASEM

Pada pertengahan 2018, agenda rekonstruksi susur ‘kali Lasem’ atau sungai pusaka Lasem atau sungai Babagan sebenarnya telah saya masukkan dalam APBD Jawa Tengah tahun 2019. Pasca pembangunan Museum Islam Nusantara tahap pertama, susur sungai Bagan merupakan agenda obyektif berlatar sejarah sungai Babagan sebagai sarana transportasi vital pada zamannya. Sejarah sungai bagan adalah sejarah jalur perdagangan, pertempuran dan urat nadi perekonomian rakyat pada masanya.

Kali Babagan merupakan sungai sepanjang 33,5 kilometer yang terletak di Lasem kota pusaka. Sungai ini berhulu di Pegunungan Kendeng dengan nama Kali Grubugan dan bermuara ke Laut Jawa melintasi Kota Lasem. Kali Lasem merupakan sungai penting dan bersejarah bagi peradaban Kota Lasem. Di sekitar sungai menjelang muara ini pernah menjadi galangan kapal pasukan Belanda dan Jepang. Jejak galangan kapal tersebut masih dapat dilihat di Desa Dasun. Banyak sejarawan menduga bahwa peran sungai Lasem lebih dari itu, yakni Sungai Lasem menjadi pintu masuk persilangan budaya, relasi suci peradaban Nusantara melalui hubungan ekonomi, budaya, politik maupun seni.



*Lokasi rencana susur kali Lasem di desa Dasun
(foto dok. penulis)*

Dalam APBD Jawa Tengah tahun 2019, saya alokasikan dana aspirasi sebesar 2 miliar untuk proyek rekonstruksi tahap pertama. Pekerjaan di awal ini saya rancang untuk penataan kawasan muara sungai di desa Dasun Lasem. Terdiri dari pekerjaan jalan akses, dermaga kayu, restorasi galangan kapal dan jalan kayu setapak di hutan mangrove (*Mangrove Boardwalk*). Harapannya, pekerjaan ini dapat menjadi pemicu awal destinasi wisata baru susur sungai Lasem. Namun sayang, rencana ini gagal di tenderkan dalam lelang pekerjaan oleh dinas pariwisata Kabupaten Rembang. Penyebabnya ialah ketidakcakapan (*inkompetensi*) aparatur pemerintah daerah dalam menangani urgensi sebuah proyek.

MASJID PUSAKA TIBAN

Dalam cerita lisan, Masjid ini tiba-tiba sudah berdiri, tanpa diketahui bagaimana proses pembangunannya.

Karena itulah masyarakat menyebutnya Masjid Tiban. Bernama lengkap Masjid Tiban Nurul Huda, terletak di Desa Gedongmulyo, Lasem, tepatnya di sisi barat Kali Bagan, berseberangan dengan Klenteng Tjoe An Kiong (dibangun abad 15) dan bangunan Lawang Ombo. Antara Masjid dengan Klenteng Tjoe An Kiong posisinya saling berhadap-hadapan, namun terpisah oleh aliran sungai.

Ada beberapa versi cerita turun temurun yang berkembang sampai sekarang. Sebagian kalangan memperkirakan Masjid itu merupakan peninggalan Sunan Bonang. Tapi ada pula yang menganggap peninggalan Sunan Langgar, pusara makamnya berada di Desa Langgar, Kecamatan Sluke. Saat itu pada abad ke-14, Nyai Ageng Maloka, putri Sunan Ampel sekaligus kakak Sunan Bonang, yang memimpin Kadipaten Lasem di pusat pemerintahan Taman Sitaesmi Caruban, meminta bantuan kepada Sunan Langgar untuk dibuatkan Masjid. Pondasinya sudah dibuat. Tapi saat Masjid akan diletakkan di tempat itu, ternyata justru jatuh di pinggir sungai Desa Gedongmulyo, depan Lawang Ombo dan Klenteng Tjoe An Kiong. Ada yang mengaitkan dulu di pinggir Kali Bagan, warga terbiasa minum candu atau minuman keras. Harapannya, begitu ada Masjid, bisa menekan kebiasaan menenggak candu. Jadi, masjid ini berusia lebih tua dibanding Masjid Lasem, yang berdiri tahun 1588.



Bangunan Masjid Tiban sebelum pemugaran [Santri Bean Wetan/Hops.id]

Kini, masjid itu berbentuk bangunan yang kurang terawat. Nampak jelas kondisi bangunannya yang tidak representatif (terkesan pembangunannya dilakukan serampangan, jika ada dana, lalu dipakai untuk menambah sisi bangunan yang dirasa kurang). Sama sekali tidak menampakkan cirinya sebagai masjid ‘lawas’ yang sangat penting. Satu-satunya titik yang menandai benda masa lalu, ialah batu pasujudan cukup besar seukuran sajadah untuk sholat, bertempat di tempat imaman. Di atas batu ada bekas telapak tangan dan kaki. Namun batu itu terpaksa ditutup keramik, karena harus menyesuaikan dengan pemerataan lantai.

Pertengahan tahun 2022, saya memasukkan agenda rekonstruksinya dalam APBD Jawa Tengah tahun 2023, dengan alokasi sebesar 350 juta. Akhirnya, pembangunan dapat dimulai, dengan pemugaran total dan menggantinya dengan bangunan joglo khas Jawa.

Namun, bangunan asli Masjid tetap dipertahankan. Mulai dari bagian pintu, dan 4 tiang Masjid berbahan kayu kuno tetap ada. Peninggalan lain, sumur kuno di depan Masjid yang sumber airnya masih bisa diandalkan, guna menunjang aktivitas ibadah, juga dipertahankan, menyatu dengan bangunan Masjid.



Bangunan Masjid Tiban setelah pemugaran (Foto Vachri Rinaldy /RADAR KUDUS)

MASJID PUSAKA SUNAN BONANG

Masjid pusaka Sunan Bonang, terletak sekitar 50 meter dari lokasi bekas 'Ndalem Sunan Bonang' atau Pesarean Sunan Bonang, merupakan masjid penting dalam konteks rekonstruksi sejarah Lasem. Menurut cerita lisan, masjid ini dulu merupakan tempat ibadah umat Hindu. Sunan Bonang kemudian menjadikannya semacam padepokan atau warga masyarakat

menyebutnya dengan 'Griya Ageng'. Itu karena kelembutan Sunan Bonang dalam berdakwah menyebarkan Islam. Beliau tidak secara langsung menjadikan nya sebagai masjid, tetapi seperti padepokan atau disebut 'Griya Ageng'. Tempat berkumpul warga melakukan ritual.



Penampakan masjid peninggalan Sunan Bonang di Desa Bonang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang (17/3/2024). Foto: Muhammad Fadlil/detik Jateng

Pada era tahun 1990-an, saat pemugaran tahap awal, banyak ditemukan fragmen-fragmen patung orang atau arca di area masjid. Misalnya bagian kepala dan tangan. Selain itu ditemukan juga gerabah, guci gentong. Oleh pengurus masjid, benda-benda itu dipendam lagi di sini (area masjid). Pemugaran selanjutnya dilakukan tahun 2016, dengan pekerjaan pemugaran total serambi depan masjid, tapi tetap mempertahankan bangunan utama masjid peninggalan Sunan Bonang yang masih orisinil.

"Itu umpak sari dan keempat tiang penyangganya masih asli. Bisa dilihat itu motif ukiran yang ada di umpak sarinya. Tembok-temboknya juga, itu asli semua, hanya saja karena diperbaiki jadi ditutup (keramik). Tapi di dalamnya batu-batunya asli dari zaman dulu," jelas Lutfi pengurus Masjid.

Di sepanjang tahun 2019, seiring perencanaan penataan kota pusaka Lasem, usulan memasukkan locus desa Bonang juga diperjuangkan. Pada saat yang sama, saya sendiri terlibat diskusi intensif dengan teman-teman pengurus yayasan Sunan Bonang. Rekonstruksi sejarah Lasem tak bisa lepas dari locus inti yang berada di kawasan desa Bonang. Berlatar peta jalur dakwah para wali abad 15, kawasan desa Bonang memiliki beragam petilasan yang menunggu sentuhan penataan. Penataan antara lain meliputi pembangunan gerbang masuk dan pedestrian menuju masjid dan ndalem/makam mbah Bonang, penataan kawasan pasujudan, penataan kawasan parkir yang bergeser ke sisi timur eksisting tempat parkir sekarang dan pembangunan sentra pedagang oleh-oleh.

Namun sayang, agenda ini gagal masuk dalam proyek kota pusaka Lasem tahap pertama. Pada pertengahan tahun 2022, setelah berdiskusi dengan pengurus yayasan Sunan Bonang, saya pun mengalokasikan anggaran penataan kawasan parkir baru dan sentra UKM lewat APBD Jawa Tengah tahun 2023 sebesar 2 miliar. Saat menjelang implementasi anggaran pada tahun berjalan, muncul kendala terkait hak milik tanah lokasi proyek, yang tidak dibolehkan jika milik

yayasan. Akhirnya, anggaran yang sudah tersedia itu gagal diproses dan terpaksa saya alihkan untuk program lain. Meski gagal, saya tetap yakin pada saatnya penataan kawasan Bonang dapat terwujud. []

— MUSEUM ISLAM NUSANTARA LASEM —

Tepuk tangan hadirin seketika bergemuruh begitu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahudin Uno menggunting tali kembang sebagai tanda peresmian *soft opening* Museum Islam Nusantara di Masjid Pusaka kota Lasem, Rembang, Jawa Tengah, (16/9/2023). Turut mendampingi para ulama, Bupati Rembang Abdul Hafidz, anggota DPR RI Arwani Thomafi, dan saya sendiri penggagas pendirian museum dan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Dalam sambutannya, Menparekraf Sandiaga Uno mengungkapkan, Kemenparekraf terinspirasi dengan pembangunan museum ini. Dia akan mengembangkan paket-paket wisata religi berbasis masjid yang memiliki nilai sejarah Islam di Indonesia. Sandiaga mengatakan, “program ini diusung karena sejalan dengan Indonesia sebagai negara dengan populasi umat muslim terbanyak di dunia. “Program ini akan kita mulai dari Museum Islam Nusantara yang berada di Masjid kota pusaka Lasem ini,” ujar Sandiaga.



Menparekraf Sandiaga S. Uno memotong pita peresmian Museum Islam Nusantara Lasem, 18/9/2023, (dok, kemenparekraf)

KENAPA BERDIRI DI LASEM

Kenapa museum Islam nusantara berdiri di Lasem, adalah pertanyaan yang sering diajukan banyak orang kepada saya. Saat peresmian, hal yang sama juga disampaikan Sandiaga Uno. Saat memberi sambutan, saya ungkapkan alasan utama kenapa museum ini harus berdiri di kota Lasem. Lasem adalah kota dengan peran menentukan dalam proses perjalanan dakwah Islam di Nusantara. Ada tiga fase sejarah yang membangun argumentasi dan telah terukir sebagai kontribusi penting Lasem dalam perjalanan dakwah Islam di negeri ini.

Yang pertama, fase abad 15 masehi. Pada fase ini, Lasem berperan sebagai penentu transisi sejarah penting dari Majapahit menuju kerajaan Islam Demak. Periode ini adalah periode tampilnya Walisongo yang berhasil mengislamkan Nusantara. Sunan Ampel menjadi pelopor awal yang mendirikan pesantren di Ampel Denta Surabaya. Dari padepokan Ampel Denta, sang guru

Sunan Ampel mengutus Sunan Bonang (putranya) dan Raden Wironegoro (murid dan menantunya) untuk memimpin dakwah Islam di Lasem. Saat itu sekitar tahun 1469 masehi, Lasem melepaskan diri dari Majapahit yang telah mengalami krisis kekuasaan akibat konflik internal. Lalu berdirilah kadipaten baru yang bersendikan Islam bernama Kadipaten Bonang Binangun. Kadipaten baru ini dipimpin oleh adipati Raden Wironegoro. Tidak lama setelah itu, berdirilah Kerajaan Islam di Demak pada tahun 1478. Menurut catatan Naskah ‘carita Lasem’, Raden Patah pendiri kerajaan Demak adalah menantu dari Raden Wironegoro Adipati Lasem saat itu. Raden Patah sendiri adalah teman satu pondok Sunan Bonang ketika sama-sama nyanytri di Ampel Denta.

Sunan Bonang adalah sosok penting dakwah Islam setelah Sunan Ampel. Cara dakwah Sunan Bonang menjadi catatan tersendiri dalam proses awal islamisasi di Nusantara. Sunan Bonang menetap, mendirikan pesantren, dan membangun masjid di komplek kadipaten Islam Bonang Binangun Lasem. Ia menggunakan pendekatan tasawuf dan kebudayaan lokal. Beliau menemukan dan menggunakan alat gamelan yang bernama ‘bonang’ (berbentuk gong kecil) untuk berdakwah. Dengan bonang yang ditabuh, memunculkan bunyi merdu, kemudian ia menembangkan gending-gending jawa. Lewat tembang tembangnya, Sunan Bonang menyisipkan pesan dan misi ajaran Islam ke masyarakat. Cara ini terbukti efektif mengislamkan penduduk Lasem dan sekitarnya. Cara ini pula yang kemudian dilanjutkan oleh Sunan Kalijaga, Sunan Kudus

dan para pendakwah islam di masa-masa berikutnya. Karena cara dakwah ini pula, Islam berkembang menjadi agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk di nusantara.



Halaqoh turots Museum Islam Nusantara di pendopo Tejokusuman belakang Masjid Lasem, 18/2/2022 (foto dok Abdul Aziz)

Selain cara dakwah, Islam mazhab ahlussunnah wal jamaah yang diwariskan ‘walisongo’ di nusantara memiliki prinsip-prinsip ajaran yang bisa diterima oleh banyak kalangan. Prinsip ‘tasamuh’ mengajarkan sikap toleran (menghargai) terhadap perbedaan pandangan baik dalam masalah keagamaan, terutama hal-hal yang bersifat ‘furu’ (cabang) serta dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan. Prinsip ‘tawazun’ (seimbang) yaitu sikap seimbang dalam berkhidmah demi terciptanya keserasian hubungan antara sesama umat manusia (hablum minannas) dan antara manusia dengan Allah SWT (hablum minallah). Prinsip ‘tawasuth’ (tengah-

tengah/tidak radikal) didefinisikan sebagai sikap moderat yang berpijak pada prinsip keadilan serta berusaha menghindari segala bentuk pendekatan dengan tatharruf (ekstrim, keras). Inilah Islam ahlussunnah wal jamaah yang oleh para peneliti dan akademisi Islam sekarang dinamakan dengan istilah ‘Islam Nusantara’.

Yang kedua, fase abad ke 17 masehi, saat hadirnya tokoh penyebar agama Islam bernama Sayyid Abdurrahman Sambu (mBah Sambu) di Lasem. Mbah Sambu adalah wali agama yang bertugas menjalankan dakwah islam di kadipaten Lasem yang saat itu dipimpin oleh pangeran Tejokusumo I (mbah Srimpet). Karena kecakapannya, ia lalu diambil menantu sang adipati dan dipasrahi mengurus masjid Lasem yang berdiri sejak tahun 1588 M. Dari Mbah Sambu inilah, transmisi sanad keilmuan ahlussunnah wal jamaah di tengah-tengah masyarakat tetap terjaga dengan baik. Dari mbah sambu pula, mengalir garis keturunan nasab yang kelak menjadi ulama-ulama besar tanah Jawa pada periode berikutnya. Mbah Sambu meninggal pada tahun 1671 M.

Yang ketiga, adalah fase abad 20 masehi. Saat itu, Lasem menjadi pusat transmisi keilmuan pesantren yang keberadaannya telah tersebar di berbagai pelosok nusantara. Di Lasem hadir para kiai kharismatik diantaranya KH. Maksoem bin Ahmad, KH Ahmad Baidlowi bin Abdul Aziz, dan KH Cholil bin Abdul Rasyid. Tiga sosok ini adalah para ulama yang ikut aktif mendukung proses berdirinya ormas keagamaan terbesar di negeri ini, yakni jam'iyyah Nahdlatul Ulama (NU). Para pendirinya sendiri, yakni KH Hasyim Asy'ari, KH Wahab

Abdullah dan KH Bisri Syansuri dari Jombang, adalah para tokoh yang secara nasab keturunan dan sanad ilmu tersambung kepada Mbah Sambu Lasem. Dari para tokoh ulama besar ini pula tradisi keilmuan pesantren dan dakwah ala ahlussunnah wal-jamaah tetap eksis dan menyebar luas ke nusantara hingga kini.



Manufaktur sejarah di Museum Islam Nusantara.
(Foto: Suaramerdeka.com/Ilyas al-Musthofa)

KENAPA ISLAM NUSANTARA

Lalu, mengapa namanya kok Museum Islam Nusantara ? Istilah “Islam Nusantara” dalam 15 tahun terakhir ini memang ramai didiskusikan dan diperbincangkan banyak kalangan. Banyak akademisi di perguruan tinggi telah mengangkatnya sebagai bahan riset dan kajian akademiknya. Seminar pun telah digelar

baik skala nasional maupun internasional. Bahkan, dalam muktamarnya yang ke-33 di Jombang, PBNU mengangkat tema ‘meneguhkan Islam Nusantara untuk Peradaban Indonesia dan Dunia’ <https://news.detik.com/berita/d-2853861/muktamar-nu-digelar-di-4-ponpes-jombang-tema-besarnya-islam-nusantara>.

Seiring itu, perdebatan dan diskursus terkait Islam Nusantara juga menuai pro-kontra. Mereka yang kontra menilai istilah itu mengandung potensi penyempitan makna Islam yang universal. Islam tidak bisa direduksi hanya menjadi satu aspeknya saja, melainkan harus menyeluruh. Istilah Islam Nusantara berpotensi mengkotak-kotakkan umat Islam. sementara yang pro meyakinkan bahwa terminologi Islam Nusantara adalah Islam yang mewakili sebuah kelompok besar corak Islam di Nusantara. Islam Nusantara adalah *Islam ahlus sunnah wal jamaah*, yang akulturatif dengan budaya lokal, senantiasa berdialog dengan tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat, yang eksis hingga sekarang. Islam ini adalah Islam yang khas NU. Islam yang digagas oleh walisongo dalam berdakwah dan terus tertransmisi oleh para ulama hingga sampai sekarang. Itulah kenapa museum ini saya namakan ‘Museum Islam Nusantara’.

Jadi ada tiga gelombang sejarah penting yang melandasi argumen kenapa Museum Islam Nusantara berdiri di Lasem. Gelombang pertama adalah masa awal para wali berdakwah, yang menempatkan Sunan Bonang sebagai tonggak penting saat berdakwah di desa bonang Lasem. Gelombang kedua adalah abad ke-17 saat Mbah Sambu dengan penuh ‘jumawa’ menjadi penyebar ilmu

agama di Masjid Pusaka Lasem. Gelombang ketiga adalah saat hadirnya ulama-ulama abad ke-20 para pendiri Nahdlatul Ulama yang terkait dan terikat secara nasab dan sanad ilmu kepada Mbah Sambu. Tiga gelombang sejarah ini harus diketahui oleh generasi muda sekarang. Apalagi, Islam di Lasem berkembang secara harmonis di tengah keberagaman masyarakat yang terdiri dari etnis Jawa, Santri dan Tionghoa.

PROFIL MUSEUM

Museum Islam Nusantara Lasem berada di kompleks Masjid Jami Lasem, yang terletak di titik pusatnya kota Lasem Rembang Jawa Tengah. Uniknya, bangunan museum ini berbentuk rumah gadang, rumah adat Minangkabau. Menurut cerita tutur yang berkembang di masyarakat, sekitar abad 16, muncul tokoh yang dikenal bernama Sultan Mahmud, seorang penyebar agama Islam di Lasem dari kerajaan Pagaruyung Minangkabau. Konon, Sultan Mahmud meninggalkan kerajaan untuk menimba ilmu agama Islam. Namun, kapal yang ditumpanginya tiba-tiba terhempas badai. Saat terombang-ambing ombak, Sunan Bonang menyelamatkan Sultan Mahmud beserta kitab Al-Qur'an. Sultan Mahmud kemudian berguru kepada Sunan Bonang hingga akhir hayatnya. Sultan Mahmud dimakamkan di pegunungan Jejeruk, tak jauh dari kediaman Sunan Bonang di Desa Bonang. Demi mengenang Sultan Mahmud, maka bangunan museum ini sengaja saya pilih berarsitekturkan rumah gadang Minangkabau.



Bangunan arsitektur Museum Islam Nusantara Lasem yang merupakan paduan gaya rumah gadang, Jawa, dan Islam,

18/9/2023 (Foto: dok. kemenparekraf).

Pembangunan Museum Islam Nusantara Lasem dimulai sejak Juli 2018 dan selesai pada tahun 2022. Diperkirakan pembangunannya menelan biaya sekitar Rp 4 miliar dengan sumber dana 80% dari APBD Provinsi Jawa Tengah (dana aspirasi saya sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah) dan sisanya dari dana Masjid Jami Lasem. Bangunan museum terdiri dari tiga (3) lantai. Lantai pertama terdiri dari bangunan kantor, tempat wudhu dan kamar mandi. Lantai kedua terdiri bangunan inti peruntukan museum, dan lantai tiga adalah bangunan 30 juz kaligrafi al Qur'an berbahan kayu jati.



*Prof. Dr. Mahfud Md. memotong pita peresmian Museum
Jendela Al Qur'an Lasem,
15/10/2023. (foto dok Abdul Aziz).*

Isi Museum Islam Nusantara Lasem (lantai 2) terdiri dari tiga bagian. Pertama, narasi tentang tokoh-tokoh besar dalam tiga (3) gelombang sejarah penting yang pernah hadir di Lasem. Tiga gelombang sejarah dimaskud adalah tiga periode penting dakwah Islam yang berhasil mengislamkan nusantara. Kedua, berisi artefak peninggalan barang-barang kuno atau antik, yang sebagiannya kita temukan di sekitar kompleks Masjid Lasem ketika proses pembangunan. Ada keramik, ada batu bata besar, ada koin-koin kuno. Ketiga, berisi tentang manuskrip atau kitab-kitab kuno (*turats*) yang kita kumpulkan dari berbagai sumber. Tercatat sudah ada koleksi 15 manuskrip/kitab kuno, salah satunya manuskrip Al-Qur'an yang ukurannya cukup besar 70 x 60 cm. Ikhtiar untuk mengumpulkan manuskrip, *turats* dan kitab-kitab kuno terus dilakukan yang merupakan peninggalan karya ulama-ulama masyhur di Nusantara.

WISATA BERBASIS MASJID

Menparekraf Sandiaga Uno berencana mengembangkan paket-paket wisata religi berbasis masjid-masjid di Nusantara yang memiliki nilai sejarah Islam di Indonesia. Menurut dia, program ini sejalan dengan Indonesia sebagai negara dengan populasi umat muslim terbesar di dunia. "Jadi seluruh masjid di Nusantara akan kami rangkaikan dalam paket wisata. Dan kami mulai hari ini di Masjid Jami Lasem dengan Museum Islam Nusantara Lasem yang akan menjadi daya tariknya," tegas Sandiaga.

Menparekraf mengapresiasi pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan Museum Islam Nusantara Lasem. Selain sebagai ruang peninggalan sejarah Islam, Museum ini juga sebagai bukti akulturasi masyarakat di Kecamatan Lasem yang hidup berdampingan secara harmonis meski terdiri dari etnis Jawa, Tionghoa, dan Arab.

Yang unik dari Museum Islam Nusantara, lanjut Sandiaga, terletak pada bentuk bangunannya yang menyerupai rumah gadang khas Sumatera Barat, yang juga diberi sentuhan Rumah Adat Jawa. Menariknya lagi, museum ini dibangun di kawasan pecinan. "Ini bentuk hasil akulturasi karena terinspirasi dari tokoh ulama Lasem KH Ma'shum yang merupakan keturunan Sultan Minangkabau dan KH Baidlowi keturunan ningrat Jawa," ujarnya.



Menparekraf Sandiaga memberi sambutan saat peresmian. Museum Islam Nusantara Lasem (Foto: Kompas.com/Aria Rusta Yuli P)

Menurut Sandiaga, Museum Islam Nusantara Lasem merupakan program kolaboratif, yang akan diamplifikasi melalui paket wisata berbasis masjid dan wisata sejarah. Dia menilai program kolaboratif seperti ini membuka peluang usaha dan lapangan kerja yang lebih luas. Dia mencontohkan dalam museum juga terdapat batik Lasem yang selama ini dipromosikan sudah memiliki etalase sehingga membuka peluang usaha dan lapangan kerja.

Menparekraf menambahkan, agama Islam yang *rahmatan lil 'alamin* ditunjukkan dengan koleksi yang ada di dalam museum, yang diperkuat dengan koleksi sejarah. Yang menarik menurut Sandiaga, Museum Islam Nusantara Lasem memiliki koleksi daun pintu dan jendela

yang menampilkan kaligrafi ayat Al-Qur'an 30 juz. "Mudah-mudahan dalam waktu dekat Wakil Presiden Ma'ruf Amin berkenan untuk membuka secara resmi *grand opening* Museum Islam Nusantara," ungkapnya.]

— REKONSTRUKSI SEJARAH DEMAK —

Pasca Museum Islam Nusantara Lasem, gagasan berikutnya yang menantang adalah melakukan rekonstruksi sejarah Islam Demak. Sebuah rekonstruksi untuk kembali membangkitkan memori kolektif kita tentang kerajaan Islam pertama Demak yang telah sukses mengislamkan nusantara. Dalam berbagai kesempatan, tema itulah yang terus saya gulirkan. Sebuah tema lanjutan pasca museum Islam Nusantara Lasem terbangun.

Secara kronologis, tema ini saya mulai gulirkan saat sekitar pertengahan tahun 2019 (saat pembangunan Museum Islam Nusantara Lasem sedang berjalan). Waktu itu, dalam rangka mendukung candi Borobudur sebagai pusat kawasan strategis pariwisata Nasional, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengusulkan dibangunnya Masjid Agung Jawa Tengah II di kawasan sekitar Borobudur (MAJT 1 berada di kota Semarang). Masjid besar ini akan menjadi ‘icon’ baru yang akan melengkapi kawasan wisata Borobudur. Jika umat Islam berkunjung ke candi Borobudur, maka akan ada tempat transit untuk shalat, sambil di situ ada berbagai *handycraft* dan sekaligus sebagai *Islamic center*”, tandas Ganjar Pranowo seperti dikutip koran Suara Merdeka (11/8/2019).

OPSI ALTERNATIF

Sebuah opsi alternatif sengaja saya hadirkan atas rencana pembangunan MAJT II. Saat itu, dalam rapat Banggar yang membahas alokasi anggaran Detail Engineering Design (DED) MAJT II di Magelang, saya menyampaikan opsi baru. Opsi baru itu saya narasikan dalam ungkapan : bukankah problem generasi kita sekarang adalah tercerabut dari akar sejarahnya? bukankah menghadirkan kembali akar kejayaan masa lalu kita sangatlah penting? Bukankah kita pernah memiliki peradaban hebat Islam Demak? Bukankah rekonstruksi replika Istana Kerajaan Demak akan jauh lebih bermakna bagi Jawa Tengah ?



Seminar raperda tentang pemajuan kebudayaan Jawa Tengah di The Sunan Hotel Kota Surakarta (Foto Humas DPRD Jateng).

Jawa Tengah harus memiliki kebanggaan yang bersumber dari akar sejarah penting masa lalunya. Selama ini, kerajaan Demak hanya diingat dalam tulisan tulisan saja. Demak tidak memiliki situs peninggalan masa

lalunya. Peninggalan artefaknya juga berserakan dimana-mana. Situs bangunan istananya tidak ada. Karena itu, perlu di rekonstruksi agar kembali dikenang oleh generasi sekarang. Namun sayang, rapat banggar tidak menyetujui usulan tersebut.

Seiring waktu berjalan, dua tahun kemudian, wacana rekonstruksi sejarah Demak menemukan kembali momentumnya. Momentum itu muncul seiring kesempatan inisiasi komisi E DPRD Jawa Tengah untuk program pembentukan peraturan daerah (propemperda) tahun 2023. Saya sengaja mengusulkan rancangan perda tentang pemajuan kebudayaan, agar ia menjadi pintu masuk kembali diskusi tentang rekonstruksi sejarah Demak, yang dulu sempat tertunda.

Saat seminar raperda tersebut, saya menegaskan posisi penting peradaban Islam Demak dalam proses pembentukan kebudayaan nasional. Peradaban Demak pernah memberikan kontribusi terbesarnya dalam berbagai aspek kehidupan di nusantara. Sebagai sebuah ‘entitas’ sejarah yang pernah ada di Jawa Tengah, peradaban Demak telah melahirkan peradaban Islam Pajang, Mataram Islam, era kolonialisme dan hingga sekarang ini.

Masyarakat Jawa yang *njawani* dan beragama Islam, penuh *unggah-ungguh*, tata krama, sopan-santun, gotong royong, tidak bisa lepas dari akar sejarah peradaban dan kebudayaan Demak. Berbagai jenis tradisi kebudayaan yang berkembang di tengah masyarakat seperti tradisi lisan, ritual, kesenian, manuskrip, permainan rakyat juga berakar kuat dari tradisi masa lalu

peradaban Islam Demak. Dalam kontek tantangan arus global yang mengancam generasi muda sekarang, kembali merekonstruksi kebudayaan luhur ini menjadi langkah penting yang seharusnya dilakukan.

GULIRKAN DISKUSI PUBLIK

Berbagai diskusi publik terus saya gulirkan untuk menunjukkan bahwa saya serius mengangkat tema tersebut. Dalam diskusi itu, banyak pegiat sejarah dan pakar kebudayaan saya undang. Diskusi pertama saya gelar di ‘omah OEI’ Lasem dengan tema “Rekonstruksi Sejarah Demak (Menelusuri Akar Kebudayaan Jawa Tengah)” pada tanggal 9 februari 2023. Hadir sebagai narasumber sejarawan Undip Dr. Alamsyah, SS. M Hum, pegiat sejarah Lasem Ernantoro dan saya sendiri selaku anggota DPRD Jateng asal Lasem.



Diskusi 1 “Rekonstruksi Sejarah Demak” di Rumah Oei Lasem,

9/2/2023

(foto dok. Abdul Aziz)

Diskusi kedua saya gelar di Cafe Perko Pati, menghadirkan narasumber Dr. Abdul Jalil (budayawan dan pengurus yayasan Menara Kudus), Drs. Ahmad Farid (Kiai dan pegiat budaya Pati), Mas Ragil Haryo (pegawai sejarah Pati) dan saya sendiri.



*Diskusi 2 "Rekonstruksi Sejarah Demak" di Cafe Perko Pati,
11/2/2023 (Foto dok. pribadi Abdul Aziz)*

Diskusi ketiga berjudul potret Islam Nusantara dengan sub judul jejak sejarah, pemikiran dan sanad saya gelar di kedai 'canduku' Lasem, 18/2/2023. Penulis buku sejarah Lasem Akrom Unjiya dan direktur AKSI Rembang Sugihariyadi saya hadirkan dalam diskusi tersebut. Akrom menjelaskan, akar sejarah Demak salah satunya bersumber dari sejarah peradaban kota Lasem. Secara genealogis,



*Diskusi 3 “Rekonstruksi Sejarah Demak” di Cafe canduku
Rembang, 18/2/2023
(Foto dok. pribadi Abdul Aziz)*

Diskusi keempat kami gelar di Pati lagi, dengan tema ‘rekonstruksi sejarah kebudayaan Demak’. Dalam diskusi itu saya menghadirkan narasumber antara lain kiai kajen pegiat literasi KH. Ubaidillah Wahab, mas Zamroni (pegawai sejarah) dan saya sendiri.



*Diskusi 4 “Rekonstruksi Sejarah Demak” di cafe Teras Sore
Wedarijaka Pati
pada tanggal 14/4/2021 (foto dok abdul aziz)*

Sebuah pagelaran dengan tajuk ‘ngaji kebudayaan’ (rekonstruksi Sejarah Demak) saya juga gelar di alon alon Lasem kota pusaka. Hadir dalam pagelaran itu Kyai Budayawan Anwar Budi Harjono dari Semarang dan ketua Lesbumi Pusat Kyai Jadul Maula.



*Diskusi 5 ngaji “Rekonstruksi Sejarah Demak” di alon alon Kota
Pusaka Lasem, 1/7/2023
(foto dok. pribadi Abdul Aziz)*

Untuk memperluas keterlibatan, diskusi juga saya rancang digelar di Kudus, Demak dan Semarang. Para tokoh lokal sudah saya rembuk untuk agenda tersebut. Namun sayang gagal terlaksana. Justru tanpa diduga, diskusinya berlanjut di Parakan Temanggung. Narasumbernya adalah Dr. Arif Akhyat (sejarawan dari UGM) dan Ngatawi Al Sastrow (Budayawan dari Jakarta). Sebagai kota yang telah ditetapkan sebagai kota pusaka oleh pemerintah pusat, Parakan memiliki komunitas pegiat sejarah yang cukup dinamis untuk memperkaya diskusi.



*Diskusi 6 “Rekonstruksi Sejarah Demak” di Pendopo Kawedanan Parakan, 19/11/2023
(Foto dok. pribadi Abdul Aziz)*

ICON BARU JAWA TENGAH

Arah konkrit yang ingin diwujudkan dari diskursus tentang “rekonstruksi Sejarah Demak” adalah dibangunnya kembali “replika Istana Kerajaan Demak”. Bangunan ini kita harapkan akan menjadi icon baru pariwisata andalan Jawa Tengah. Berkaca dari Jawa Timur yang telah memiliki icon pariwisata bernama Jatim Park 1, 2, 3 dan 4 yang berbasis wisata alam, maka saatnya Jawa Tengah membangun icon pariwisatanya dengan paradigma yang berbeda. Saatnya icon baru pariwisata andalan itu berbasis edukasi sejarah.

Icon baru itu berbentuk bangunan replika istana kerajaan Demak disertai berbagai bangunan pendukung lainnya yang menyatu dengan kawasan wisata religi makam sunan Kalijaga demak dan Masjid Agung Demak. Icon baru ini dapat menjadi ‘jateng park’ pertama yang kita

hadirkan sebagai pusat pariwisata berbasis sejarah yang exotik dan membanggakan. Kami sebut membanggakan sebab dari peradaban Demak lah peradaban Islam Nusantara berkembang dan dipeluk oleh mayoritas penduduk di negeri ini. Dari peradaban Demak lah Indonesia menjadi negeri Muslim terbesar di dunia yang mengajarkan ‘harmoni’. []

— To Be UNDESIRABLE —

Dua kali tersingkir sebab "undesirable". Pakemnya, jatah pimpinan pansus digilir urut dari fraksi terbesar hingga terkecil. Lima bulan lalu, saya tergusur dari 'ndilalah' jatah wakil ketua pansus RTRW Jateng 2024-2044. Barusan, tergeser pula dari potensi jatah ketua pansus RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Jateng 2025-2045 (sebab diserahkan ke Bapemperda DPRD Jateng).

"Undesirable atau tidak diinginkan. Oleh siapa ? Oleh mereka yang pakem berpikirnya terlalu normatif, kolot dan atau 'mutatis mutandis'. Bagi saya, wakil rakyat harus berani dengan terobosan kebijakan, meski melawan aturan di atasnya (saat menjadi ketua pansus revisi RTRW tahun 2018). Ia juga harus berani berimprovisasi untuk mewujudkan kebijakan yang adil (saat menjadi ketua pansus RPJMD 2018-2023). Ia juga harus berani merombak konsep penggabungan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) berdasarkan arah yang lebih paradigmatis (saat menjadi ketua pansus SOTK tahun 2022). Namun sekali lagi, "undesirable".

Dua bulan lagi pengabdianku berakhir. Inilah perjalanan indahku ...

Tulisan tersebut adalah ekspresi dan refleksi saya, atas berbagai tantangan sosial politik yang saya hadapi, berkaca dalam politik lokal Jawa Tengah (menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah 3 periode; 2009-2024). Di penghujung perjalanan itu, saya ‘*to be undesirable*’.

Ya, menjadi ‘orang yang tidak diinginkan’ (*undesirable*), itulah resiko politik yang saya terima. Dua kali kesempatan terakhir memimpin pansus bernilai strategis yang kemudian lepas, tentu sangat disayangkan. Yang pertama, saat digulirkannya kembali pansus perda RTRW Jawa Tengah tahun 2024-2045. Meski hanya jatah wakil ketua, tapi saya yakin akan berdampak signifikan, jika kesempatan itu tidak dihilangkan. Dihilangkan karena alasan-alasan yang tidak disampaikan. Dihilangkan karena alasan-alasan yang mudah ditebak; demi lancarnya pembahasan sesuai keinginan.

Yang kedua, saat digulirkannya pansus DPRD Jawa Tengah tentang Perda RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah). Yang terakhir ini, perencanaan pembangunan Jawa Tengah berjangka waktu 20 tahun ke depan (2024-2040). Sangat strategis karena menjadi pijakan konseptual penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Sangat kuat signifikansinya jika dua kesempatan terakhir ini saya pegang. Namun sayang. Garis tangan belum datang. Melayang karena tidak diinginkan.

Tidak jadi soal, menjadi orang yang tidak dikehendaki, dalam periode politik yang penuh dengan

anomali. Periode politik yang penuh dengan absurditas. Periode politik yang ditandai dengan kepentingan pribadi dan kelompok lebih diutamakan daripada kepentingan umum. Periode politik yang diwarnai dengan perilaku elit yang serba pragmatis. Perilaku elit yang cenderung memanfaatkan kekuasaan untuk memperkaya diri dan mempertahankan posisi, daripada kepentingan untuk melayani dan mengabdi.

Selama lima belas tahun mengabdi, saya mungkin telah dianggap menjadi 'duri dalam daging'. Saya mengalami cibiran, intimidasi, dan bahkan ancaman. Tetapi saya tidak pernah menyerah. Kehadiran saya akhirnya tidak lagi diinginkan, karena saya selalu berusaha menerobos sekat-sekat kebuntuan. Memperjuangkan hak-hak mereka yang saya anggap perlu diperjuangkan. Menegakkan keadilan untuk pemerataan pendidikan. Mengantisipasi krisis iklim dengan terobosan kebijakan. Membangun memori kolektif masa lalu untuk keunggulan masa depan.

Berkaca dan muhasabah diri juga tidak kalah penting. Saya bukanlah siapa-siapa. Hanya anak kampung dari seorang ayah petani di sebuah desa di Bojonegoro Jawa Timur. Saya tidak punya beban. Tapi justru syarat beban jika tidak mampu berbuat apa-apa. Hanya makan gaji buta. Inilah yang mensuplai semangat saya untuk terus berjuang menerobos tantangan dengan solusi keputusan-keputusan terbaik. Jalan trabas untuk mengurai benang kusut yang ada. Jalan trabas untuk memberi manfaat sebagai seorang politisi. Jalan

menghadirkan ‘makna’ dalam bingkai politik lokal Jawa Tengah. Meski itu beresiko terjal, tapi indah...

‘To be undesirable’...[]

Buku ini mengisahkan perjalanan politik seorang aktor lokal yang menembus batas-batas konvensional jalur kekuasaan di Jawa Tengah. Dengan pendekatan personal dan naratif, penulis merekam langkah-langkah “trabasan” — strategi tak biasa yang ditempuh sang tokoh untuk meraih dan mempertahankan pengaruh politiknya. Di tengah kompleksitas birokrasi, patronase, dan dinamika partai, buku ini menyingkap bagaimana politik lokal dijalankan tidak hanya lewat jalur formal, tapi juga melalui relasi sosial, gerakan akar rumput, dan taktik lapangan yang kerap kali luput dari sorotan media dan akademisi.

Melampaui sekadar biografi politik, buku ini juga menawarkan refleksi kritis tentang wajah demokrasi di tingkat daerah. Pembaca diajak menyusuri lanskap politik Jawa Tengah dengan segala tantangannya: dari kontestasi pilkada, dinamika elite lokal, hingga aspirasi warga biasa yang ingin didengar. Jalan Trabasku menjadi cermin atas realitas politik Indonesia di lapis bawah — penuh intrik, tetapi juga menyimpan potensi perubahan yang lahir dari kegigihan individu maupun kolektivitas yang tak menyerah oleh sistem.



Jl. Kedinding Lor, Gg. Delima no 4A
Surabaya 60129
saga.penerbit@gmail.com
www.pustakasaga.com

